

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SEJARAH PERKEMBANGAN PERHIMPUNAN INDONESIA

(Tahun 1925-1928)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Sejarah ~



Oleh :

REDEMPtus MAILAU

NIM. 011314045

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2006

SKRIPSI

SEJARAH PERKEMBANGAN PERHIMPUNAN INDONESIA

(Tahun 1925-1928)

Oleh :

REDEMPtus MAILAU

NIM : 011314045

Telah disetujui oleh :

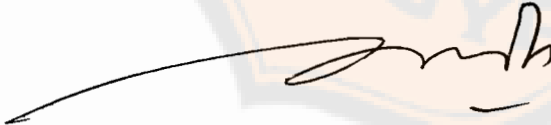
Pembimbing I



Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.

Tanggal, 29/7.....2006

Pembimbing II



Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R, S.Th.

Tanggal, 24/7.....2006

SKRIPSI

**SEJARAH PERKEMBANGAN PERHIMPUNAN INDONESIA
(Tahun 1925-1928)**

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

REDEMPTUS MAILAU

NIM : 011314045

**Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 20 Juni 2006
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Katua	Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R, S.Th.	
Sekretaris	Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota	Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H	
Anggota	Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R, S.Th.	
Anggota	Drs. B. Musidi, M.Pd.	

Yogyakarta, 20 Juni 2006

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

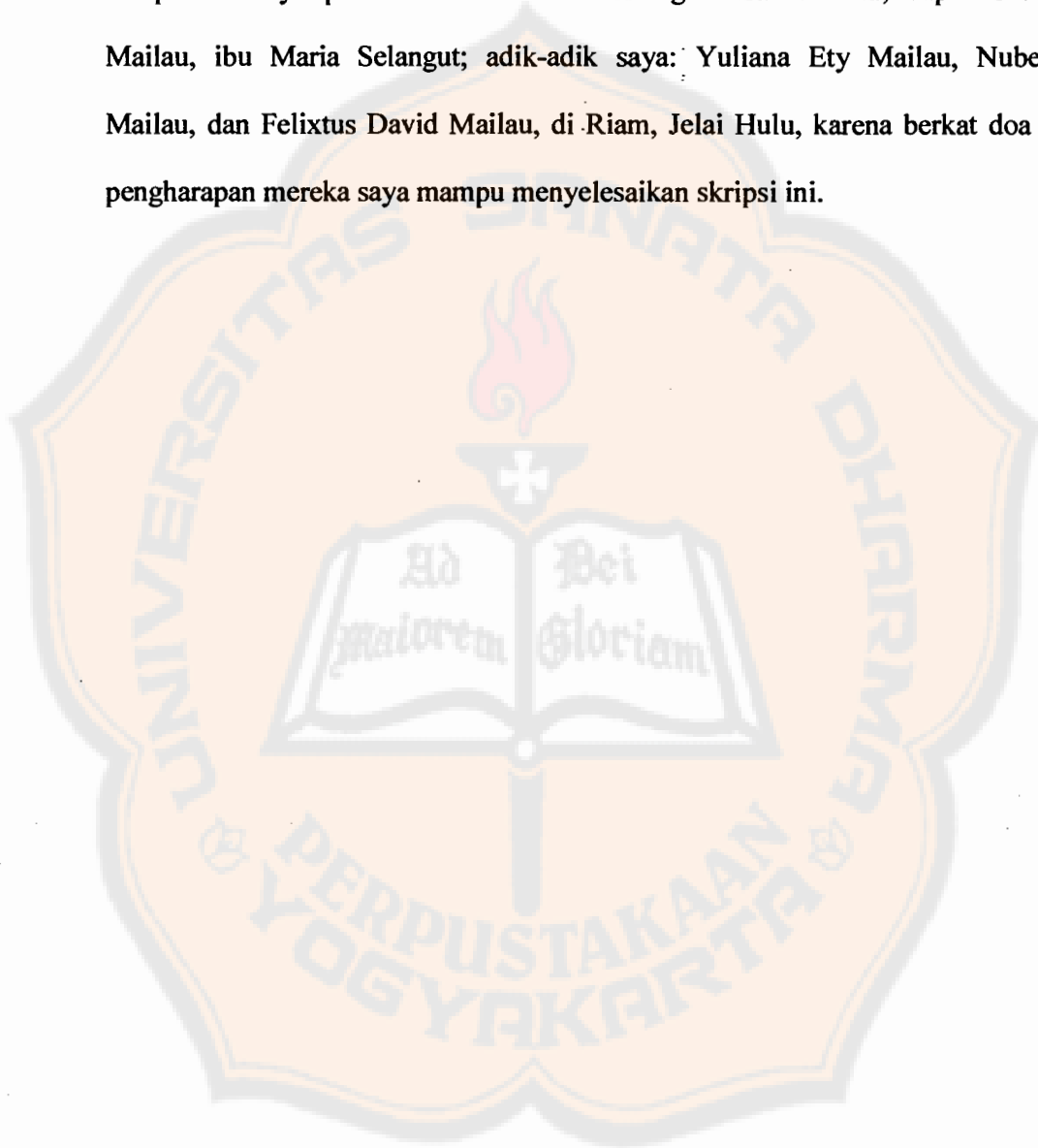
Dekan,




Drs.T. Sarkim, M.Ed, Ph.D.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga besar Mailau; bapak Markus Mailau, ibu Maria Selangut; adik-adik saya: Yuliana Ety Mailau, Nubertus Mailau, dan Felixtus David Mailau, di Riam, Jelai Hulu, karena berkat doa dan pengharapan mereka saya mampu menyelesaikan skripsi ini.



MOTTO

*Hidup ini akan berarti jika diisi dengan tindakan nyata sesuai
dengan realitas hidup

by: (Redemptus Mailau: 2006 M)

*Hidup yang tidak pernah direfleksikan adalah hidup yang tak
pantas dijalani

by: (Socrates: 469-399 SM)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 07 Mei 2006

Penulis



Redemptus Mailau

ABSTRAK

**SEJARAH PERKEMBANGAN PERHIMPUNAN INDONESIA
(Tahun 1925-1928)**

Oleh : Redemptus Mailau
Nim : 011314045

Skripsi yang berjudul Sejarah Perkembangan Perhimpunan Indonesia Tahun 1925-1928, bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan pokok yang menjadi perhatian penulis, yaitu 1) Mengapa arah perjuangan Perhimpunan Indonesia berubah haluan dari organisasi yang bersifat sosial (perkumpulan mahasiswa) ke organisasi yang bersifat politis?, 2) Bagaimanakah kegiatan politik Perhimpunan Indonesia dalam menyebarluaskan tujuan Indonesia merdeka?, dan 3) Apa saja bentuk sumbangan Perhimpunan Indonesia bagi Bangsa Indonesia?

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini melalui studi pustaka (*library reseach*). Metode penelitiannya ialah menggunakan metode sejarah. Penggunaan metode sejarah untuk penulisan kronologis dan mendukung sumber data penulisan. Adapun langkah-langkah penulisannya adalah mencakup pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan historis dan politik. Pendekatan historis digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fakta-fakta mengenai Perhimpunan Indonesia tahun 1925-1928. Pendekatan politik digunakan untuk mengkaji objek penelitian supaya mendukung penjelasan pada pembahasan permasalahan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1) Ada pengaruh yang sangat besar terhadap *Indische Vereeniging* setelah; a) Kedatangan tiga tokoh *Indische Partij*, b) Ketidakpercayaan Perhimpunan Indonesia terhadap pemerintah, dan c) Kedatangan mahasiswa baru dari tanah air. Oleh sebab itu Perhimpunan Indonesia mengubah arah perjuangannya yang semula bersifat sosial-budaya menjadi politik radikal. (2) Untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka, maka Perhimpunan Indonesia melakukan propaganda politik. Kegiatan politiknya dilakukan di negara Belanda, di beberapa negara Eropa seperti mengikuti Kongres Demokrasi Internasional di Bierville, Kongres Anti Penindasan Kolonial di Brussel, dan Pidato Muhammad Hatta di Gland dan Utrecht. Perhimpunan Indonesia juga melakukan kegiatan politik di tanah air dengan cara pembentukan partai nasional baru, penyusupan kedalam partai-partai politik, mendirikan kelompok studi, pembentukan partai nasional dan mendirikan organisasi persatuan pemuda. (3) Sumbangan Perhimpunan Indonesia kepada bangsa Indonesia sangat besar, terutama sebagai peletak dasar ideologi sekuler seperti nama Indonesia, bahasa Indonesia, bendera merah putih, peci, dan ide persatuan, *non-cooperation* dan percaya kepada kemampuan sendiri.

ABSTRACT

**THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF ASSOCIATION OF
INDONESIA (1925-1928)**

By : Redemptus Mailau
NIM : 011314045

A the thesis that titled "The History of Development of Association of Indonesia in 1925-1928" is purposed to answer three subject matters be an attention of writer, that are : first why are the purpose changed from social organization (association of student) into political organization? Second how is the activity of politics of Association of Indonesia in disseminating the purpose of independent Indonesia? Third what kinds of contributions of Association of Indonesia are given to Indonesia itself?

This is a descriptive-analytical thesis. In thesis arrangement, I got the data from library research study. The used method of research is the history method. Using the history method is to write the chronologic and support the sources of data. The ways of writing are choice of topic, collecting the sources, verification, interpretation, and writing itself. The approach of research uses the politics and history approach. The politics approach is to find out the object of research in order to support the explanation in figuring out the problem. And the history approach used for explanation and analytics of the facts about Association of Indonesia in 1925-1928.

The results of this research are follow : (1) There are huge influences to Indische Vereeniging after ; a) The presenting of three men in Indische Partij, b) The untrustworthy of Association of Indonesia to the government, c) The presenting of new students from Indonesia. Therefore, the Association of Indonesia changed the purpose of their struggle from social-culture purpose into political purpose which was radical. (2) To reach the purpose of independent Indonesia, the Association of Indonesia does the politics propagate. They do their politics activity in Nederland, some European countries such as attending the International Democratization Congress in Bierville, the Anti-Oppression of Colonial Congress in Brussels, and the speech of Muhammad Hatta in Gland and Utrecht. The Association of Indonesia also does some politics activity in Indonesia with forming the new national party, infiltration in politics parties, making study group, forming national party, and establish the organization of young union. (3) The contribution of the Association of Indonesia to Indonesia is very big, particularly as giver of basis of secular ideology such as name of Indonesia, Indonesian Language, our red-white flag, peci, and idea of unity, non-cooperation, and trust to our own ability.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ungkapkan atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Sejarah Perkembangan Perhimpunan Indonesia (Tahun 1925-1928)” dapat diselesaikan dengan baik. Penulis tidak lupa dengan bantuan semua pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dekan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan studi dengan baik.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di prodi ini dengan hasil yang baik pula.
4. Prof. Dr. P.J. Suwarno S.H, selaku dosen pembimbing I, yang telah dengan sabar mengarahkan, mengoreksi dan menyarankan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R, S.Th, selaku dosen pembimbing II, yang telah dengan sabar pula walaupun penuh dengan kesibukan untuk memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya yang bimbingan skripsi.
6. Dosen-dosen prodi pendidikan sejarah yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada saya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

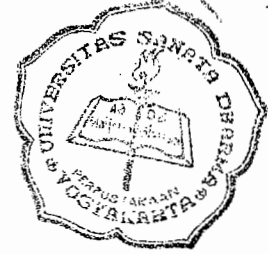
7. Markus Mailau dan Maria Selangut, yang telah memberikan kasih sayangnya dan pula telah mendukung dengan doa, supaya penulis bisa menyelesaikan kuliah ini dengan baik.
8. Yuliana Ety Mailau, Nubertus Mailau, dan Felixtus Mailau, adik-adik saya dengan besar hati mendukung saya kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Verlinda Suciaty Karyanto, kekasih saya yang dengan penuh perhatian, doa dan kasih sayangnya untuk terus-menerus mensupports saya supaya kuliah dan pengerjaan skripsi ini cepat selesai.
10. Teman-teman saya di Club PBS-KK; Ecin, Yosep-Evi, Yedi P, dan lainnya, yang telah memberikan semangat.
11. Teman-teman saya di Menwa Sanata Dharma: Komandan, Wadan, staf-staf, dan para anggotanya.
12. Drs. Yulianus Gumpol, selaku ketua PBS-KK beserta staf-stafnya, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk studi ini.
13. Petrus Rinto Pr, yang telah mendukung dan memberikan pinjaman komputernya sehingga penulis bisa menulis skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bisa membangun penulis untuk perbaikan dan karya-karya selanjutnya.

Yogyakarta, 07 Mei 2006

Penulis

Redemptus Mailau



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING -----	ii
HALAMAN PENGESAHAN -----	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN -----	iv
HALAMAN MOTTO -----	v
HALAMAN KEASLIAN KARYA -----	vi
ABSTRAK -----	vii
ABSTRACT -----	viii
KATA PENGANTAR -----	ix
DAFTAR ISI -----	xi
DAFTAR LAMPIRAN -----	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah -----	8
C. Tujuan Penelitian -----	9
D. Manfaat Hasil Penelitian-----	10
E. Tinjauan Pustaka -----	11
F. Landasan Teori -----	14
G. Hipotesis -----	18
H. Metode dan Pendekatan Penelitian	
1. Metode Penelitian -----	19
2. Pendekatan Penelitian -----	23

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

I. Sistematika Penulisan-----	25
BAB II. LATAR BELAKANG PERJUANGAN POLITIK PERHIMPUNAN INDONESIA	
A. Peranan para Pemimpin <i>Indische Partij</i> -----	30
B. Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah -----	35
C. Kesadaran Politik Baru-----	38
BAB III. KEGIATAN POLITIK PERHIMPUNAN INDONESIA	
A. Kegiatan Politik Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda dan di Negara-Negara Eropa -----	42
1. Kegiatan Politik di Negeri Belanda -----	43
a. Kegiatan Politik Perhimpunan Indonesia Awal -----	43
b. Perhimpunan Indonesia dengan Liga Cabang Belanda-----	63
c. Hubungan Perhimpunan Indonesia dengan Komunis -----	65
d. Pengadilan Empat Anggota Perhimpunan Indonesia-----	69
2. Kegiatan Politik di Beberapa Negara Eropa -----	80
a. Propaganda di Paris-----	82
b. Kongres Demokrasi Internasional di Bierville -----	86
c. Kongres Anti Penindasan Kolonial di Brussel-----	89
d. Pidato Muhammad Hatta di Gland -----	96
e. Pidato Muhammad Hatta di Utrech -----	99
B. Kegiatan Politik Perhimpunan Indonesia di Indonesia-----	102
1. Hubungan Perhimpunan Indonesia dengan Tanah Air -----	102
a. Rencana Pembentukan Partai Nasional Baru -----	102

b. Penyusupan Kedalam Partai Politik-----	111
2. Kegiatan Politik Anggota Perhimpunan Indonesia di Indonesia-----	116
a. Pembentukan Kelompok Studi-----	116
b. Pembentukan Partai Nasional Indonesia -----	122
c. Berdirinya Organisasi Persatuan Pemuda -----	129
1). Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia -----	130
2). Kongres Pemuda I -----	132
3). Pemuda Indonesia -----	134
4). Kongres Pemuda II -----	137
BAB IV. SUMBANGAN PERHIMPUNAN INDONESIA BAGI BANGSA INDONESIA	
A. Kontribusi Perhimpunan Indonesia Bagi Bangsa Indonesia-----	145
B. Hasil yang Telah Diperoleh Perhimpunan Indonesia Selama Lima Tahun (1925-1930)-----	152
1. Hubungan Perhimpunan Indonesia dengan Para Pemimpin Dunia---	152
2. Simpati Dunia Internasional terhadap Indonesia-----	155
3. Pengaruh Perhimpunan Indonesia terhadap Indonesia -----	157
BAB V. KESIMPULAN -----	159
DAFTAR PUSTAKA -----	165
LAMPIRAN -----	172
SUPLEMEN -----	195

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I. PENJELASAN PENUTUP -----	172
a. Karakter Perhimpunan Indonesia -----	172
b. Prinsip-Prinsip Program -----	172
c. Masalah Kekerasan -----	174
d. Hubungan dengan Komunis Indonesia -----	176
e. Propaganda Luar Negeri -----	177
f. Pembentukan suatu Negara dalam Negara -----	177
LAMPIRAN II. PERHIMPUNAN INDONESIA TAHUN 1908-1928 -----	179
Malam Peringatan -----	179
Soerat-Soerat dan Telegram -----	180
<i>Politie Dalem Vergadering</i> tidak boleh Dioetjapken Perkataan “Merdeka” -----	180
Pidato Hatta -----	181
Poetoesan -----	182
LAMPIRAN III. PEMBELAAN EMPAT ANGGOTA PERHIMPUNAN INDONESIA DI PENGADILAN DEN HAAG -----	183
1. Muhammad Hatta -----	183
2. R.M. Abdul Majid Joyoadiningrat -----	190
3. Ali Sastroamidjoyo -----	192
4. Nazir Sutan Pamuncak -----	193

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penulisan sejarah (*historiografi*) pada perkembangan penulisannya tidak terbatas pada kajian sejarah politik saja, akan tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia seperti kehidupan sosial kebudayaan, perekonomian, kemiliteran, dan keagamaan. Kajian penulisan sejarah dispesialisasikan, misalnya sekarang berkembang menjadi sejarah pemikiran atau sejarah ide-ide, sejarah politik, sejarah budaya, sejarah ekonomi, sejarah sosial, sejarah agama, dan sebagainya. Salah satu tokoh Perhimpunan Indonesia, Muhammad Hatta mengatakan bahwa penulisan sejarah tersebut terdapat beberapa bagian seperti sejarah agama, sejarah seni, sejarah ekonomi, sejarah politik, dan lain sebagainya.¹

Cabang-cabang penulisan sejarah tersebut tidak terlepas dari aspek ruang fakta peristiwa itu terjadi. Aspek tempat suatu peristiwa menurut Muhammad Hatta tidak terlepas dari letak geografis sejarah tersebut. Geografi dapat digunakan dalam penelitian dan penulisan sejarah. Caranya dengan menelaah kondisi geografis dari wilayah yang bersangkutan di masa lampau.² Letak geografis Indonesia memang strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudera, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Secara geografis

¹ Mohamad Hatta, *Pengantar Kejalan Ilmu Pengetahuan*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1960, hlm.53.

² *Idem*.

Indonesia termasuk dalam benua Asia, dan secara budaya (*culture*) di bagi menjadi: Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Indonesia termasuk ke dalam wilayah kultur Asia Tenggara dengan posisi yang sangat menguntungkan. Secara astronomis Indonesia terletak pada 6 LU – 11 LS dan 95 BT – 140 BT dan juga Indonesia dilalui garis Khatulistiwa yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat.

Berdasarkan letak yang strategis tersebut menjadikan Indonesia berada pada posisi silang jalan perdagangan internasional kuno dari Tiongkok ke India melalui Selat Malaka atau sebaliknya.³ Dengan melalui jalur perdagangan maka pengaruh dari luar Indonesia masuk, baik dari India, China, Islam (Arab-Persia) maupun dari bangsa Barat (Eropa).⁴

Pada perkembangan perdagangan abad XVI, bangsa Eropa yang pertama kali masuk ke Indonesia ialah bangsa Portugis yang dipimpin oleh de Albuquerque pada tahun 1511 dengan merebut Malaka, kemudian berdagang dengan Sunda Kelapa, Demak, Banten, Cirebon, dan daerah Maluku (Ternate-Tidore).

Sedangkan bangsa Belanda mulai masuk Indonesia tahun 1596 yang dipimpin Cornelis de Houtman dengan menemukan jalan rahasia perdagangan. Maka pada tahun 1596 Belanda tiba di Indonesia pertama di Banten Lewat Selat

³ D.H. Burger, *Sejarah Ekonomi Sosiologi Indonesia* (terjemahan), Pradnya Paramita, Jakarta, 1957, hlm. 15.

⁴ H.S. Soehardjo, *Reader Sejarah Asia Tenggara I*, Jurusan Sejarah dan Geografi Sosial, IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, 1983, hlm. 4.

Sunda, ke Maluku dan kembali ke negerinya. Banyak pedagang Belanda dan non Belanda di Indonesia, maka untuk menghindari persaingan mereka mendirikan sebuah kongsi dagang yang diberi nama VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) pada tahun 1602. Sebelum para pedagang Portugis, Belanda, China, dan India masuk ke Indonesia, para pedagang antar Indonesia atau pedagang antar pulau telah terjadi hubungan yang sangat baik di seluruh Nusantara. Kesamaan-kesamaan tidak hanya memudahkan komunikasi dan interaksi, tetapi juga akumulasi darinya merupakan modal dasar integrasi.⁵ Artinya bahwa melalui interaksi perdagangan telah tumbuh benih-benih persatuan walaupun masih bersifat lokal atau ke daerahan.

VOC merupakan kongsi dagang Hindia Timur dengan memonopoli perdagangan untuk menghindari persaingan, maka dibentuklah hak istimewa (*Octrooi*) antara lain berisi :

- a. Hak monopoli perdagangan
- b. Hak membentuk tentara dan membangun benteng-benteng
- c. Hak membuat uang
- d. Hak mengumumkan perang dan mengadakan perjanjian
- e. Hak memerintah jajahan.

Sehingga kongsi dagang ini tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi saja melainkan politik dan militer. Maka dengan demikian, Belanda telah

⁵ A.K. Wiharyanto, *Reader Sejarah Indonesia Madya Abad XVI-XVIII*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2005, hlm. 49.

mendirikan pemerintahan ekonomi di Indonesia di bawah bendera VOC dan pemerintahan Belanda. Di bawah ini kutipan pendapat Ahmad Soebardjo, dalam pidatonya di hari peringatan Perhimpunan Indonesia di Den Haag pada tanggal 22 Desember 1928 dan pada waktu itu masih anggota aktif Perhimpunan Indonesia adalah:

“.....maksud mereka itu datang ke tanah air kita bukan disebabkan oleh karena mereka itu merasa mempunyai cita-cita untuk membawa kultur Barat ke Timur, akan tetapi semata-mata untuk berdagang alias mencari uang dan isi perut. Kemauan apalagi kemampuan menjadi “Bapa” atau “Guru” dari bahasa kita, jauhlah dari mereka. Maka mereka itu jauh dari beradap, apalagi berbudi. Ia mempunyai maksud satu, yaitu mengeksploitasi bangsa dan tanah air kita, agar mereka dapat untung banyak.....”⁶

Catatan sejarah bangsa Indonesia bahwa sejak zaman Majapahit sampai pertengahan abad ke 19 atau sampai pada Sumpah Pemuda 1928, dilalui dengan berbagai gerakan revolusi radikal untuk mempertahankan haknya seperti tanah dan area perdagangan. Sartono Kartodirdjo mengatakan bahwa yang sempat menyolok disini ialah perubahan persepsi sejarah yang radikal dan revolusioner.⁷ Di masa penguasaan kolonialisasi ekonomi dan sosial-politik oleh Belanda mengakibatkan bangkitnya perlawanan dari berbagai daerah. Namun perlawanan-perlawanan tersebut selalu gagal, karena sebelum abad XX perlawanan di setiap daerah masih mengandalkan kharisma dari seorang raja/sultan atau pemimpin dan

⁶A. Zainoel Ihsan dan Drs. Pitut Soeharto, *Aku Pemuda Kemarin di Hari Esok*, Jayasakti, Jakarta, 1981, hlm. 165. Catatan: penggunaan kutipan ini sampai seterusnya telah sesuai dengan Buku Pedoman Studi Pendidikan Sejarah, Sanata Dharma, tahun 2000, hlm. 53.

⁷ Kata Pengantar oleh Sartono Kartodirdjo dalam buku *Nasionalisme and Revolution in Indonesia*, tulisan George McTurnam Kahini (terjemahan Nin Bakti Soemanto), UNS Press, Solo, 1995.

belum ada perlawanan yang terorganisir secara teratur, yakni menggunakan sebuah organisasi yang sah, teratur, demokratis, memiliki tujuan yang jelas, yang tertuang dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) organisasi serta telah diisi oleh kaum intelektual.

Sejarah munculnya organisasi-organisasi Pergerakan Nasional Indonesia tidak terlepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Gerakan nasional sebelum tahun 1990 masih bersifat ke daerahan, negatif, irasional, dan belum ada tindak lanjut jika perlawanan gagal (*nothing follow up*). Sedangkan setelah tahun 1990, pergerakan nasional telah berkembang sehingga bentuk perlawanan bersifat nasional, positif, rasional, dan sudah ada evaluasi (*follow up*).⁸

Apa yang dicita-citakan R.A. Kartini tentang Bangsa Indonesia dengan emansipasinya hampir terwujud. Jauh sebelumnya, R.A. Kartini telah memiliki pikiran kebebasan bangsa Indonesia yakni dimulainya dengan Gerakan Emansipasi.⁹ Namun, tantangan berat untuk mencapai cita-citanya tersebut selain masalah berkeluarga dan juga belum adanya organisasi politik.

Berdasarkan pengalaman sejarah yang panjang, rasa perjuangan yang sama, masuknya pendidikan kolonial, maka cara perjuangan modern pun masuk. Model perjuangan yang dimaksud adalah perjuangan lewat organisasi-organisasi dengan tujuan yang jelas. Latar belakang pergerakan nasional Indonesia disebabkan antara lain, semakin tinggi kesadaran masyarakat bahwa kehidupan

⁸ G. Moedjanto, *Sejarah Indonesia abad ke 20*, Kanisius, Yogyakarta, 1974, hlm. 25.

⁹ Siti Soemandari Soeroto, *Kartini Sebuah Biografi*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1979, hlm. 122.

rakyat Indonesia semakin sengsara dan semakin meluasnya rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Disamping hal tersebut, juga pengaruh Barat lewat pendidikan maju, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, pergerakan menentang penguasaan bangsa Barat seperti yang terjadi di India, Turki dan lain sebagainya.

Pergerakan lewat organisasi tersebut dimulai ketika berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Soetomo yang mempengaruhi pemikiran kaum muda pelajar ketika itu. Jika dilihat sejak berdirinya Budi Utomo banyak bermunculan organisasi-oraganisasi yang menasional seperti organisasi masa Sarekat Islam (SI), *Indische Partij* (IP), tahun 1912, diikuti oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tanggal 23 Mei 1920 sebagai bentuk baru dari *Indische Social Democratische Vereeniging* (Persatuan Sosial Demokrasi India) yang didirikan tahun 1914 oleh Hendrik Sneevliet bekas anggota Partai Sosialis Demokrasi Belanda.¹⁰ Kemudian berdiri pula Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda pada tahun 1925. Perhimpunan Indonesia merupakan perkembangan dari *Indische Vereeniging* yang didirikan tahun 1908 bersamaan dengan tahun berdirinya Budi Utomo di tanah air.¹¹

Indische Vereeniging didirikan untuk mengakomodasi para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Tujuan awalnya hanyalah untuk pertemuan para

¹⁰ Blumberger dalam Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama Grafika, Jakarta, 1955, hlm. 273.

¹¹ John Ingleson, *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*, PT. Pustaka Utama Grafis, Jakarta, 1993, hlm.1.

mahasiswa, tempat bertemu dan berbincang-bincang tentang tanah air, dan tempat meluapkan emosi di tengah sibuknya kuliah. Namun dalam perkembangannya tujuan mereka berubah seperti yang terdapat dalam *statuten* pasal 2 dan perubahan pasal 2 *statuten* tersebut yakni tujuan lebih radikal dalam bidang politik, sehingga dalam perkembangan selanjutnya sebagai embrio pergerakan nasional menuju kemerdekaan.

Indische Vereeniging dalam kegiatan politiknya semakin terbuka dan memiliki tujuan yang semakin jelas setelah para mahasiswa baru datang semakin banyak, didukung oleh kebebasan berkumpul secara demokrasi oleh pemerintah Belanda, dan pengetahuan para mahasiswa yang luas karena membawa pengalaman organisasi dari tanah air, dan juga mereka berasal dari berbagai latar belakang ilmu pengetahuan sesuai jurusan yang mereka ambil di universitas. Apalagi pengaruh perubahan nama dari *Indische Vereeniging* menjadi *Indonesische Vereeniging* (Perhimpunan Indonesia) yang kemudian diikuti perubahan-perubahan organisasi, semakin jelas tujuannya tentang Indonesia merdeka. Semakin radikal lagi sikap politik para anggotanya setelah semua yang berhubungan dengan bahasa, identitas, dan semua atribut kolonial diganti menjadi identitas nasional Indonesia setelah *Indonesische Vereeniging* diubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Kemudian tidak hanya itu, Perhimpunan Indonesia memberikan pengaruh yang besar bagi bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Maka, jelas sekali mengapa perlunya peneliti menulis skripsi tentang permasalahan di bawah ini.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, keterbatasan sumber penelitian baik data primer, sekunder dan juga keterbatasan lainnya seperti waktu, dana, maka peneliti membatasi lingkup persoalan. Oleh sebab itu, hanya membahas perkembangan politik Perhimpunan Indonesia dimulai tahun 1925 sampai 1928. Perlu penulis jelaskan dan analisis tentang batasan permasalahan yang nantinya akan ditulis di bawah ini yakni terdiri dari tiga permasalahan pokok. Kemudian penulis membatasi tahun yakni dari tahun 1925 dan 1928. Penulis mengambil tahun 1925 karena Perhimpunan Indonesia berdiri tanggal 3 Februari 1925 yakni perubahan dari *Indonesische Vereeniging* menjadi Perhimpunan Indonesia. Sedangkan tahun 1928, penulis bermaksud bukan sekedar membatasi tahun sesuai keinginan penulis, akan tetapi penulis ingin mengatakan bahwa tahun 1928 peran dan aksi Perhimpunan Indonesia sudah mulai surut. Arti pentingnya sebagai suatu organisasi politik selama lima tahun sejak tahun 1923 adalah hasil dari kedatangan suatu kelompok mahasiswa yang satu sama lain mendukung usaha mereka mencari jati diri, ideologi dan wadah kebangsaan baru. Menjelang akhir tahun 1927 kebanyakan dari mahasiswa yang menjadi inti kelompok itu telah menyelesaikan studinya dan pulang ke tanah air.¹² Maka, penelitian ini lebih menekankan tahun 1925-1928 sebagai inti dari kegiatan politik Perhimpunan Indonesia.

¹² *Ibid*, hlm.91.

Organisasi politik Perhimpunan Indonesia benar-benar *stagnan* ketika para pemimpin organisasi telah pulang ke tanah air karena tugas studi mereka berakhir. Namun, sampai awal tahun 1928 Perhimpunan Indonesia masih berkibar walaupun tidak setegak tiga tahun sebelumnya. Hingga akhirnya tahun 1929, Perhimpunan Indonesia telah kehilangan langkah ketika Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan ketua pada bulan Februari 1929. Hatta harus memutuskan dengan mencurahkan semua waktunya dalam studi.

Setelah menguraikan latar belakang dan batasan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Mengapa arah perjuangan Perhimpunan Indonesia berubah haluan dari organisasi yang bersifat sosial (perkumpulan mahasiswa) ke organisasi yang bersifat politis?
2. Bagaimanakah kegiatan politik Perhimpunan Indonesia dalam menyebarkan tujuan Indonesia Merdeka?
3. Apa saja bentuk sumbangan Perhimpunan Indonesia bagi Bangsa Indonesia?

Demikian susunan permasalahan skripsi ini yang nantinya akan dijawab dalam pembahasan penelitian.

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud penulis untuk meneliti permasalahan yang telah disusun di atas adalah:

1. Secara Umum

Untuk lebih menggali nilai sejarah mengenai peranan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda dalam pergerakan nasional di Indonesia terutama tujuan Indonesia merdeka dan sumbangannya bagi bangsa Indonesia.

2. Secara Khusus

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis arah perjuangan Perhimpunan Indonesia yang berubah haluan dari organisasi yang bersifat sosial (perkumpulan mahasiswa) ke organisasi yang bersifat politis.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kegiatan politik Perhimpunan Indonesia dalam menyebarluaskan tujuan Indonesia Merdeka.
- c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sumbangan Perhimpunan Indonesia bagi bangsa Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, antara lain dalam bidang pembangunan pendidikan sejarah nasional Indonesia dalam pengajaran sejarah. Harapan-harapan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan manfaat dalam penulisan sejarah pergerakan nasional Indonesia, karena fokus penulisan skripsi ini adalah tentang Perkembangan Sejarah Perhimpunan Indonesia.

2. Dapat memberikan kontribusi kepada proses belajar mengajar pelajaran sejarah pada tingkat sekolah. Diharapkan bisa memberikan nilai dan makna sejarah untuk kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan nasional Indonesia.
3. Memberikan sumbangan kepada masyarakat seluruh Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa sumber tertulis yakni dengan menggunakan buku-buku melalui studi pustaka (*library research*). Adapun sumber-sumber tertulis dalam bentuk buku-buku yang dapat menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama; *Kesadaran Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 1978. Buku ini merupakan tulisan Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, salah satu anggota aktif Perhimpunan Indonesia. Isi buku berupa otobiografi politiknya, namun memuat sejarah latar belakang Perhimpunan Indonesia sampai sumbangan Perhimpunan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Ahmad Subardjo juga menulis tentang sejarah Perhimpunan Indonesia seperti bagaimana Perhimpunan Indonesia mencari lambang nasional Indonesia, kemudian bagaimana Perhimpunan Indonesia akhirnya menjadi simbol gerakan nasional Indonesia, dan pengaruh positif Perhimpunan Indonesia bagi bangsa Indonesia dimata internasional dan Negeri Belanda sendiri.

Kedua; Buku tulisan Ahmad Subardjo lainnya berjudul: *Peranan Ide-ide dalam Gerakan Kemerdekaan Indonesia*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1975.

Ketiga; *Kumpulan Karangan I*, Penerbit dan Balai Buku Indonesia. Jakarta, Amsterdam dan Surabaya, 1953. Buku ini dikarang oleh Muhammad Hatta, anggota Perhimpunan Indonesia. Fungsinya dalam penelitian ini adalah memberikan sumber tentang tujuan dan politik pergerakan kebangsaan Indonesia.¹³

Keempat; Muhammad Hatta juga menulis *Memoir*; Tinta Mas, Jakarta, 1979. Dalam buku ini masih menyoroiti tentang latar belakang *Indische Vereeniging* berubah menjadi *Indonesische Vereeniging*, dan dari *Indonesische Vereeniging* berubah menjadi Perhimpunan Indonesia, kemudian diikuti pula oleh perubahan lainnya seperti nama majalah Indonesia *Poetra*, dan lain sebagainya.¹⁴ Kemudian Muhammad Hatta masih menulis tentang konsep dasar kerja dalam kepengurusan baru yang diketuai oleh Iwa Koesoema Soemantri. Isi dasar kerjanya adalah masa depan bangsa Indonesia tentang *non-cooperation*. Pada tanggal 9 Februari 1924 terjadi penggantian pengurus dari Iwa Koesoema Soemantri kepada Nazir Pamontjak. Isi dasar kerjanya adalah persatuan Indonesia dengan *non-cooperation*. Pada bulan April 1924 terbitlah buku "*Gedenkboek*" *Indonesische Vereegining* yang isinya sangat mengejutkan pemerintah Belanda.¹⁵ Muhammad Hatta juga mengatakan bahwa pertunjukan itu dipandang oleh

¹³ Tulisan tersebut terdapat dalam halaman 26-57. Merupakan salinan pidato, "*Doelstelling en Politiek van de Nationale Beweging in Indonesie*" pada perkumpulan Pelajar-Pelajar Indologi di Utrecht, 1930 dan terbit dalam brosur tahun 1931.

¹⁴ Sumber tersebut terdapat di dalam halaman 126-127, kemudian bandingkan esensi isi yang sama dalam tulisan Ali Sastroamidjoyo, *Tonggak-Tonggak di Perjalanan Ku*, hlm. 43-44.

¹⁵ Sumber tersebut masih dalam buku "*Memoir Hatta*", masing-masing terdapat dalam halaman 146 dan halaman 156-158.

Perhimpunan Indonesia sebagai pembuka jalan untuk melaksanakan kemudahan propaganda politik supaya “dunia luar” mengetahui adanya Indonesia yang menuntut Merdeka.¹⁶ Halaman berikutnya isi buku ini juga membahas tentang pidato Muhammad Hatta mengenai “*Ekonomische Wereldbouw en Machtstegensteligen*” dan propaganda Perhimpunan Indonesia di luar negeri.

Kelima; Sumber-sumber yang menjadi pendukung dalam penulisan skripsi ini juga dibantu oleh karangan Ali Sastroamidjoyo, *Tonggak-Tonggak Di Perjalanan Ku*, PT. Kinta, Jakarta, 1974. Buku tersebut menguraikan pendapatnya selama masih menjadi mahasiswa di Den Haag Belanda dalam kurun waktu 1923-1927.

Keenam; *Aku Pemuda Kemarin Di Hari Esok*, oleh Drs. A. Zainoel Ihsan, dan Pitut Soeharto, diterbitkan oleh Jayasakti, Jakarta, 1981. Isi buku ini adalah kumpulan tulisan asli, lezing, pidato tokoh-tokoh Pergerakan Kebangsaan tahun 1913-1938.

Ketujuh; *Belunggu Ganas*, oleh Drs. A. Zainoel Ihsan dan Pitut Soeharto, Jayasakti, Jakarta, 1982. Isi Buku ini adalah kumpulan asli tulisan dan peraturan perundang-undangan yang membatasi kebebasan bergerak anak jajahan untuk memperjuangkan cita-citanya mencapai kemerdekaan.

Kedelapan; buku tulisan Mr. J.E.W. Duijs, berjudul *Membela Mahasiswa Indonesia di Depan Pengadilan Belanda*, diterbitkan PT. Bina Aksara, Jakarta, tahun 1985. Isi Buku tersebut sangat membantu penulisan skripsi ini karena

¹⁶ *Ibid*, hlm.174.

berkaitan dengan pembahasan pada bab III dan bab IV yakni kegiatan politik Perhimpunan Indonesia dan sumbangan Perhimpunan Indonesia bagi bangsa Indonesia.

Selain buku-buku tulisan tokoh yang terlibat langsung dalam Perhimpunan Indonesia, peneliti juga menggunakan buku-buku yang ditulis oleh pengarang lain yang mendukung permasalahan penelitian ini, yaitu; John Ingleson, tentang *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*, terbitan PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993. Buku ini banyak membahas latar belakang, tujuan dan perkembangan Perhimpunan Indonesia, karena John Ingleson banyak menggali tentang Perhimpunan Indonesia dari sumber pertamanya (*primer*). Penulis juga menggunakan sumber-sumber lain yang bukan tokoh terkait langsung dengan kegiatan Perhimpunan Indonesia pada waktu itu, diantaranya adalah: tulisan A.K. Pringgodigdo tentang *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka Rakyat, Jakarta, 1960, Ruben Nalenan tentang *Iskaq Tjokrohardisudjo Alumni Desa Bersemanga Banteng*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1982, D.M.G. Koch, terjemahan Abdoel Moeis, *Menuju Kemerdekaan Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia Sampai 1942*, Yayasan Pembangunan, Jakarta, 1951, dan tulisan lainnya yang belum dimasukkan dalam tinjauan pustaka ini, tetapi digunakan penulis untuk mendukung penulisan skripsi ini.

F. Landasan Teori

Skripsi ini berjudul *Sejarah Perkembangan Perhimpunan Indonesia (Tahun 1925-1928)*. Untuk dapat menjelaskan lebih mendalam tentang

permasalahan dan ruang lingkup penelitian ini, maka dibutuhkan uraian dari beberapa konsep supaya bisa menjelaskan dan menguraikan permasalahan penelitian skripsi ini. Kerangka konsepnya adalah mulai dari pengertian sejarah, pergerakan dan nasionalisme.

Penulisan ini tidak lepas dari sejarah. Sedangkan pengertian sejarah adalah rekonstruksi masa lalu.¹⁷ Menjadi rekonstruksi sejarah ialah apa yang sudah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh seseorang. Sejarahwan bisa menulis apa saja, asal memenuhi syarat untuk disebut sejarah. Syaratnya sudah barang tentu peristiwa sejarah, ruang dan waktu (*the spacial and time*). Kaitannya dengan topik dan juga permasalahan penelitian skripsi ini sangat relevan untuk dilakukan penelitian sejarah karena sudah memenuhi syarat pengertian sejarah.

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka pengertian pergerakan perlu dijelaskan. Pergerakan adalah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, untuk menyingkirkan penjajah, yang bersifat “pergerakan” artinya yang berbentuk “organisasi” yang teratur.¹⁸ Menurut Suhartono, kata “pergerakan” mencakup semua macam aksi yang dilakukan dengan organisasi modern ke arah kemerdekaan Indonesia. Aksi tersebut tidak terbatas pada aksi politik saja, tetapi juga menyangkut aksi-aksi lainnya. Secara *spacial* atau tempat, aksi tidak hanya

¹⁷ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994, hlm. 17. Ia menambahkan bahwa membangun masa lalu tersebut jangan memandangnya untuk kepentingan masa lalu itu sendiri, itu antikuarianisme dan bukan sejarah. Juga jangan membayangkan masa lalu yang jauh.

¹⁸ Susanto Tirto Prodjo, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Jambatan, Jakarta, 1989, hlm.7.

terbatas di Jawa saja tetapi juga meliputi aksi-aksi yang terjadi di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan kepulauan Indonesia lainnya.¹⁹

Jika melihat pengertian “Pergerakan” di atas maka topik dan pembahasan dalam permasalahan skripsi ini telah memenuhi syarat penulisan. Karena pergerakan Indonesia mulai dari embrio ke daerahan menuju ke nasional. Hal tersebut dialami hampir seluruh masyarakat Indonesia di Nusantara, maka dikatakan pergerakan karena berdasarkan pengalaman sejarah yang sama dan rasa senasip sepenanggungan. Perkembangan “pergerakan” tersebut telah diorganisir dengan organisasi modern, seperti Perhimpunan Indonesia.

Maka dari itu “pergerakan nasional” Indonesia didorong oleh sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme ini mendorong terjadinya pergerakan nasional Indonesia. Sehingga perlu dijelaskan pengertian nasionalisme dari beberapa ahli, karena para ahli memiliki pengertian yang berbeda sesuai dengan latar belakang penulis, gaya bahasa (*language style*), jiwa zaman, dan juga tujuan penulisan tersebut. Menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan.²⁰ Sedangkan menurut Ernest Renan, nasionalisme adalah paham sekelompok orang yang mempunyai keinginan bersama untuk bersatu dan mempertahankan persatuan.²¹ Kemudian menurut T.L.Sargent, nasionalisme adalah paham atau cara yang didalamnya individu-

¹⁹ Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hlm. 4.

²⁰ Hans Kohn, *Nasionalisme Arti Dan Sejarahnya* (terjemahan), PT. Pembangunan, Jakarta, 1961, hlm. 11.

²¹ Ernest Renan, *Apakah Bangsa Itu? EQU'est Ce qu'une Nation?* Alih bahasa Sunario, Bandung Alumni, Bandung, 1994, hlm. 53-54.

individu mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok.²² Dan yang terakhir menurut C.B. Chafer, nasionalisme adalah cinta kepada tanah air, bahasa, ras atau sejarah budaya bersama²³.

Jika memahami pendapat dan uraian dari para ahli tentang nasionalisme, jelas bahwa mereka hanya menjelaskan buah pikiran mereka sendiri karena respon terhadap peristiwa nyata yang terjadi dalam lingkup sekitarnya bahkan negaranya. Masing-masing ahli mengemukakan pendapatnya sendiri, tetapi L.L.D.W. Friedmann mencoba menyimpulkan semuanya dengan berpendapat bahwa semua memiliki kemiripan seperti kesamaan bangsa, bahasa, daerah, agama, kepentingan ekonomi, atau persamaan tradisi.²⁴

Semua pendapat di atas yang relevan dengan penelitian skripsi ini adalah pendapat Ernest Renan. Ia menjelaskan bahwa keinginan utama dengan sikap bersama-sama dalam satu wilayah untuk bersatu walaupun berbeda bahasa, budaya dan lain sebagainya, telah mencerminkan pembahasan penelitian skripsi ini. Ahmad Subardjo juga mengatakan bahwa memang tepat rumusan Ernest Renan, dengan singkat menjawab pertanyaan; "*Quest ce qu'une nation?*" atau apakah Nation? "*C'est le desir d'être ensemble*" atau kemauan untuk hidup

²² Tower Lyman Sargent, *Ideologi Politik Kontemporer* (terjemahan), Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 26.

²³ C. Bayd Chafer. *Nationalism Myth And Reality* (terjemahan), A. Harverst Book Harcourt, Brace and World, Inc, New York, 1995, hlm. 6. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa nasionalisme menjadi suatu konsep yang kompleks dan selalu berubah. Sekelompok masyarakat yang disatukan dalam perasaan, mempunyai pengalaman historis umum yang nyata. Penyatuan perasaan itu terungkap dalam kesetiaan terhadap agama maupun bentuk pemerintahannya. Semangat ditujukan untuk kemegahan dan ekspansi, dan bukannya untuk kepentingan kelompok sendiri.

²⁴ L.L.D.W. Friedmann, *Politik Dunia* (terjemahan), Sumur Bandung, Bandung, 1961, hlm. 40.

bersama. Hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, meskipun berbeda bahasa, rakyatnya, seperti Belgia (dua bahasa yakni Perancis dan Belanda), Switzerland (tiga bahasa yakni Perancis, Jerman, dan Italia)".

G. Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka dapat ditarik beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. Kalau para anggota *Indische Partij* yang pergi ke negeri Belanda (E.F.D. Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo dan R.M. Suwardi Suryaningrat), kemudian datangnya para mahasiswa baru dari tanah air yang menentang pemerintah Belanda, mempunyai pengaruh terhadap Perhimpunan Indonesia, maka Perhimpunan Indonesia akan merubah tujuan perjuangannya dari organisasi sosial menuju pergerakan politik.
2.
 - a. Kalau para pemimpin Perhimpunan Indonesia yakin akan tujuan politiknya, maka Perhimpunan Indonesia akan membawa masalah Indonesia dan tujuan Indonesia Merdeka ke dalam negeri Belanda dan dunia Internasional.
 - b. Kalau para pemimpin Perhimpunan Indonesia telah meyakinkan tujuan politiknya kepada masyarakat Belanda dan dunia Internasional, maka perhimpunan Indonesia akan mendukung penuh tujuan "Indonesia Merdeka" di Tanah Air.
3. Kalau perjuangan politik Perhimpunan Indonesia berhasil, maka ada sumbangannya terhadap bangsa Indonesia.

H. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²⁵ Sejarah sebagai ilmu memiliki metode-metode ilmiah seperti halnya disiplin ilmu lain. Metode ilmiah dalam penelitian sejarah digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada, sehingga dapat diketahui secara tepat tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Metode sejarah adalah proses pengujian dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dalam menempuh proses itu disebut *historiografi* (penulisan sejarah), dengan menggunakan metode sejarah dan *historiografi*, sejarawan berusaha untuk merekonstruksi sebanyak-banyaknya dari masa lampau manusia.²⁶

Penelitian ini berisi fakta-fakta sejarah, sehingga metode sejarah adalah yang tepat digunakan. Dan metode penulisannya pun bersifat *deskriptif-analisis*. Dalam penelitian sejarah (*the history research*) terdapat lima tahap sebelum melakukan penulisan, adalah: 1) Pemilihan topik, 2)

²⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 7.

²⁶ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (terjemahan), Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 32.

Pengumpulan sumber, 3) *Verifikasi* (kritik sumber/keabsahan sumber), 4) *Interpretasi*: analisis dan sintesis, dan 5) Penulisan (*historiografi*).²⁷

Alasan pemilihan topik tentang *Sejarah Perkembangan Perhimpunan Indonesia (Tahun 1925-1928)*, adalah berdasarkan kemampuan intelektual dan emosional sehingga penulis merasa sanggup mengerjakan skripsi ini. Karena kedekatan intelektual dan emosional sangat penting dalam penulisan penelitian historis.

Setelah menemukan topik yang sesuai, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh oleh penulis adalah mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik dan permasalahan penelitian. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan topik dan permasalahan, maka yang diperlukan adalah metode pengumpulan data yang efektif dan selektif. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (dokumentasi) yaitu pengumpulan data atau sumber dari dokumen yang telah tersedia, baik dalam bentuk buku, majalah, laporan hasil penelitian, artikel, koran, webside data internet, dan sumber-sumber lainnya yang mendukung penelitian skripsi ini. Setelah pengumpulan sumber, maka dilakukan pemilihan sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata, bisa tertulis (dokumen) bisa tidak tertulis (*artifact dan informan*). Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang disampaikan oleh bukan saksi mata, biasanya buku-buku yang ditulis orang yang tidak

²⁷ Kuntowijoyo, *op.cit*, hlm. 89.

menyaksikan.²⁸ Sumber primer yang digunakan adalah buku-buku yang masih berkaitan saksi mata ataupun pelaku yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau catatan asli, seperti tokoh Perhimpunan Indonesia sendiri: Mohammad Hatta, Ali Sastroamidjoyo, Ahmad Subadjo, Arnol Mononutu, Soenario, dan tokoh-tokoh lainnya. Kemudian penulis juga menemukan tulisan asli dari tokoh-tokoh *Indische Partij* seperti Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, Muhammad hatta, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah tulisan atau karangan dari sumber-sumber yang berhubungan dengan topik dan permasalahan penelitian skripsi ini. Sebagai contoh buku karangan: John Ingleson, Mr. J.W.e. Duijs terjemahan K.L.M. Tobing, Sudiyo, Ruben Nalenan, D.M.G. Koch terjemahan Abdoel Moeis, dan penulis lainnya.

Setelah sumber-sumber terkumpul, maka penulis melakukan kritik sumber dalam mencari keabsahan sumber dari data primer maupun sekunder sebagai pembanding. Verifikasi adalah kritik yang dilakukan terhadap sumber yang telah ada: relevan atau tidak. Proses verifikasi ada dua macam, yaitu otentiksitas dan kredibilitas. Otentiksitas ialah berhubungan dengan keaslian sumber data yang biasanya disebut dengan kritik ekstern. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui apakah sumber yang digunakan asli atau tidak terutama berkaitan dengan kertas, tintanya, gaya bahasa dan tulisannya,

²⁸ Diambil dari *Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Sejarah*, Sanata Dharma, Yogyakarta, 2000, hlm.38.

kalimatnya, dan semua tingkat terjaminnya sumber asli. Kemudian dilakukan kritik intern. Kritik intern adalah kritik untuk mengetahui apakah sumber yang telah ada dapat dipercaya atau tidak.²⁹

Dalam penelitian historis ini, buku seperti karangan Muhammad Hatta, Ali Satroamidjoyo, Ahmad Subardjo, dkk. Bisa terjamin otentitas dan kredibilitasnya. Alasannya selain tokoh tersebut terlibat langsung dalam peristiwa Perhimpunan Indonesia, juga tulisan, bentuk kalimat, tahun terbit, penerbit, semuanya asli.

Langkah selanjutnya adalah interpretasi data karena data/sumber telah diuji tingkat otentik dan kredibelnya. Interpretasi sering juga disebut dengan penafsiran. Agar sumber yang telah diuji bisa dideskripsikan dan dianalisis, maka diperlukan penafsiran. Namun, unsur subyektifitas selalu ada dalam penulisan sejarah dalam sudut pandangnya. Maka, Sartono Kartodirdjo mengatakan bahwa unsur subyektifitas dalam penulisan sejarah masa lalu ada, dengan dipengaruhi unsur-unsur lingkungan fisik, biologis, ekonomis, sosial-politik, religius, dan pandangan hidup, sedikit banyak dapat mempengaruhi sesuai dengan “kacamata” atau “selera” subjek” yang melingkupinya.³⁰

Langkah terakhir dan langkah penting dalam penelitian historis adalah penulisan sejarah (*historiografi*). Didalam penulisan sejarah harus memperhatikan aspek kronologis penulisan. Aspek ini penting karena di

²⁹ Kuntowijoyo, *op.cit.* hlm.99.

³⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 62-63.

dalamnya termuat ruang dan waktu (*the spacial and times*). Maka, dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan model deskriptif-analisis dan sistematis. Hal tersebut bisa terlihat dari judul Sejarah Perkembangan Perhimpunan Indonesia (Tahun 1925-1928).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah dan politik. Pendekatan sejarah digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peristiwa-peristiwa yang terjadi selama perkembangan Perhimpunan Indonesia dari tahun 1925 sampai 1928. Sehubungan dengan itu, Sartono Kartodirdjo mengatakan bahwa yang sangat esensial dari perspektif historis ialah pandangan yang mampu mengungkapkan fakta bahwa situasi masa kini adalah produk dari perkembangan masa lampau. Supaya fakta tidak hilang dari ingatan, maka perlu penstrukturasi berdasarkan perspektif sejarah.³¹

Sedangkan pendekatan politik digunakan untuk menjelaskan dan menganalisa pertentangan antara penguasa dengan yang dikuasai. Maksudnya, pendekatan politik akan menjelaskan kegiatan politik Perhimpunan Indonesia selama tahun 1908-1930-an. Diketahui bahwa kegiatan politik Perhimpunan Indonesia menunjukkan keinginan untuk memaksakan tujuan politik yang mereka anut agar diikuti oleh penguasa (kolonial Hindia Belanda). Karena itu, menurut Sartono Kartodirdjo bahwa kerangka konseptual politik banyak alat

³¹ *Ibid*, hlm. 35.

analitis untuk menguraikan berbagai unsur politik, aspek politik, kelakuan aktor, nilai-nilai yang melembaga sebagai sistem politik, dan lain sebagainya.³² Sartono Kartodirdjo menambahkan bahwa pendekatan politik menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan, dan lain sebagainya.³³

Sebagai contoh perubahan nama dari *Indische Vereeniging* menjadi *Indonesische Vereeniging*, kemudian lebih nasionalis lagi menjadi Perhimpunan Indonesia dan peranan tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia dalam politik tanah air setelah mereka menyelesaikan studi. Sehingga pendekatan sejarah dan pendekatan politik sangat membantu dalam menjelaskan perubahan arah perjuangan Perhimpunan Indonesia, kegiatan politik Perhimpunan Indonesia baik di negeri Belanda, Eropa maupun Indonesia, sumbangan Perhimpunan Indonesia bagi bangsa Indonesia, karena telah dilatar belakangi sikap nasionalisme seperti yang telah dipaparkan di atas.

Berdasarkan konsep tentang sejarah, pergerakan kebangsaan, dan paham nasionalisme yang terdapat dalam landasan teori, kemudian metode penelitian, pendekatan sejarah dan pendekatan politik, yang telah dijelaskan di atas dapat digunakan untuk menjelaskan sejarah perkembangan Perhimpunan Indonesia tahun 1925-1928.

³² *Ibid*, hlm. 150.

³³ *Ibid*, hlm. 4.



I. Sistematika Penulisan

Judul skripsi ini adalah Sejarah Perkembangan Perhimpunan Indonesia (Tahun 1925-1928), akan dibahas dalam 5 bab yang digambarkan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, sub babnya:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| A. Latar Belakang | B. Batasan dan Rumusan Masalah |
| C. Tujuan Penelitian | D. Manfaat dan Hasil Penelitian |
| E. Tinjauan Pustaka | F. Landasan Teori |
| G. Hipotesis | H. Metode dan Pendekatan Penelitian |
| I. Sistematika Penulisan | |

BAB II Pembahasan pertama tentang Latar Belakang Perjuangan Politik Perhimpunan Indonesia, sub babnya: Peranan Para Pemimpin *Indische Partij*, Ketidakpercayaan Terhadap Pemerintah dan Kesadaran Politik Baru.

BAB III Pembahasan kedua tentang Kegiatan Politik Perhimpunan Indonesia, sub babnya: Kegiatan Politik Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda dan di Negara-Negara Eropa dan Kegiatan Politik Perhimpunan di Indonesia.

BAB IV Pembahasan keempat tentang Sumbangan Perhimpunan Indonesia Bagi Bangsa Indonesia, sub babnya: Kontribusi Perhimpunan Indonesia Bagi Bangsa Indonesia dan Hasil yang Telah Diperoleh Perhimpunan Indonesia selama 5 Tahun (1925-1930).

BAB V Berisi tentang kesimpulan jawaban dari permasalahan.

BAB II

LATAR BELAKANG PERJUANGAN POLITIK PERHIMPUNAN INDONESIA

Pada tahun 1900-an sampai tahun 1930-an di Indonesia telah berdiri organisasi-organisasi pergerakan nasional. Ada Boedi Oetomo (BO) atau Budi Utomo (BU) berdiri tanggal 20 Mei 1908. Sarekat Dagang Islam (1911-1912), Sarekat Islam (1912), Muhammadiyah berdiri tanggal 18 November 1912, *Indische Partij* berdiri tanggal 6 September 1912, dan ISDV (*Indische Social Democratische Vereeniging*) tahun 1914. Seperti halnya pergerakan awal seperti Budi Utomo dan pergerakan lainnya, cukup gencar melawan pemerintahan kolonial, akan tetapi yang perlu di garis bawahi bahwa pergerakan ini ada yang masih bersifat sosial budaya sampai politik. Pergerakan stagnan karena pengawasan pemerintah Belanda sangat ketat terhadap tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat, para mahasiswa Indonesia di tanah air sendiri ataupun di negeri Belanda, hal ini berlangsung sampai tahun 1930. Namun, setelah Perang Dunia I, tokoh-tokoh pergerakan nasional telah berpandangan politik. Hal tersebut bisa terlihat keterlibatan Sneevliet dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Tan Malaka, Semaun dan sebagainya, yang menyingkir dari Indonesia.³⁴

³⁴ Sneevliet adalah seorang suruhan pemerintah kolonial Belanda karena pemerintah khawatir akan kekuatan Islam di bawah Serikat Islam (SI) siap melakukan pergerakan. Maka, Sneevliet ditugaskan untuk memecah konsentrasi SI. Caranya, pada bulan Mei 1914 H.J.F.M Sneevliet mendirikan ISDV (*Indische Democratische Vereeniging*) dan dibantu oleh J.A. Brandstender, H.W. Dekker dan Bergsma. Pengaruh Sneevliet cukup besar dengan ajaran komunis Marxismenya. Ia berhasil membawa tokoh SI seperti Tan Malak, Semaun, Darsono, Tan M Alimin, Prawirodirdjo, dll, kedalam ISDV.

Jika di Indonesia telah berdiri organisasi-organisasi sosial-politik seperti disebutkan di atas, maka sekitar tahun yang sama dengan Budi Utomo (1908) di negeri Belanda berdiri perkumpulan *Indische Vereeniging*. *Indische Vereeniging* didirikan pada tanggal 15 November 1908 dengan ketu Sutan Casyangan Soripoda, sekretaris merangkap bendahara ialah Sumitro Kolopaking. Kemudian dibentuk panitia penyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yakni Sutan Casyangan, Sumitro Kolopaking, Sosrokartono, dan Husein Djajadiningrat. Tujuan *Indische Vereeniging* didirikan sesuai dengan *statuten* (Anggaran Dasar) *Indische Vereeniging* pada pasal 2 yang berbunyi: “*het berorderen der gemeenschappelijke belangen der Indiers is Nederland en het houden van voeling met Nederlandsch Indie*” atau “menjalankan kepentingan-kepentingan bersama-sama dari ‘Indiers’ di negeri Belanda dan mengadakan hubungan dengan ‘Hindia Belanda’”.³⁵ *Statuten Indische Vereeniging* tersebut dibuat hanya untuk mengurus kepentingan bersama bagi “Indiers” dan mengadakan hubungan dengan “Nederlandsch Indie”. Jadi, memang secara jelas dituliskan bahwa tujuan *Indische Vereeniging* hanya untuk menunjang kepentingan balajar saja.

Kronologis pergantian pengurus dari *Indische Vereeniging* sampai Perhimpunan Indonesia adalah sebagai berikut:

Perpecahan terjadi di tahun 1920, ISDV diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKI), ia juga bergerak didalam Komunis Tionghok karena pemerintah tahu latar belakangnya bekas anggota SDAP (*Social Democratische Arbeiders Partij*) atau Partai Buruh Sosial Demokratis.

³⁵ Soenario, *Perhimpunan Indonesia dan Peranannya dalam Perjuangan Kemerdekaan Kita*, Paper dalam Seminar Sejarah Nasional II tahun 1970 di Yogyakarta, 1970, hlm.3.

- 1908-1914 : *Indische Vereeniging* (Perkumpulan Hindia) diketuai oleh Sutan Casyangan Soripoda
- 1914-1917 : *Indische Vereeniging* diketuai oleh Noto Suroto
- 1917-1919 : *Indische Vereeniging* masuk dalam *Verbond* semacam federasi. Ketua *Indische Vereeniging* adalah dua orang, yaitu; ketua: R.M. Suwardi Suryaningrat, wakil ketua: Dr. Gunawan Mangunkusuma, karena *Verbond* terlalu banyak perbedaan disebabkan adanya kepentingan masing-masing, maka sulit untuk bersatu. Sehingga pada tahun 1925 *Verbond* dibubarkan.
- 1919-1921 : Nama perhimpunan masih *Indische Vereeniging* dengan ketuanya Ahmad Soabardjo.
- 1921-1922 : Perhimpunan diketuai oleh Dr. Soetomo. Pada tahun 1922 *Indische Vereeniging* berganti nama menjadi *Indonesische Vereeniging*.
- 1922-1923 : Perhimpunan diketuai oleh Herman Kartowisastro.
- 1923-1924 : Perhimpunan diketuai oleh Iwa Kusuma Sumantri.
- 1924-1925 : Perhimpunan diketuai oleh Nazir Datuk Pamuntjak.
- 1925-1926 : Perhimpunan ini diketuai oleh Dr. Sukiman Wirjosandjojo. Pada masa ini nama perhimpunan diganti kedalam bahasa Indonesia, yaitu menjadi Perhimpunan Indonesia dan selanjutnya tidak lagi diucapkan dalam bahasa Belanda. Hal tersebut mulai dipakai sejak tahun 1925 dan ketuanya masih dipegang oleh Dr. Sukiman.
- 1926-1930 : Perhimpunan Indonesia diketuai oleh Muhammad Hatta.

Di bawah ini merupakan nama-nama pengurus Perhimpunan Indonesia selengkapnya adalah sebagai berikut:

Masa kepengurusan Herman Kartowisastro:

Katua : Herman Kartowisastro
Sekretaris : Suwarno
Bendahara : Muhammad Hatta
Archivaris : Darmawan Mangunkusumo

Masa kepengurusan Nazir Datuk Pamuntjak:

Katua : Nazir Datuk Pamuntjak
Sekretaris : A.A. Maramis
Bendahara : R. Suwarno
Komisaris : Sukiman
Archivaris : Mohammad Nasif

Masa kepengurusan Wirjosandjojo:

Ketua : Sukiman Wirjosandjojo
Wakil ketua : A.I.Z. Mononutu
Sekretaris I : Dr. Darsono
Sekretaris II : Sunario
Bendahara : Mohammad Hatta
Komisaris : Amir, Budiarto dan Mohammad Jusuf.³⁶

³⁶ Ruben Nalenan, *Arnold Mononutu Potret Seorang Patriot*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 47-50.

Perubahan susunan pengurus tersebut di atas telah terjadi tiga kali perubahan nama perhimpunan, yakni *Indische Vereeniging*, *Indonesische Vereeniging* dan Perhimpunan Indonesia. Semula hanya bertujuan sosial budaya sampai akhirnya ke arah politik yang lebih radikal dan revolusioner. Jika diperhatikan dari susunan pengurus sampai perubahan nama perhimpunan, maka telah terdapat embrio politik untuk tujuan yang lebih jelas yakni menuju kemerdekaan dari kolonial Hindia Belanda. Perubahan bentuk perlawanan dari yang bersifat sosial budaya, perkumpulan studi belajar biasa, tempat berkumpul, tempat berdialog tentang Tanah Air, dan sampai tujuan politik, semuanya dilatar belakangi beberapa peristiwa penting yang terjadi di Tanah Air. Hal tersebut merupakan awal dari perkembangan Perhimpunan Indonesia menuju peranan yang lebih sukses dan mengagungkan bagi bangsa Indonesia.

A. Peranan Para Pemimpin *Indische Partij*

Indische Partij berdiri tanggal 6 September 1912. *Indische Partij* didirikan oleh E.F.E.D. Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo dan R.M.Suwardi Suryaningrat, ketiga tokoh ini kemudian dikenal dengan sebutan tiga serangkai. *Indische Partij* merupakan sebuah organisasi yang benar-benar beraktivitas dalam politik. Tujuan politiknya sangat jelas yakni mempersatukan seluruh bangsa India. Artinya siapa saja yang mau mengikuti dasar pergerakan tersebut diperbolehkan. Sasaran politiknya jelas yakni untuk mencapai India merdeka. Sikap para pemimpin *Indische Partij* sangat berani, agresif, antipatif, dan *non cooperation* terhadap pemerintahan kolonial. Alasannya yang pertama adalah golongan Indonesia

kehilangan peranannya yang berarti dalam politik, sosial dan ekonomi, kedua; golongan Indo-Eropa merasa dianaktirikan oleh masyarakat dan pemerintah Belanda dan merasa terjepit dalam pergaulan sosial, politik dan ekonomi.³⁷

Para pemimpin *Indische Partij* tersebut sangat tegas dan berani menentang pemerintah kolonial, seperti mengajukan permohonan kepada pemerintah agar partainya diakui menjadi badan hukum, akan tetapi pemerintah menolaknya bahkan menganggap partai ini sangat berbahaya bagi pemerintah. Tjipto Mangunkusumo dan kawan-kawannya sangat paham tentang sejarah kemerdekaan Nederland dari kekuasaan bangsa Perancis (pemerintahan Napoleon I). Atas prakarsa Tjipto Mangunkusumo yang berkerjasama dengan R.M. Suwardi Suryaningrat, Abdoel Muis, A.H. Wignjadisastro, dan beberapa tokoh lainnya, membentuk sebuah organisasi kecil yang pada bulan Juli 1913, yang bernama; *Comite tot Herdenking van Nederlands Honderdjarige Vrijheid* (Komite Perayaan Seratus Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda) atau komite bumi poetra untuk menanggapi peringatan hari kemerdekaan Nederland. Mereka menulis artikel di harian *Express* (milik E.F.E. Douwes Dekker) dengan tulisan pertama oleh R.M. Suwardi Suryaningrat dengan judul "*Als Ik Eens Nederlander Was.....*" atau "Seandainya.....", sebagai isinya adalah sebagai berikut:

".....seandainya saya orang Belanda; karena saya kira saya akan berani berbuat sapa saja. Ah, tidak juga! Seandainya saya orang Belanda, belum tentu saya berani berbuat segala-galanya. Memang, saya akan berharap agar pesta pora hari kemerdekaan itu diselenggarakan semeriah mungkin,

³⁷ G. Moadjanto, *Indonesia Abad Ke-20: Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 33.

akan tetapi saya tidak ingin kaum pribumi di daerah-daerah ini turut serta dalam perayaan H.U.T tersebut, akan saya larang mereka turut bersuka cita dalam perayaan-perayaan itu, bahkan tempat berpesta-pora ingin ku pagari, agar orang-orang pribumi tidak dapat melihat sedikit pun kegembiraan kami yang meluap-luap dalam memperingati hari kemerdekaan kami itu”.³⁸

Pemerintah sangat marah setelah mengetahui tulisan tersebut karena menyindir kesewenang-wenangan terhadap rakyat Indonesia. Sehingga pemerintah mengharuskan dilakukan penggeladahan dengan paksa kepada tempat dilangsungkannya komite tersebut dan akhirnya para tokoh komite diadili. Mengetahui tindakan pemerintah kolonial seperti itu, maka Cipto Mangunkusumo menulis artikel dengan judul “*Kracht of Vrees?*” atau “Kekhawatiran”, penggalan isinya adalah sebagai berikut:

“Apakah itu merupakan bentuk suatu kekuatan yang hendak dipertunjukan melalui penyitaan tersebut. Oh, kasihan! Apakah mereka mengira bahwa kita akan berbuat putus asa oleh karena kita harus menghadapi kekuatan yang melebihi kekuatan kita? Justru disitu kami merasakan suatu yang mendorong kami untuk menentang kekuatan tadi,.... Semakin kuat aksi mereka, semakin kuat pula tenaga kami akan berkembang. Apakah rasa takut yang mendorong orang-orang itu untuk menghancurkan pengaruh kita? Bila benar demikian, maka penyitaan itu merupakan suatu kehormatan terhadap sekretaris kami. Disitu terbukti bahwa “het Schotschrift van het warhoofd R.M. Soewardi Soerjaningrat”.³⁹

Kemudian Douwes Dekker menulis juga keceman kepada pemerintahan kolonial Hindia setelah mengetahui teman-temannya diadili kejaksaan. Dekker

³⁸ A. Zainul Ihsan dan Pitut Soeharto, *Belenggu Ganas*, Jayasakti, Jakarta, 1981, hlm. 20-21. Sumber tulisan diambil dari aslinya dengan sumber De brochure “*Als ik Eens Nederlander Was....*” (Comite Boemi Poetra) *Onze Verbanding, Uitgave “De Indier”*, Adm.: Drukkeij “De Teekomst” Schiedam, 1913, hlm. 67.

³⁹ *Ibid*, hlm. 27-28.

mengetahui bahwa Suwardi dan Cipto telah melakukan kritik pedas kepada pemerintah. Judul tulisan Douwes Dekker adalah “*Onze Helden; Tjipto Mangoenkoesoemo En Soewardi Soejaningrat*” atau “Berjasa” atau “Pahlawan Kita Dr. Cipto Mangunkusumo dan R.M. Suwardi Suryaningrat”, kutipan isinya adalah sebagai berikut:

“Selama pemerintah tidak mau menjelaskan kepada kita kejahatan-kejahatan apa yang telah dilakukan oleh pahlawan dalam barisan Oranje-Nassau, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan oleh seorang keturunan raja R.M. Soewardi Soejaningrat, kami berpikir bahwa kami merasa iri hati dan ingin turut menikmati dengan dengan para tahanan yang baik budi itu kepuasan yang mereka dapatkan sekarang. Sebab sekarang kami tetap memandang mereka sebagai orang-orang yang mengorbankan diri demi cita-cita yang agung dan luhur.
.....Rasa cinta tanah air kita dianggap jahat. Kita dihukum bila kita merasa cinta kepada tanah air.....”⁴⁰

Ketiga tokoh *Indische Partij* tersebut sangat berpengaruh, karena Gubernur Jenderal Idenburg takut kepada gagasan “*revolusioner*” mereka.⁴¹ Faktor keberanian mereka inilah, maka Gubernur Jenderal dengan menggunakan hak luar biasa (*exorbitante rechten*)⁴² sebagai dasarnya, oleh sebab itu ketiga tokoh *Indische Partij* ini dijatuhi hukuman. Cipto dibuang ke Banda, Suwardi ke Bangka sedangkan Douwes Dekker dekenai tahanan. Namun, atas keinginan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 34-35.

⁴¹ Robert van Neil, *The Emergence of the Modern Indonesian Alite*, hlm. 63. Terjemahan dalam bahasa Indonesia Ny. Zahara Deliar Noer, *Munculnya Elite Modern Indonesia*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1984, hlm. 71. Juga bisa dibaca dari kutipan John Ingleson, 1993, *ibid*, hlm. 2.

⁴² G. Moedjanto, 1998, *op.cit.*, hlm. 35. Dijelaskan bahwa hak tersebut atas dasar pada pasal 48 RR 1854 *ExorbitanteRechten* (hak atau kekuasaan luar biasa) Gubernur Jenderal adalah:

1. *Externering* : mengusir dari seluruh wilayah Hindia-Belanda
2. *Internering* : menunjuk suatu tempat yang harus di diami oleh seseorang dan tidak boleh meninggalkan tempat itu.
3. *Verbanning* : melarang seseorang untuk berdiam disuatu daerah.

mereka sendiri pemerintah memperbolehkan meninggalkan Tanah Air dan memilih negeri Belanda untuk menambah pengetahuan. Ternyata para tokoh *Indische Partij* yang meninggalkan Tanah Air, di negeri Belanda bisa menyalurkan cita-cita idealisme mereka. Maka, pada tahun 1913 dengan cepat tiga tokoh *Indische Partij* bergabung dengan *Indische Vereeniging*. Kehadiran mereka banyak membawa perubahan karena memiliki latar belakang pengalaman yang kuat ketika masih di Tanah Air.

Perhimpunan Hindia merupakan sebuah forum pertemuan orang-orang termasuk para pelajar Indonesia yang studi di negeri Belanda. Singkatnya forum tersebut hanya bersifat sosial non politik. Orang-orang Indonesia di negeri Belanda merupakan orang pelarian, buangan, maupun para mahasiswa. *Indische Vereeniging* kemudian meluaskan pandangannya kepada persoalan Tanah Air.

Organisasi tersebut memasuki bidang politik dalam hubungannya dengan perkembangan di Tanah Air ketika tambah banyaknya pelajar nasionalis yang melanjutkan studinya di negeri Belanda, yaitu mereka yang berada di Indonesia sebelumnya telah bergerak dalam *Jong Java* (Jawa Muda), *Jong Sumatranen* dan Budi Utomo.⁴³ Bersama dengan hal tersebut, konsep “Hindia bebas dari Belanda” (*Indie los van Nederland*) dan pembentukan sebuah negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri, mempengaruhi tujuan politik *Indische Vereeniging*.⁴⁴ Semakin jelas lagi tujuan politik *Indische Vereeniging* setelah

⁴³ Deliar Noer, *Mohammad Hatta. Biografi Politik*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 5.

⁴⁴ John Ingleson, *op.cit*, hlm. 2.

pengaruh mantan tokoh *Indische Partij* yakni pada tahun 1916 jurnal *Indische Vereeniging* “Hindia Poetera” diterbitkan oleh Soewardi. Kemudian beberapa tokoh *Indische Vereeniging* bergabung dalam pemilihan untuk Majelis Rendah Parlement Belanda mewakili golongan sosialis.⁴⁵

Kegiatan *Indische Vereeniging* dalam bidang politik tidak bisa dihindari lagi setelah kedatangan para tokoh *Indische Partij*. Hal tersebut dapat dilihat dengan keterlibatan para tokoh *Indiesche Vereeniging* yang merupakan formulasi dari tokoh-tokoh *Indische Partij* dalam mengikuti berbagai event penting di negeri Belanda sendiri, Eropa, dengan organisasi Asia, bahkan dengan tanah air.

B. Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah

November Beloften merupakan sebutan politik ketika sidang *volksraad* di Batavia yang dilaksanakan pada bulan November. Pada sambutan acara pembukaan sidang *volksraad* (Dewan Rakyat) di Batavia terjadi janji-janji kosong kolonial yang diwarnai oleh politik yang diskriminatif bahkan tidak ada sama sekali realisasinya. Mengapa demikian? *November Beloften* (Janji November) ketika dibacakan oleh Gubernur Hindia Belanda Mr.J.P. Graaf van Limburg Stirum dimuka sidang *volksraad* pada tanggal 18 November 1918, berisi perbaikan sistem *erfpacht* (tanah waris), *landrente*(sewa tanah), *berendienst*, dan *poenale sanctie* (sangsi hukuman). Limburg mengatakan bahwa *volksraad* merupakan wakil rakyat seluruh Hindia Belanda dan akan memberikan perbaikan-perbaikan kepada penduduk bumi putera. Inti dari pada janji tersebut adalah

⁴⁵ *Idem.*

memberikan harapan kepada rakyat bumi putera akan haknya memimpin negerinya sendiri, atau dikatakan Hatta semacam *gospel* modernnya presiden Wilson bahwa suatu bangsa berhak memimpin bangsa dan negaranya sendiri.⁴⁶ Pemerintah kolonial memberikan kesempatan besar kepada orang-orang Indonesia untuk tempat bersuara dalam masalah pemerintahan dan demokrasi. Namun kenyataannya yang ditonjolkan ialah bukan unsur “*volk*” (rakyat) melainkan “*raad*” (*advics* atau nasehat).⁴⁷ Janji tersebut memang menempatkan wakil-wakil dari rakyat dalam parlemen, namun tidak pernah merealisasikan kebebasan penuh kepada bumi putera untuk merdeka karena dinilai oleh Gubernur Jenderal terlalu memanjakan dan bersikap baik kepada penduduk bumi putera. Maka, tahun 1921 Gubernur Jenderal Limburg Stirum digantikan oleh Mr.D.Fock dengan masa kepemimpinannya tahun 1921-1926.

Kekecewaan Indonesia timbul ketika pada tahun 1922 ditolaknya reformasi konstitusi. Kemudian pada tahun 1925 ditolak lagi pasal-pasal yang memungkinkan rakyat Indonesia menjadi mayoritas dalam Dewan Rakyat oleh *States General* (Dewan Perwakilan Umum).

Ternyata pergantian pemimpin tersebut tidak membawa perbaikan bagi Hindia Belanda, akan tetapi banyak terjadi pertentangan sehingga semakin membuat pemerintah khawatir. Pada pemerintahan D. Fock saja telah terjadi

⁴⁶ Mohammad Hatta, *Berpartisipasi Dalam Perjuangan Kemerdekaan Nasional Indonesia*. Pidato pada bulan Agustus 1974 pada *Konferensi Internasional Association of Historian of Asia in Yogyakarta*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1976, hlm. 7.

⁴⁷ Ali Sastroamidjyo, *op.cit*, hlm. 17.

pemogokan yang dilancarkan oleh Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia dan dengan sarakat-sarakat buruh yang ada dibawah organisasi kedua partai tersebut. Peristiwa pemogokan ini terjadi pembuangan tokoh-tokoh yang dianggap berbahaya mengancam stabilitas kolonial Hindia Belanda. Tokoh-tokoh tersebut dibuang ke luar negeri seperti Belanda dengan jaminan bebas dari pemerintah kolonial maupun masuk ke dalam penjara atau tahanan seperti di Digul.

Peristiwa di tanah air selalu diketahui dengan baik oleh para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia berpendapat bahwa siapa pun yang memimpin tidak masalah asal memihak kepada rakyat Indonesia. Namun yang terjadi adalah sebaliknya karena pemerintah yang berkuasa, penjajahan politik, perampasan ekonomi, pengkerdilan budaya, dan hancurnya sistem sosial masyarakat.⁴⁸ Para tokoh Perhimpunan Indonesia berargumen bahwa kekuasaan Belanda dikarenakan Indonesia merupakan sumber ekonomi yang vital, sehingga Belanda tidak begitu saja memberikan kemerdekaan. Aksi massa merupakan pilihan sampai akhirnya terjadi sikap kekerasan kepada pemerintah. Oleh sebab itu menolak semua bentuk kerjasama dengan pihak pemerintah Belanda.

C. Kesadaran Politik Baru

Sebut saja periode pertama tahun 1908-1922 merupakan awal tumbuhnya kesadaran politik Indonesia. Keberadaan politik tumbuh dikalangan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda yang tergabung dalam *Indische Vereeniging*.

⁴⁸ John Ingleson, *op.cit*, hlm. 20.

Indische Vereeniging sebagai tempat berkumpul para mahasiswa masih sebatas pembicaraan masalah politik, sosial dan idealisme-idealisme tentang tanah air.

Sesuai dengan politik etis (politik etika) yang dilaksanakan di tanah air, maka membuka kesempatan para pelajar Indonesia untuk belajar lebih tinggi lagi bahkan sampai keperguruan tinggi di luar negeri.⁴⁹ Hal tersebut berdampak positif bagi dunia pendidikan ketika itu dan berdampak baik pula bagi mahasiswa Indonesia yang mau belajar di negeri Belanda. Di Nederland mereka bergabung dengan para mahasiswa lainnya untuk belajar bahkan berorganisasi.

Angkatan baru mahasiswa yang datang tahun 1920-an diantaranya Sutomo, Ali Sastroamidjoyo, Budiarto, Muhammad Hatta, Sartono K, Iwa Kusumasumantri, Iskaq Mononutu, dan lain sebagainya. Kedatangan mahasiswa baru tersebut membawa perubahan pada kesadaran politik mahasiswa di negeri Belanda. Para mahasiswa ini mulai bergabung dengan *Indische Vereeniging* dan melanjutkan tujuan politik, idealisme-idealisme yang telah digagas pendiri sebelumnya. Jika diperhatikan ternyata para mahasiswa tersebut telah memiliki latar belakang organisasi dan pengalaman politik seketika masih di tanah air.⁵⁰

Pada akhir tahun 1922 perubahan sikap tentang cita-cita dan idealisme pada mahasiswa angkatan baru tersebut mulai bersifat politik aktif. Dimulai pada masa kepemimpinan Herman Kartowisastro (1921-1922) melalui rapat umum

⁴⁹ Program politik etika atau politik balas budi dikenal dengan *Trias Politica van Deventer*; 1) Irigasi, 2) Emigrasi (transmigrasi) dan Edukasi. Politik etika disampaikan C.Th.van Deventer berjudul "*Een Eereschuld*" atau "*Debt of Honour*", kemudian ditanggapi oleh Ratu Wilhelmina (1890-1948) tahun 1909. Akan tetapi tetap berhaluan *kolonialistis-imperealistis*.

⁵⁰ Hatta bergabung dalam *Jong Sumateranen Bond*, Sutomo dalam Budi Utomo dan yang lainnya dalam *Jong Java*, lembaga pendidikan Belanda, dan lain-lainnya.

pada bulan Januari nama *Indische Vereeniging* tidak dipakai lagi dan diganti dengan *Indonesische Vereeniging*. Kata “*Indische*” diganti “*Indonesische*”.⁵¹ Kesadaran politik para tokoh Perhimpunan Indonesia mulai kelihatan walaupun masih menggunakan identitas kolonial Belanda seperti bahasa dan lain sebagainya.

Pada masa kepemimpinan Iwa Kusumasumantri (1922-1923) pergerakan semakin radikal terhadap pemerintah. Dalam pidato setelah terpilihnya Iwa Kusumasumantri sebagai ketua *Indonsische Vereeniging*, ia menekankan agar para mahasiswa Indonesia tetap mengikuti perkembangan situasi politik di tanah air dan menjalankan tiga asas pokok: pertama, Indonesia ingin menentukan nasib sendiri; kedua, agar dapat menentukan nasib sendiri, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri; ketiga, dengan tujuan melawan Belanda, bangsa Indonesia harus bersatu. Supaya bangsa Indonesia semakin mudah merealisasikan ketiga sasaran pokok tersebut, maka semua kelompok Indonesia bersatu dalam perjuangan bersama melawan Belanda. Kutipan pidato beliau adalah sebagai berikut:

“Masa depan bangsa Indonesia semata-mata dan hanya terletak dalam kelembagaan dari bentuk pemerintahan yang bertanggungjawab kepada rakyat dalam artian yang sebenarnya, karena hanya bentuk pemerintahan semacam itu yang dapat diterima oleh mereka.

Untuk tujuan tersebut setiap orang Indonesia harus berjuang sekuat tenaga, dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri dan bebas dari “bantuan” asing. Setiap penyelewengan dari kekuatan Indonesia, dalam bentuk apapun, amat dicela, karena hanya kerjasama paling kuat dari

⁵¹ Ahmad Soebardjo, *Kesadaran Nasional, Otobiografi*, Gunung Agung, Jakarta, 1978, hlm. 117.

putra-putri Indonesia yang dapat membawa pencapaian tujuan bersama itu”.⁵²

Sikap pergerakan yang lebih mencerminkan tentang Indonesia dan bukan bagian Hindia Belanda ditujukan pula dengan perubahan jurnal *Hindia Poetera* diganti namanya menjadi “Indonesia Merdeka” pada bulan Maret 1924. Ternyata pengetahuan para mahasiswa Indonesia tentang sejarah Nederland bekas kekuasaan Spanyol sangat baik, karena dasar perubahan setiap tujuan, cita-cita dan idealisme pergerakan berdasar pada persamaan sejarah bangsa Belanda dengan penduduk bumi putera di Hindia Belanda. Pergantian nama jurnal tersebut semakin memberi pemahaman tentang tuntutan yang sama dengan Hindia Belanda lepas dari Nederland dan memperoleh kemerdekaan sendiri tanpa ada campur tangan lagi. Penjelasan dikata pengantar jurnal tersebut adalah sebagai berikut:

“Dalam kata “Merdeka” terkandung ungkapan tentang tujuan dan usaha keras kami, dan mulai sekarang dan seterusnya, “Indonesia Merdeka” akan menjadi semboyan perjuangan Pemuda Indonesia. “Merdeka” adalah cita-cita umum semua umat manusia; setiap bangsa mau mempunyai keinginan kuat untuk hidup merdeka. Gagasan tentang kemerdekaan tidak berbeda dari satu bagian dunia ke dunia lainnya. “Kemerdekaan adalah cita-cita umat manusia dan bukan cita-cita Barat; seluruh bumi ini adalah kuil kemerdekaan”.⁵³

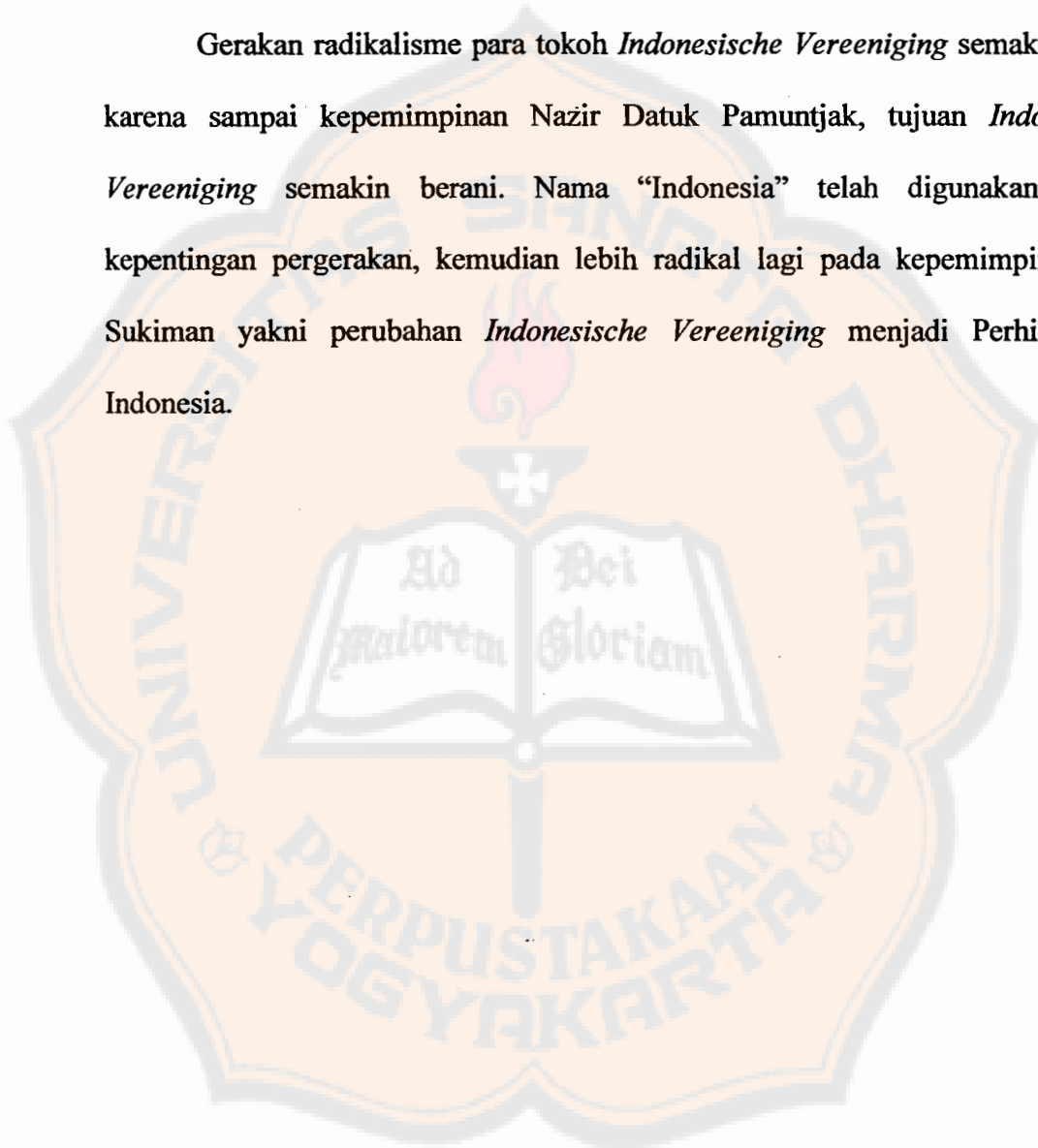
Jadi, generasi para mahasiswa baru angkatan 1919-1925 telah membawa semangat baru bagi pergerakan Perhimpunan Indonesia pada saat itu. Periode pertama (1908-1922) merupakan masa pra kesadaran politik dan periode kedua

⁵² John Ingleson, *op.cit*, hlm. 7.

⁵³ *Ibid*, hlm. 8.

(1922-1925) tersebut mengubah masa belum sadar politik ke arah kesadaran politik baru menuju Indonesia Merdeka dari para anggota Perhimpunan Indonesia.

Gerakan radikalisme para tokoh *Indonesische Vereeniging* semakin aktif, karena sampai kepemimpinan Nazir Datuk Pamuntjak, tujuan *Indonsische Vereeniging* semakin berani. Nama "Indonesia" telah digunakan untuk kepentingan pergerakan, kemudian lebih radikal lagi pada kepemimpinan Dr. Sukiman yakni perubahan *Indonesische Vereeniging* menjadi Perhimpunan Indonesia.



BAB III

KEGIATAN POLITIK PERHIMPUNAN INDONESIA

A. Kegiatan Politik Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda dan di Negara-Negara Eropa

Pada awalnya Perhimpunan Indonesia masih bernama *Indische Vereeniging* yang berdiri tanggal 15 November 1908. Organisasi ini merupakan tempat berkumpulnya para mahasiswa untuk berbagi pengalaman, bertemu, berdialog, dan lain sebagainya, baik tentang tanah air maupun masalah masa depan Indonesia nanti. Perkembangan selanjutnya ialah perubahan nama dari *Indische Vereeniging* menjadi *Indonesische Vereeniging*. Perubahan nama tersebut merupakan perkembangan kesadaran politik para anggota perhimpunan yang sedang mencari-cari identitas dan kepribadian bangsa Indonesia. Perubahan selanjutnya yakni dari *Indonsische Vereeniging* menjadi Perhimpunan Indonesia. Arti perubahan tersebut merupakan inti dari kegiatan politik Perhimpunan Indonesia yang semula dari organisasi sosial-budaya non politik menjadi organisasi politik aktif.

Kegiatan politik Perhimpunan Indonesia bergerak lambat namun berangsur-angsur memiliki tujuan yang pasti. Fokus utama para anggota Perhimpunan Indonesia adalah mencurahkan kegiatan politik mereka di dalam negeri Belanda dan juga di negara-negara Eropa. Tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia yang ada di negara Belanda adalah sebagai berikut: Mohammad Hatta, Ahmad Subardjo, Iwa Kusumasumantri, Arnold Mononutu, Ali Sastroamidjoyo,

Sunario, Moh. Nazif Gatot Tarunamihardjo, Abutari, Supomo, Sastromulyono, Budhiarto, Buntaran, Abdulah, Samsi, Darmawan Mangunkusumo, Moh. Ikhsan, Dahlan, dan Djunaedi.⁵⁴

1. Kegiatan Politik di Negeri Belanda

a. Kegiatan Politik Perhimpunan Indonesia Awal

Pada masa kepemimpinan Dr. Sutomo terjadi perubahan nama perhimpunan yaitu dari *Indische Vereeniging* menjadi *Indonsische Vereeniging*. Perubahan nama perhimpunan tersebut merupakan atas usul Ahmad Subardjo kepada para anggota. Ahmad Subardjo berusaha mencari nama tanah air yang tepat untuk bisa mencerminkan negara kesatuan. Menghilangkan *Nederlandsch Indie* menggantinya dengan *Indonesische*. Ahmad Subardjo mengatakan sebagai berikut:

“.....tujuan kami adalah kemerdekaan Tanah Air, dan istilah Hindia Belanda pada saat tercapainya kemerdekaan, akan hilang pula. Bukan itu saja yang menjadi alasan untuk mencari nama sebutan untuk Tanah Air. Sering kami menghadapi orang Perancis atau orang Jerman atau bangsa Eropa lain menjawab pertanyaannya: “Tuan asal dari mana?” Pernah saya menjawab: “Dari Jawa”. Oh disana ada banyak gula!”⁵⁵

Atas usul Ahmad Subardjo tersebut maka ditemukanlah nama “Indonesia”. Nama “Indonesia” telah dipakai dalam hukum wilayah ada yang meliputi Philipina, Taiwan, Madagaskar, dan pulau-pulau di

⁵⁴ Penjelasan singkat tentang kegiatan Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda bisa dibaca dalam lampiran I halaman 172 dan juga lampiran II halaman 179.

⁵⁵ Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, *Peranan Ide-Ide dalam Gerakan Kemerdekaan Indonesia*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1975, hlm. 23. Kemudian bisa dibaca dalam Ahmad Subardjo, 1978, *op.cit.*, hlm. 119.

Samudera Pasifik sampai ke ‘*Easter-Island*’ (Pulau Pusaka) dekat Chili. Istilah nama “Indonesia” telah digunakan terlebih dahulu oleh dua orang sarjana yakni James Ricardson Logan berkebangsaan Inggris yang ditulis dalam *Journal Indian Archipelago* tahun 1850 atau Jurnal Kepulauan India tahun 1850). Kemudian istilah ‘Indonesia’ dipergunakan oleh Prof. Herr Adolf Bastian, *ethnolog* Jerman dalam bukunya yang berjudul “*Indonesian Oder die Inseln des Malayischen Archipels (1884-1889)* atau Indonesia ada di antara Kepulauan Malayu (1884-1889)”.⁵⁶

Pemakaian nama tersebut digunakan untuk menunjukkan wilayah-wilayah hukum adat yang meliputi Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sebelah Barat Samudera Hindia yang terletak di Madagaskar, terdapat kerajaan Merina yang didirikan oleh orang-orang emigran Indonesia dengan latar belakang adat-istiadat Indonesia. Sedangkan dari sebelah Timur Samudera Pasifik “*Estern Island*” dekat Chili dan di Utara Taiwan terdapat emigran suku Dayak, Boerneo, dengan adat-istiadatnya yang khas.

Sehingga sejak tahun 1922, nama *Indische Vereeniging* diganti dengan *Indonesische Vereeniging* resmi digunakan. Melihat perubahan nama tersebut telah menggambarkan bahwa para mahasiswa yang ada dalam organisasi tersebut telah bergerak dalam bidang politik. Namun, masih terbatas dalam organisasi saja karena masih mencari-cari atau

⁵⁶ Soenario, *op.cit*, hlm. 3.

sebatas mengemukakan ide-ide untuk bisa keluar dari pengawasan pemerintah Belanda.

Secara bertahap perubahan dari *Indische Vereeniging* menjadi *Indonesische Vereeniging* telah memiliki makna politik. Maka, setelah menemukan nama “Indonesia” para anggota *Indische Vereeniging* mencari bahasa untuk digunakan sebagai bahasa kesatuan untuk mempermudah pergerakan politik. Oleh sebab itu lebih tepatnya menggunakan bahasa Indonesia bukan bahasa Belanda. Sehingga sejak tahun 1925 sebutan *Indonesische Vereeniging* telah menggunakan bahasa Indonesia yakni Perhimpunan Indonesia. Perubahan tersebut juga terjadi pada nama majalah “Hindia Poetera” diganti menjadi majalah “Indonesia Merdeka”. Kemudian tentang perkataan “*Inlanders*” (orang pribumi) diganti menjadi “Bumi Putera”.⁵⁷ Lebih jelas lagi sebutan *Indie* diganti India.⁵⁸ Perhimpunan Indonesia juga menggunakan lambang merah putih dengan banteng utuh ditengah. Lambang ini telah ada sejak kepemimpinan Herman Kartowisastro dan digunakan pada kepemimpinan Iwa Kusumasumantri. Sehingga pada masa kepemimpinan Sukiman, nama-nama yang mencirikan Indonesia telah digunakan secara resmi.

⁵⁷ Ali Sastroamidjyo, *op.cit*, hlm. 45. Kata “*Inlanders*” pernah dijelaskan oleh Dr. van Loon untuk menyebut penduduk pribumi. Ia mengatakan tentang “ciri-ciri primitif dari pada *inlanders* itu semua bodoh, otaknya terlalu primitif, tidak mau menerima pendidikan tinggi”. Kata-kata “*inlanders*” diperlunak dengan “*Inheemsche*”, namun dalam kegiatan pergerakan politik Perhimpunan Indonesia tidak digunakan sama sekali.

⁵⁸ Sesuai dengan tujuan Perhimpunan Indonesia, maka kata *Indie* diganti menjadi India karena pernah digunakan kata “*Insulinde*”, maka diganti dengan “Negara India yang Molek”.

Perubahan demi perubahan yang dilakukan Perhimpunan Indonesia bertujuan mencari identitas nasional Indonesia yang pada nantinya sangat ditonjolkan dari pada identitas Belanda yang diharapkan pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepribadian Indonesia yang berbeda dengan orang-orang Belanda dan tidak bisa disamakan. Perhimpunan Indonesia telah membuktikan tentang kepribadian nasional bangsa Indonesia kepada beberapa negara pada saat itu.

Perdebatan itu dimulai ketika ada rapat kelompok nasional yang diselenggarakan oleh "*Academic du droit International de la Haye*" (Akademi Hukum Internasional di Den Haag). Pada saat itu Arnold Mononutu mengikuti kuliah di akademi tersebut. Di akademi itu terdapat perkumpulan mahasiswa yang bernama "*Association de Slaves de L'academic du droit International de la Haye*" atau Perkumpulan Mahasiswa Akademi Hukum Internasional di Den Haag. Sesuai dengan anggaran dasarnya, maka dalam rapat tersebut setiap kelompok nasional hanya boleh mengirimkan anggotanya sebanyak dua orang. Hampir semua anggota organisasi mengirimkan utusan rapat, sedangkan *Indische Vereeniging* hanya bisa mengirimkan Arnold Mononutu.

Saat rapat tersebut berlangsung, terjadi perdebatan yang alot antara kelompok nasional Indonesia yang diwakili oleh Arnold Mononutu dengan kelompok mahasiswa nasional Belanda. Masalah yang menjadi perdebatan adalah tidak bersedianya kelompok mahasiswa Indonesia jika

digabungkan dengan kelompok mahasiswa Belanda. Kelompok mahasiswa Indonesia tidak disebut sebagai kelompok sendiri, melainkan dimasukkan kedalam kelompok mahasiswa yang berasal dari negara Belanda. Hal tersebut terjadi karena ketua asosiasi berasal dari diplomat Polandia, yang jelas tidak mengerti masalah yang diperdebatkan tentang apa dan bagaimana keadaan Indonesia. Ketua sidang dalam meminta keterangan pun hanya kepada Sekretaris Jenderal organisasi yang kebetulan juga orang Belanda. Oleh karena itu, dijelaskan bahwa mahasiswa Indonesia yang menjadi anggota perhimpunan akademi dapat diwakili dan digabungkan dalam kelompok nasional Belanda.⁵⁹

Sebelum Arnold membuat permohonan, dia mengatakan kepada semua anggota organisasi bahwa mahasiswa Indonesia tidak setuju sama sekali masuk dalam kelompok organisasi nasional Belanda. Arnold menjelaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai kepribadian nasional sendiri yang tidak bisa disamakan dengan kepribadian mana pun termasuk kepribadian nasional Belanda.

Penolakan tersebut mendapat tanggapan dari sekjen organisasi dengan mengatakan bahwa secara fisik Indonesia masih dikuasai Belanda. Sehingga tidak bisa kelompok mahasiswa Indonesia mendirikan kelompok sendiri. Namun, Arnold kembali menjawab bahwa walaupun Indonesia masih dijajah Belanda, tetapi bagi orang Indonesia mereka mempunyai

⁵⁹ Ruben Nalanan, *op.cit*, hlm. 56.

satu kepribadian bangsa yang sama sekali berlainan dengan kepribadian bangsa Belanda. Kepribadian nasional suatu bangsa janganlah ingin dihapuskan ataupun dihilangkan oleh pemerintah jajahan.⁶⁰

Terjadi perdebatan lagi ketika Arnold mengajukan permintaan agar ada sebuah tempat dari kelompok nasional mahasiswa Indonesia sendiri yang terlepas dari Belanda. Permintaan untuk berdiri sendiri tersebut mendapat dukungan dari mahasiswa India, Mesir, Iran, dan Hongaria. Sedangkan yang mendukung masuk dalam kelompok mahasiswa Belanda adalah Inggris, Perancis dan Jepang.

Sehingga pada tahun 1917, *Indische Vereeniging* bergabung dengan Chung Hwa Hui, sebuah organisasi mahasiswa Indonesia-Cina dan sebuah perhimpunan mahasiswa Indonesia-Eropa dan Belanda yang berniat bekerja di Indonesia kelak. Kemudian organisasi ini menjadi sebuah federasi yang bernama *Indonesische Verbond van Studeerenden* (Persatuan Mahasiswa Indonesia).⁶¹ Pertemuan tersebut berhasil membentuk Liga Indonesia, karena hanya menerima organisasi sebagai anggota liga. Menarik untuk dicermati karena merupakan sebuah pertemuan untuk kerjasama dari organisasi mahasiswa dan dilakukan tiga kali pertemuan. Kongres pertama Liga Indonesia tersebut diadakan di Wageningen, hasilnya tidak sesuai harapan karena terjadi perdebatan

⁶⁰ Sudiyo, *Perhimpunan Indonesia Sampai dengan Lahirnya Sumpah Pemuda*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 44.

⁶¹ John Ingleson, *op.cit*, hlm. 2.

sengit antara Liga Indonesia dengan Belanda. Pada pertemuan kongres yang kedua di Den Haag, kembali terjadi selisih pendapat dan ketua sidang Jonkman mengatakan sebagai “Kemarahan Den Haag”, karena ada sebuah kalimat yang isinya berbunyi “Apa yang akan, dapat dan boleh diharapkan oleh Hindia Belanda dari Negeri Belanda?”.

Pertemuan sidang kongres Liga Indonesia yang ketiga semakin bertambah alot. Kongres diadakan tanggal 18 September 1919 dan J.E.Stokvis menulis “*Kolonial Weekbald*”. J.E.Stokvis merupakan anggota Partai Sosial Demokrat Nederland. Kutipan kata-katanya adalah sebagai berikut:

“Mahasiswa Belanda kita mempunyai posisi yang mengembirakan dan baik. Mereka siap, sebagai anak-anak dari bangsa yang bebas, pergi ke Hindia Belanda sebagai penguasa-penguasa; disediakan lengkap dengan titel-titel yang sering muncul sebagai hak-hak istimewa jika mereka sampai daerah tujuannya”

“Mahasiswa Indonesia, dilain pihak, datang kesini sesudah mendapatkan pengalaman sub-ordinasi nasional dan sosial yang pahit yang telah menjadi nasib mereka sejak masa kanak-kanak. Tepatnya, pergaulan mereka dengan anak-anak Belanda, yang terjamin kehidupan wajar dan intelek mereka pasti membuat mereka ini merasai sedalam-dalamnya tentang kekurangan mereka dan yang mereka sakit hati dan bersikap menolak. Jika saya ada kesempatan yang memberi angin kepada perasaan mereka, Mahasiswa Belanda dengan sendirinya pasti memberi jawaban atas tantangan ini sebaik-baiknya. Disanalah terwujud konflik kolonial itu, terang-terangan dan dalam segala ketajamannya”.⁶²

⁶² Mohammad Hatta, 1976, *op.cit*, hlm. 8-9.



Pertemuan Liga Indonesia yang pertama tahun 1917 sampai ketiga tahun 1919, merupakan pertama kalinya nama *Indische* menjadi *Indonesische*. Namun belum mendapat makna politik, baru menumbuhkan kesadaran dari para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Dilain pihak pada kesempatan ini *Indische Vereeniging* merasa kecewa terhadap hasil Liga Indonesia yang ketiga. Kekecewaan tersebut menumbuhkan sikap percaya pada kemampuan sendiri atau *non cooperation* bagi para anggota *Indische Vereeniging*.

Namun dari tahun 1908 sampai tahun terakhir perang dunia pertama (1914-1918) atau tepatnya sampai tahun 1920-an, *Indische Vereeniging* masih merupakan tempat perkumpulan sosial dimana didalamnya terumus ide-ide radikal ke arah kesadaran politik nasional.

Semua kejadian penting dalam rapat disampaikan Arnold kepada Ahmad Subardjo, A.A. Maramis dan Mohammad Nazif, karena mereka bertiga tidak ikut dalam rapat. Kemudian Arnold dan teman-temannya menulis surat yang ditujukan kepada ketua perhimpunan mahasiswa dari negara-negara peserta, yang diketik dalam bahasa Perancis. Dalam surat tersebut dijelaskan agar penetapan dan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar tetap dipegang teguh dan jangan diubah atas kepentingan-kepentingan politik kolonial. Bangsa Indonesia adalah satu bangsa dengan kepribadian sendiri, terlepas dari kepribadian bangsa Belanda. Janganlah

sampai dicampuradukkan antara identitas suatu bangsa dengan identitas bangsa lain.⁶³

Sikap dalam mempertahankan identitas bangsa Indonesia cukup berhasil. Hal tersebut bisa dilihat setelah pemerintah Belanda mengetahui dan mendapat isi surat dari para mahasiswa Indonesia. Pemerintah sangat kecewa, oleh sebab itu mengutus Mr. van Kleffens untuk mengadakan pembicaraan tentang isi surat tersebut. Hasilnya, pendirian Arnold tidak bisa digoyahkan dengan tetap menggunakan kelompok nasional mahasiswa Indonesia sendiri terlepas dari Belanda.

Melengkapi perjuangan Arnold Mononutu supaya Indonesia memiliki wakil sendiri, maka *Indonesische Vereeniging* menunjuk A.A. Maramis dan Darmawan Mangunkusumo untuk mewakili Indonesia dalam perhimpunan mahasiswa dalam akademik tersebut pada tahun 1924. Alasan mewakili karena kedua mahasiswa ini telah selesai menempuh studinya. Perjuangan membawa identitas nasional bangsa Indonesia dalam perkumpulan akademik tersebut cukup berhasil, walaupun belum sepenuhnya memperjuangkan nama "Indonesia" dalam perhimpunan mahasiswa itu. Namun, kelompok nasional mahasiswa Indonesia terlepas dari Belanda yakni menggunakan nama "*Indes-*

⁶³ Ruben Nalanan, *op.cit*, hlm. 57.

Orientales” (*Oost-Indie=India Timur*) bukan nama “*Nederlandsch-Indie*”.⁶⁴

Perjuangan untuk memiliki identitas nasional sendiri, memiliki bangsa sendiri dan lain sebagainya memang berat. Sehingga terjadi perbedaan pandangan tentang kolonial Belanda pun kerap terjadi. Perbedaan pandangan tersebut seperti halnya yang dialami anggota Perhimpunan Indonesia Noto Suroto (mantan ketua 1914-1917). Pandangan Noto Suroto tersebut termuat dalam majalah *Udaya* yang dipimpinnya, dengan judul tulisan “*Nederland en het Ontwaken van Indonesie*” atau “Nederland dan Kebangkitan Indonesia” dengan kutipan tulisannya: “.....bahwa kebangkitan Indonesia tidak boleh menghadapi barisan kulit putih dengan barisan kulit berwarna. Sebab pemecahan masalah secara demikian adalah pemikiran yang kolot dan lapuk”.⁶⁵

Apa yang diperdebatkan disini adalah sikap nasionalisme yang sedang tumbuh melalui kesadaran politik nasional dari para anggota *Indonesische Vereeniging*. Tulisan Noto Suroto tersebut jelas bahwa sikap yang berlawanan dengan para anggota lainnya karena mengingkari sikap *non cooperation*. Arnold menghendaki Indonesia bebas dari politik Asosiasi merupakan politik yang dilancarkan oleh kaum politik etis dan kaum liberal di perlemen Belanda.

⁶⁴ Sudiyo, *op.cit*, hlm. 45.

⁶⁵ Ruben Nalenan, *op.cit*, hlm. 41.

Politik Asosiasi bertujuan agar terbentuk kehidupan dan hubungan yang baik antara Hindia Belanda dengan negara induknya yaitu negeri Belanda. Usul dari kaum politik etis dan kaum liberal agar memberi kemakmuran kepada rakyat Hindia Belanda dalam rangka hubungan dengan negeri Belanda. Makanya kelompok penting dalam parlemen tersebut menuntut perbaikan dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial-budaya, dalam artian tidak lepas bebas dari negara Induk.

Sikap Noto Suroto yang memuji kebijakan van Heutz telah melanggar tujuan perjuangan *Indonesische Vereeniging*. Tulisan Noto Suroto yang termuat dalam majalah *Udaya* tersebut, menurut Arnold merupakan sikap memuji yang berlebihan dan bertentangan dengan keinginan dari perjuangan *Indonesische Vereeniging* dan juga bisa mempengaruhi rakyat Indonesia untuk menghormati van Heutz. Akhirnya untuk menyelesaikan kasus tersebut Arnold mengusulkan kepada ketua *Indonesische Vereeniging* untuk diadakan rapat istimewa. Sidang tersebut diadakan seperti ada terdakwa dan pendakwa. Oleh sebab itu, Arnold mendapat kesempatan pertama untuk bicara, kutipan pidatonya adalah sebagai berikut:

“Seorang pangeran dari kerajaan Solo tidak boleh berbuat semacam itu, yaitu dengan menulis pada tajuk rencana majalahnya untuk menarik perhatian dan simpati pejajah. Tidaklah tepat sama sekali Noto Suroto memuji-muji van Heutz yang begitu tidak berperikemanusiaan menindas perlawanan rakyat Indonesia dengan sangat kejam dan sangat dibenci oleh rakyat Indonesia. Sikap Noto Suroto itu jelas bertentangan

dengan cita-cita dan perjuangan *Indonesische Vereeniging*. Kalau seandainya Noto Suroto mau berbuat demikian, seharusnya Noto Suroto meminta keluar dari organisasi ini lebih dahulu, barulah ia dapat mengumumkan jalan pikirannya itu semuanya tanpa ada koreksi dari pihak lain. Sebagai seorang anggota organisasi, tindakan demikian itu sangat merugikan organisasi. Oleh sebab itu, Noto Suroto harus ditindak secara tindakan disiplin organisasi, yaitu dikeluarkan dari *Indonesische Vereeniging*.⁶⁶

Kemudian Purbotjoroko yang pernah jadi guru bantu bahasa Jawa van Heutz, juga berbicara dalam sidang. Kutipan tulisannya adalah “bahwa bangsawan Jawa ini tidak dikenal lagi etik pergaulan dan kehormatan diri. Noto Suroto berbuat begitu, karena perutnya keroncongan. Ia berbuat begitu, karena hidupnya sekeluarga tergantung kepada bantuan *ondernemer* kolonial itu”.⁶⁷

Setelah Noto Suroto diberi kesempatan untuk membela diri, ternyata semua anggota telah menyangka bahwa sikapnya tidak akan berubah yakni sama dengan pandangannya yang ditulis dalam majalah *Udaya*. Maka, dalam rapat tersebut dilakukan pemungutan suara. Anggota yang setuju Noto Suroto dikeluarkan dari *Indonesische Vereeniging* hampir semuanya, tinggal dua orang yang *abstain* yaitu Prodjudikoro dan saudaranya. Sehingga ketua rapat memutuskan bahwa Noto Suroto keluar dari keanggotaannya dari *Indonesische Vereeniging*.

⁶⁶ *Idem*, hlm. 43-44.

⁶⁷ *Idem*.

Setelah permasalahan terhadap Noto Suroto selesai timbul masalah baru yakni Sintala yang merupakan anggota *Indonesische Vereeniging*, tidak ikut dalam rapat istimewa tersebut. Sintala pun menulis dalam surat kabar "*Het Algemene Handelsblad*" tanggal 3 Januari 1925. Tulisan Sintala berjudul "*Een Booze Geest*" atau "anggota dan pengurus *Indonesische Vereeniging* telah melakukan suatu semangat jahat". Maka tanggal 11 Januari 1925, J.B. Sintala akhirnya dihadapkan pada sidang istimewa *Indonesische Vereeniging* yang kedua. Hasilnya seluruh pengurus dan anggota setuju bahwa Sintala dikeluarkan dari organisasi.

Ternyata tindakan pengeluaran dua anggota *Indonesische Vereeniging* tersebut membawa pengaruh bagi perkembangan organisasi. Pertama, *Indonesische Vereeniging* semakin diawasi pemerintah Belanda karena mereka menganggap bahwa orang-orang dan juga tujuan dari organisasi *Indonesische Vereeniging* semakin radikal. Pemerintah juga mengira bahwa *Indonesische Vereeniging* memiliki hubungan dengan gerakan komunis di tanah air. Hal itu disebabkan karena tulisan Sintala dimuat dalam majalah terkenal di Belanda, sehingga pemerintah sering membicarakan masalah tersebut dan melakukan pengawasan secara ketat. Kedua, akibat dari berita pengeluaran tersebut membuat para anggota *Indonesische Vereeniging* semakin mengintensifkan pergerakannya agar lebih berhati-hati dan lebih semangat, pantang putus asa dalam mendukung pergerakan nasional.

Langkah perjuangan *Indonesische Vereeniging* selanjutnya ialah dengan semakin merapikan susunan dalam pengurusan organisasi. Dilakukan karena tugas *Indonesische Vereeniging* kedepan semakin berat melihat pemerintah semakin menekan pergerakan mereka. Jumlah pengurus yang semula hanya berjumlah lebih dari lima orang sekarang ditambah dengan harus ada wakil ketua dan sesuai dengan anggaran dasar maka pengurus hanya menjabat selama satu tahun supaya setiap pengurus mendapat kesempatan yang sama.

Pada tanggal 8 Februari 1925, *Indonesische Vereeniging* membuat kesepakatan baru untuk menggantikan kepemimpinan Nazir Datuk Pamuncak karena memimpin sejak tanggal 9 Februari 1924. Maka, terpilih sebagai ketua baru untuk periode 1925-1926 adalah Sukiman Wirjosanjoyo dan wakilnya Arnold Mononutu. Setelah ketua, wakil ketua dan pembentukan pengurusan baru, maka tugas organisasi semakin bertambah. Rapat tanggal 8 Februari 1925 secara resmi nama *Indonesische Vereeniging* tidak dipakai lagi, akan tetapi diganti dengan nama Perhimpunan Indonesia. Sehingga untuk pertama kalinya nama organisasi menggunakan bahasa nasional Indonesia. Perhimpunan Indonesia juga secara resmi digunakan masa kepemimpinan Sukiman.

Pada kepemimpinan Sukiman terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan pemerintah Belanda yaitu terbitnya buku peringatan 15 tahun berdirinya Perhimpunan Indonesia sejak tahun 1908-1923. Rencana

Perhimpunan Indonesia menerbitkan *Gedenkboek* ialah pada masa kepemimpinan Nazir Pamuncak, namun karena masih menunggu artikel dan tulisan yang masuk dari para anggota, maka ditunda terbitnya selama dua tahun. Buku peringatan tersebut baru terbit pada tahun 1924. Artikel-artikel dalam *Gedenkboek* tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama; "*Terugblik*" (Menengok Kebelakang) oleh A.A. Maramis, tentang perkembangan *Indische Vereeniging* sejak tahun 1908-1923.

Kedua; "*Opgang*" (Maju Kedepan) oleh Ahmad Subarjo, tentang perlunya perubahan semangat berdasarkan pandangan hidup yang dinamis agar bangsa Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan zaman modern untuk mempertahankan kehidupannya dengan keperibadian nasional bergolak.

Ketiga; "*Nieuwe Banen*" (Jalan Baru) oleh Sakri Sunarto atau Sukiman Wiryosanjoyo, tentang strategi perjuangan untuk percaya pada kemampuan sendiri, menggantikan politik oportunistis dan kepercayaan kepada kolonial Belanda.

Keempat; "*Indonesia in de Wereldgemeenschap*" (Indonesia dalam Masyarakat Dunia) oleh Mohammad Hatta, tentang pentingnya kedudukan Indonesia diantara dua Samudera dalam perkembangan ekonomi dunia sejak dahulu kala.

Kelima; "*Nationale Geschiedenis*" (Sejarah Nasional) oleh Mohammad Nazif, tentang perlunya pendidikan generasi muda tentang sejarah rakyat dan tanah air Indonesia agar mereka sadar akan peranannya dalam masa lalu dan sejarah akan kemampuan dan kecakapan bangsa Indonesia menghadapi masa depan dalam suasana merdeka.

Keenam; "Indonesia ditengah-tengah Revolusi Asia" oleh Mohammad Hatta, tentang sejarah pergerakan kemerdekaan di India dan proses pembaharuan pandangan hidup di Turki dibawah pengaruh dan pimpinan Mustafa Kamal.

Ketujuh; "*De Vakbeweging in Indonesia*" (Gerakan Serikat Kerja) tanpa nama penulis, tentang sejarah gerakan buruh di Indonesia.⁶⁸

Tulisan para anggota Perhimpunan Indonesia ini mendapat kecaman dari pemerintah Belanda karena isinya selain tujuan "Indonesia Merdeka" juga pengetahuan yang luas tentang sejarah bangsa Belanda sendiri. Gagasan-gagasan politik yang begitu modern ada dalam artikel tersebut membuktikan bahwa para mahasiswa benar-benar menguasai ilmu politik. Anggapan pemerintah Belanda sebelumnya bahwa para mahasiswa maupun orang bumi putera tidak bisa maju untuk menyaingi bangsa Eropa. Tetapi dengan terbitnya *Gedenkboek*, pemerintah Belanda menjadi sadar bahwa Perhimpunan Indonesia benar-benar mengerti politik

⁶⁸ Ahmad Subardjo, 1975, *op.cit*, hlm. 27-29.

yang selama ini dilarang pemerintah untuk belajar politik. Beginilah kata bekas Gubernur Westenenk; “jangan kira bahwa kekuatan Belanda mudah ditumbangkan, karena ia tegap dan kuat seperti gunung-gunung di Sumatera dan Jawa”.⁶⁹ Pendapat inilah yang dibantah oleh para anggota Perhimpunan Indonesia dengan membuktikan bahwa mereka tidak bisa dibohongi lagi oleh kolonial Belanda.

Kepemimpinan Sukiman mengeluarkan juga “*statement-statement*” yang dikenal dengan “Statement Sukiman”. Prinsip-prinsip yang diumumkan oleh para pengurus Perhimpunan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Hanya satu Indonesia yang merasa bersatu-padu, dengan mengenyampingkan perbedaan-perbedaan antara golongan-golongan masing-masing, dapat mematahkan kekuasaan kaum penjajah. Tujuan bersama yaitu kemerdekaan Indonesia menghendaki terwujudnya suatu masa aksi nasionalistis yang sadar dan bersandar pada kekuatan sendiri.
2. Ikut sertanya semua lapisan rakyat Indonesia dalam perjuangan bersama untuk kemerdekaan itu adalah juga suatu syarat yang mutlak benar-benar untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Unsur yang terpenting dan bersifat inti dalam setiap masalah politik kolonial yakni pertentangan dalam kepentingan antara penjajah dan

⁶⁹ Ahmad Subardjo, 1978, *op.cit*, hlm. 126.

yang terjajah. Kecenderungan dari politik kaum penjajah untuk membikin kabur dan menyelimuti dan menegaskan segala pertentangan.

4. Melihat pengaruh dari penjajah yang bersifat marusak dan menurunkan kesusilaan terhadap keadaan fisik dan psikis dari kehidupan Indonesia itu perlu diusahakan selekas-lekasnya supaya dibikin normal lagi keadaan rohaniah dan jasmaniahnya.⁷⁰

Pada kepemimpinan Sukiman dengan jelas dirumuskan asas untuk forum internasional selain mengadakan hubungan dengan tanah air. Strategi yang ditempuh oleh para anggota Perhimpunan Indonesia adalah tetap menggunakan *non cooperation* (swadaya) bukan *cooperation*. Para anggota dituntut untuk menjalankan asas percaya pada kemampuan sendiri bukan berkerjasama dengan kolonial.

Statement Perhimpunan Indonesia merupakan kumpulan pengetahuan yang kemudian dianalisis untuk dijadikan landasan prinsip perjuangan seperti yang dituangkan dalam empat prinsip di atas. Pengetahuan mereka peroleh selama aktivitas kuliah maupun mengikuti berbagai macam organisasi dari pelajar-pelajar dari India, Mesir, Siam, Vietnam, Filipina, Cina dan lain sebagainya. Dan juga kepergian mereka waktu libur ke Paris, London dan Berlin, dengan mengadakan rapat dan ceramah tentang sejarah dan gerakan kebangsaan Indonesia.

⁷⁰ *Ibid*, 1975, hlm. 29-30.

Maka sejak terbitnya *Gedenkboek* dan juga statement Sukiman, Perhimpunan Indonesia terjun kedalam bidang politik dengan orientasi yang lebih jelas yakni memperkenalkan masalah Indonesia dan gerakan kemerdekaan Indonesia ke dunia internasional dan mendukung gerakan kemerdekaan dalam negeri Indonesia.

Perkembangan Perhimpunan Indonesia selanjutnya ialah semakin mencirikan bahwa organisasi ini untuk tujuan nasional bangsa Indonesia. Maka, ada kewajiban untuk setiap anggota untuk menggunakan kopiah (peci) nasional. Tujuannya adalah untuk menunjukkan ciri nasional Indonesia dengan menggunakan kopiah. Kopiah digunakan karena lebih mudah digunakan oleh semua kalangan baik agama dan golongan mana pun. Sehingga cukup mengubah model topi Eropa dengan menghilangkan bagian pinggirannya yang bundar, jadilah topi nasional. Kemudian, telah dipikirkan pula untuk menghilangkan nama yang masih mengaitkan dengan nama-nama feodal atau bangsawan, seperti gelar Datuk, Raden mas dan penambahan nama orang tua dibelakang nama kecil atau nama aslinya. Para anggotanya sangat konsisten dengan perhimpunan. Seperti nama Arnold Mononutu saja tidak Arnold Iscaaq Mononutu, Nazir Datuk Pamuntjak hanya disebut Nazir Pamuntjak dan Sukiman Wiryosanjoyo tinggal dipanggil Sukiman saja. Hal tersebut dilakukan untuk mencirikan identitas nasional bangsa Indonesia. Kemudian Perhimpunan Indonesia telah menggunakan pemakaian lambang “Merah Putih” dengan gambar

kepala kerbau dinyatakan resmi sebagai lambang organisasi Perhimpunan Indonesia. Walaupun lambang tersebut telah dipikirkan dan dirintis oleh Ahmad Subarjo sejak masa kepemimpinannya tahun 1919-1921.

Penggunaan nama “Indonesia” dalam pemberian nama organisasi mempunyai arti yang sangat penting bagi Perhimpunan Indonesia. Pertama, Perhimpunan Indonesia ingin meluruskan jalan perjuangannya dengan diawali dari pencarian identitas nasional dan ciri-ciri nasional Indonesia. Kedua, Perhimpunan Indonesia ingin menunjukkan bahwa perjuangan mereka benar-benar bergerak dalam bidang politik dan terbuka. Tujuan Perhimpunan Indonesia jelas yaitu untuk masa depan Indonesia adalah mencapai kemerdekaan.

Perjuangan Perhimpunan Indonesia dalam bidang politik secara terbuka dimulai sejak tahun 1925. Ketika itu nama *Indonesische Vereeniging* berubah mejadi Perhimpunan Indonesia. Dengan demikian politik terbuka telah dimulai. Melihat perkembangan Perhimpunan Indonesia tersebut, maka pemerintah Belanda semakin ketat melakukan pengawasan. Langkah pemerintah mulai menghubungkan pergerakan di Nederland dengan pergerakan di tanah air. Pemerintah menduga bahwa pergerakan Perhimpunan Indonesia sama dengan PKI yang gagal dalam melakukan pemberontakan pada tahun 1926 dan 1927. Walaupun bentuk dan tujuan pergerakan ada kesamaan, namun nama organisasi, jalan, pelakunya atau tokoh-tokohnya berbeda sama sekali, bahkan tidak pernah

berhubungan atau berkerjasama satu sama lain. Perbedaannya, jika PKI melakukan dengan cara pemberontakan dengan paham komunisnya yang mereka pergunakan, sedangkan Perhimpunan Indonesia lebih nasionalisme.

b. Perhimpunan Indonesia dengan Liga Cabang Belanda

Perhimpunan Indonesia selain mengikuti Liga Anti Imperialisme di Bierville, juga masuk dalam Liga Cabang Belanda pada bulan Juli 1927. Perhimpunan Indonesia berperan dalam pembentukan liga tersebut dan akhirnya menguasai liga untuk kepentingan propaganda. Liga lebih banyak menyelenggarakan pertemuan untuk membahas situasi dan keadaan penjajahan Belanda di tanah air.

Perhimpunan Indonesia berhasil menerbitkan jurnal yang terbit dua minggu sekali antara bulan September 1927 dan Juni 1928 yang berjudul "*Recht en Vrijheid*" atau "Keadilan dan Kemerdekaan". Salah satu isi artikel dari Perhimpunan Indonesia tersebut adalah berbunyi sebagai berikut:

"Pekerjaan kami, yang pertama dan utama, adalah sekuat tenaga memperotes dan melawan penganiayaan, pemerasan, dan perlakuan buruk terhadap rakyat jelata dan kaum nasionalis Indonesia dan sekuat mungkin mempropagandakan keadilan dan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia".⁷¹

Liga cabang Belanda pada bulan Januari 1928 mengeluarkan program dari liga yang telah direncanakan dan dikonsultasikan kepada

⁷¹ John Ingleson, *op.cit.*, hlm. 50. Dikutipnya dari *Recht en Vrijheid*, 10 September 1927.

Perhimpunan Indonesia.⁷² Liga ini sangat mendukung dan mengakui hak rakyat Indonesia menuntut kemerdekaan dan perjuangan nasional tersebut harus melewati jalur hukum. Oleh sebab itu, liga mengajukan kepada pemerintah Belanda sebanyak sembilan tuntutan. Tujuh hal yang pertama adalah meliputi masalah seperti dicabutnya peraturan yang membatasi kaum nasionalis, dihapuskannya “wewenang istimewa” Gubernur Jenderal dan suatu amnesti umum bagi aktivitas pergerakan politik. Semuanya memiliki arti penting sekali untuk mendukung perkembangan politik di Indonesia dan bangsa Indonesia boleh menentukan nasibnya sendiri.⁷³

Liga ini sejak Juli 1927 didominasi oleh peranan Perhimpunan Indonesia dan kaum sosial demokrat Belanda yang paling berpengaruh. Di Indonesia merupakan salah satu koloni Belanda yang paling luas wilayahnya, sehingga Perhimpunan Indonesia hanya memusatkan perhatiannya pada masalah penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Namun, pada tahun 1928 terjadi kemerosotan dikarenakan terjadi ketegangan antara kaum komunis dan non-komunis, sehingga berakibat pada mundurnya peran kaum non-komunis pada liga. Sedangkan Perhimpunan Indonesia harus melawan komunis sendiri karena kaum Sosial Demokrat Belanda mengundurkan diri. Ketegangan tersebut akibat dari PKI dan Partai Komunis Cina gagal melakukan perlawanan. Sehingga

⁷² *Idem.*

⁷³ *Ibid*, hlm. 51.

Comintern menuduh Perhimpunan Indonesia dan kaum nasionalis sebagai *Borjuis*. Oleh sebab itu menolak berkerjasama dengan mereka lagi. Ketegangan seperti inilah akhirnya Perhimpunan Indonesia mengundurkan diri dengan alasan bahwa Perhimpunan Indonesia tidak mungkin bisa mempropagandakan tujuannya lebih luas lagi, walaupun harus kehilangan dukungan karena CPN tidak bisa lagi untuk dibendung.⁷⁴

Akhirnya pada bulan April 1928 Perhimpunan Indonesia tidak lagi berhubungan dengan Liga Cabang Belanda. Perhimpunan Indonesia mulai kelihatan merosot dalam melakukan propaganda, hal tersebut dikarenakan tidak percaya lagi pada organisasi internasional dan organisasi-organisasi lainnya.

c. Hubungan Perhimpunan Indonesia dengan Komunis

Kegiatan besar bagi Perhimpunan Indonesia yang telah dilaksanakan adalah seperti kegiatan propaganda dalam dan luar negeri Belanda, di tanah air, terjun dalam aktivitas dari organisasi-organisasi berskala internasional, dan menjalin hubungan dengan mahasiswa dari negara-negara Eropa, Asia dan Afrika. Konsentrasi Perhimpunan Indonesia dalam bidang politik dengan tujuan kemerdekaan Indonesia berakibat pada pertentangan dalam ide-ide Perhimpunan Indonesia sendiri dengan paham yang telah dianut oleh organisasi yang dimasuki.

⁷⁴ *Idem*. Dikutipnya dari artikel yang berjudul “*Schorsing Mohammad Hatta*” (Pemecatan Mohammad Hatta), *Daulat Rakyat*, 10 Desember 1931.

Perhimpunan Indonesia bergabung dengan kelompok haluan kiri di negeri Belanda, CPN dan SDAP. Perhimpunan Indonesia ikut pula menentang setiap kebijakan pemerintah yang menghimpit kaum nasionalis. Propaganda yang dilaksanakan Perhimpunan Indonesia adalah hanya untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merasa tertantang dengan propaganda yang dilancarkan pemerintah Belanda bahwa tanah jajahan belum siap untuk merdeka karena masih banyak yang masih belum lengkap baik pendidikan, organisasi politik, sosial maupun ekonomi. Akan tetapi hal tersebut membuat Perhimpunan Indonesia semakin bersungguh-sungguh untuk menantang propaganda Belanda. Hal tersebut telah terbukti dengan berdirinya organisasi Perhimpunan Indonesia yang didirikan oleh orang-orang intelektual yang menuntut kemerdekaan, memiliki ideologi yang jelas dan memiliki hubungan yang luas dengan negara-negara Eropa dan organisasi mahasiswa Asia-Afrika.

Sejak kepemimpinan Sukiman, Perhimpunan Indonesia telah menjalin hubungan baik dengan asosiasi mahasiswa Cina-Indo di Paris. Arnold Mononutu dikirim Perhimpunan Indonesia ke Paris untuk menjadi duta tidak resmi disana. Perhimpunan Indonesia juga mengirim wakilnya di *Oriental Fete* di Paris pada bulan Februari 1926, juga berhubungan dengan mahasiswa Indonesia dan Kairo dan organisasi mahasiswa Asia di London dan Berlin.

Kegiatan politik Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda dan juga Eropa dalam propaganda-propaganda politiknya tentang masalah tanah air yang diperkenalkan ke dunia internasional hanya untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka. Perhimpunan Indonesia juga bergabung dengan Partai Komunis Belanda (CPN=*Communistische Partij Nederland*) dan organisasi-organisasi yang disponsori oleh Comintern. Alasan Perhimpunan Indonesia bergabung dengan organisasi komunis Nederland dan sebagainya, karena mengetahui bahwa PKI sangat mendominasi kancah politik Indonesia setelah tahun 1920-an.⁷⁵

Anggapan Perhimpunan Indonesia bahwa PKI sejalan dengan gerakan mereka karena gerakan mereka lebih radikal seperti gerakan-gerakan yang terjadi di tanah air. Walaupun mereka mengetahui berita tersebut hanya sebagian, baik lewat keluarga, koran-koran kolonial dan teman yang ada di tanah air. Sebagai contoh pada bulan Januari 1925, Ali Sastroamidjoyo menyatakan dukungan dengan pemogokan buruh di Surabaya. Pada kesempatan lain mereka membuat selebaran yang memuat berita tentang situasi politik di Indonesia dan memuji kegiatan PKI. Hatta juga menganggap PKI sebagai partai nasionalis dan hanya sekunder sebagai suatu partai komunis.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 46.

⁷⁶ *Idem*.

PKI di Amsterdam mempunyai markas besar yang diketuai oleh pengurus internasional di bawah Semaun. Semaun juga aktif di *Comintern*, PKI dan juga Serekat Pagawai Laut Hindia Belanda, yang didirikan pada tahun 1924. Semaun dan Darsono bergabung dengan Perhimpunan Indonesia dan mengikuti rapat sejak mereka dibuang dari Hindia Belanda pada bulan Januari 1926. Kedekatan mereka dengan Perhimpunan Indonesia diperlihatkan dengan berpartisipasi dalam setiap kegiatan, propaganda maupun rapat penting dari Perhimpunan Indonesia.

Pengurus Perhimpunan Indonesia lebih tertarik dengan gagasan dan aksi *revolusioner* Partai Komunis Belanda (*Comintern*) dan PKI, ketimbang Partai Buruh Demokrasi Sosial (SDAP=*Social Democratische Arbeiders Partij*) dan Partai Sosialis Merdeka (OSP=*Onafhankelijke Socialistische Partij*) yang moderat. Walaupun keempat gerakan ini moderat, Perhimpunan Indonesia lebih tertarik dengan CPN dan PKI yang lebih radikal dan *revolusioner*. CPN menanggapi permintaan Perhimpunan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan penuh bagi Indonesia, sedangkan SDAP masih berpegang *Indie Los van Nederland* sampai tahun 1929. Akan tetapi SDAP tetap membatasi Perhimpunan Indonesia jangan menjadikan kemerdekaan penuh sebagai suatu sasaran yang harus segera dicapai.⁷⁷ Diketahui bahwa Hatta memanfaatkan dukungan CPN, namun

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 47.

ia menolak berkerjasama karena ada perbedaan mendasar antara cita-cita CPN dengan Perhimpunan Indonesia.

Alasan yang sangat kuat bagi Perhimpunan Indonesia karena mereka mau berkerjasama dengan organisasi-organisasi yang didalamnya dikendalikan komunis adalah pernyataan *Comintern* yang mendukung gerakan nasional non-komunis di Asia. Selama *Comintern* berpegang pada kebijakan ini, maka Perhimpunan Indonesia melihat ada suatu kerjasama dengan organisasi yang disponsori oleh *Comintern*, sangat bermanfaat dalam melakukan propaganda tentang Indonesia.⁷⁸ Perhimpunan Indonesia menunjuk dua wakil resmi di *Comintern* Moskow yaitu Semaun dan Iwa Kusumasumantri. Mereka berdua ditunjuk pada tanggal 8 November 1925, akan tetapi sampai tahun 1926 mereka keluar dari keanggotaan.

d. Pengadilan Empat Anggota Perhimpunan Indonesia

Setiap aktivitas sehari-hari dari para anggota Perhimpunan Indonesia selalu diawasi, kemudian diselidiki bahkan dianalisis untuk dijadikan dasar apakah ada keterkaitan antara aksi Perhimpunan Indonesia dengan komunis. Sebab pemerintah Belanda khawatir bahwa Perhimpunan Indonesia ada hubungannya dengan pemberontakan komunis di tanah air yakni di Bandung tahun 1926 dan Sumatera Barat tahun 1927.

⁷⁸ *Idem.*

Pengawasan tersebut dilakukan sejak Perhimpunan Indonesia merubah bentuk dan tujuan organisasi (reorganisasi) sekitar tahun 1923 atau pada masa kepemimpinan Herman. Sejak reorganisasi tahun 1923 sampai pertengahan tahun 1927, Perhimpunan Indonesia sangat aktif dalam propaganda masalah Indonesia dan tujuan Indonesia merdeka di dalam negeri Belanda dan negara-negara Eropa. Pemerintah khawatirnya jika Perhimpunan Indonesia secara langsung mewariskan aksi radikal seperti pemberontakan yang dilakukan komunis di tanah air.

Melihat perkembangan Perhimpunan Indonesia semakin berani dalam hal propaganda masalah dan tujuan Indonesia merdeka dan juga mendapat simpati dunia internasional, membuat pemerintah Belanda semakin preventif. Maka, melalui Penasihat Urusan Kemahasiswaan (PUK) dari Kementerian Jajahan (KJ) memberikan peringatan yang keras kepada para anggota Perhimpunan Indonesia supaya menghentikan propaganda politik mereka. Peringatan tersebut ternyata juga disertai dengan ancaman yakni diancam akan dicabut beasiswanya dan tidak akan dapat bekerja menjadi pegawai negeri Hindia Belanda jika sudah pulang ke tanah air.

Peringatan disertai ancaman dari pemerintah Belanda berlanjut kepada penggeledahan dan penangkapan kepada tokoh-tokoh aktivis Perhimpunan Indonesia. Pemerintah terlalu berpandangan sempit tentang dasar penangkapan kemudian diadili. Alasannya adalah karena latar

belakang revolusi PKI di Bandung dan Sumatera Barat. Penasihat Urusan Kemahasiswaan mendesak Jaksa Agung agar mengeluarkan izin tentang penggeledahan kepada para anggota Perhimpunan Indonesia. Pertimbangannya, jika melakukan penggeledahan maka akan menemukan barang-barang yang berkaitan dengan revolusi komunis di tanah air. Namun Jaksa Agung menolaknya dengan alasan bahwa untuk dapat mengizinkan tindakan semacam itu harus memiliki bukti terlebih dahulu, jika aksi Perhimpunan Indonesia benar-benar melanggar hukum untuk menggulingkan struktur sosial pemerintah Belanda.⁷⁹

Usaha Penasihat Urusan Kemahasiswaan tersebut terus dilakukan setelah tidak mendapat bukti untuk memberatkan aktivitas politik Perhimpunan Indonesia. Pada akhirnya pemerintah Belanda mendapatkan kesempatan untuk melakukan tuduhan kepada Perhimpunan Indonesia setelah ada edaran pernyataan Perhimpunan Indonesia. Edaran yang dikeluarkan tersebut berupa pernyataan-pernyataan yang keras melalui majalah Indonesia Merdeka edisi Maret-April tahun 1927. Pernyataan-pernyataan tersebutlah yang dijadikan sebagai alasan yang kuat untuk mengadili empat aktivis Perhimpunan Indonesia nantinya. Tuduhan tersebut sederhana yakni tindakan yang dapat dikategorikan dalam penghasutan untuk melakukan tindakan kekerasan.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 78. Dikutip dari surat Jaksa Agung kepada Penasihat Urusan Kemahasiswaan, No. 6272 Rahasia, 18 November 1926.

Pernyataan-pernyataan dalam majalah Indonesia Merdeka tersebut menanggapi pandangan pemerintah Belanda bahwa para mahasiswa atau para anggota Perhimpunan Indonesia tidak bisa memperoleh kemerdekaan dan juga mementahkan pandangan dari Hindia Belanda bahwa penduduk pribumi adalah masih primitif dan bodoh karena tidak mau menerima pengetahuan dan pendidikan maju.

Secara tidak sengaja opini telah terbangun di masyarakat Belanda. pendapat tersebut berpusat dari Kementerian Jajahan untuk dijadikan dasar untuk mengadili para anggota Perhimpunan Indonesia. Menteri Jajahan tidak memiliki “wewenang istimewa” untuk melakukan penangkapan, maka menyuruh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kau, baru bisa menangkap untuk diadili. Alasannya bahwa penangkapan baru dapat dilaksanakan jika ada bukti-bukti yang cukup berdasarkan Undang-Undang Pidana Belanda.⁸⁰

Menteri Jajahan mendukung Jaksa Agung untuk melakukan penangkapan kepada para aktivis Perhimpunan Indonesia. Menteri Jajahan mengambil kesimpulan untuk melakukan penangkapan dengan berpendapat bahwa meletusnya pemberontakan PKI berhubungan erat dengan para pendukungnya di negeri Belanda termasuk Perhimpunan Indonesia. Dikatakan bahwa:

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 79.

“.....kegiatan para agitator tersebut di negeri Belanda dapat menyebabkan suatu pertempuran berdarah di Hindia Belanda, seperti yang telah terjadi (PKI) dan ini harus ditentang dan mereka tidak boleh lagi dibebaskan dari hukuman dalam satu bagian negara ini bila terlibat dalam persekongkolan untuk menjatuhkan kekuasaan Belanda dibagian lainnya dari negara.....”⁸¹

Bulan Maret sampai April, semua bahan bukti telah terkumpul untuk diserahkan kepada Menteri Kehakiman oleh Menteri Jajahan yang bernama Koningsberger. Bahan bukti tersebut meliputi kegiatan selama kepemimpinan dan aktivitas politik Perhimpunan Indonesia di dalam negeri Belanda dan arsip propaganda Perhimpunan Indonesia di luar negeri. Bahan-bahan tersebut bisa digunakan sebagai bukti yang diminta oleh Jaksa Agung dengan dua argumen bahwa bahan-bahan tersebut layak dijadikan bukti yang bisa menyeret terdakwa ke pengadilan, dan atau Jaksa Agung dibawah tekanan politik dari pemerintah dan Menteri Jajahan.⁸²

Pada tanggal 10 Juni 1927 tepatnya jam 10.00 pagi hari, polisi Belanda melakukan penggrebekkan terhadap kediaman para mahasiswa Indonesia di jalan *Waastraat* no. 01. Penggrebekkan dilakukan terhadap kediaman Hatta di *Adelheidstraat*, Den Haag dan juga terhadap Nazir

⁸¹ *Ibid*, hlm. 80. Dikutip dari Surat Menteri Jajahan kepada Menteri Kehakiman, 1 Januari 1927.

⁸² *Idem*. Jaksa Agung memiliki bukti dari dokumen yang berisi kegiatan Perhimpunan Indonesia, selogan dan propaganda yang termuat dalam agenda program kerja Perhimpunan Indonesia dan juga termuat dalam artikel-artikel di majalah Indonesia Merdeka. Atau Jaksa Agung sebagai korban politis dari pemerintah melalui Menteri Jajahan.

Pamuncak, Abdul Madjid, Ahmad Subarjo, Ali Sastroamijoyo, dan kawan-kawan. Namun dalam penggebrekkan tersebut Hatta tidak sedang di rumah. Ia sejak tanggal 5 Juni 1927 berangkat menjenguk Sumadi di Delf, Swiss, yang sedang sakit keras. Terjadinya penggebrekkan tersebut baru diketahui Hatta setelah membaca surat kabar *Vorwarts*, Jerman pada tanggal 11 Juni 1927. Setelah itu pada tanggal 12 Juni, Hatta kembali ke Nederland dan berangkat lagi tanggal 10 September 1927 untuk mengikuti Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kemerdekaan di Gland, Swiss.

Respon Hatta terhadap berita penggeledahan tersebut dengan mengatakan bahwa jika penggeledahan tersebut benar-benar dilakukan maka akan mempopulerkan aksi politik Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda dan dunia internasional. Sebab isi berita mengatakan bahwa pada tanggal 10 Juni 1927 terjadi penggeledahan tempat anggota Perhimpunan Indonesia, beberapa ditangkap sedangkan ketuanya lolos melarikan diri. Sedangkan isi dari salah satu koran terkemuka tersebut mengatakan bahwa penangkapan dilakukan karena mencari candu dan senjata api yang diselundupkan anggota Perhimpunan Indonesia. Alasan tersebut mengada-ada setelah tidak menemukan bukti untuk dijadikan alasan penangkapan.

Ternyata pada tanggal 23 September 1927, empat orang anggota Perhimpunan Indonesia ditangkap yaitu Muhammad Hatta, Nazir Pamuncak, Abdul Madjid Djoyoadiningrat, dan Ali Sastroamidjoyo. Hatta



mengatakan bahwa yang akan ditangkap tersebut adalah tujuh orang akan tetapi yang bersangkutan seperti Arnold Mononutu, Ahmad Subardjo dan Gatot Tarumihardjo sedang berada di luar negeri Belanda dan tidak bisa dilakukan penahanan.⁸³ Mengenai penangkapan tersebut polisi membawa surat penangkapan dan ditahan di penjara *Casius-Straat*. Ada tiga alasan dilakukannya penangkapan untuk proses peradilan tersebut, pertama; mereka menjadi anggota perhimpunan terlarang, kedua; terlibat dalam pemberontakan, dan ketiga; menghasut untuk menentang Kerajaan Belanda.⁸⁴ Laporan hasil temuan team komisi ahli dari yang dibentuk pemerintah tanggal 5 Agustus 1927, memberikan kesimpulan bahwa Perhimpunan Indonesia berhubungan erat dengan Moskow. Hal tersebut ditunjukkan sebagai berikut:

“Perhimpunan Indonesia ternyata merupakan suatu organisasi yang luar biasa membahayakan negara, suatu organisasi yang bertentangan dengan anggaran dasarnya yang menyatakan tujuannya sebagai “pemisahan Hindia Belanda dari Negeri Belanda” dengan semua aparat resmi yang dikuasainya, nyatanya bersamaan dengan itu mempropagandakan penggunaan segala macam sarana tidak sah (misalnya: kekerasan, aksi bawah tanah, membangkitkan kebencian ras dan sebagainya)”⁸⁵

Masing-masing dari mereka ditempatkan pada bilik sendiri yakni Muhammad Hatta no. 01, Nazir Pamundjak no. 07, Abdul Madjid Djoyoadiningrat no 55, dan Ali Sastroamidjoyo no 14, sehingga mereka

⁸³ Hatta, 1979, *op.cit*, hlm. 217.

⁸⁴ *Idem*.

⁸⁵ John Ingleson, *op.cit*, hlm. 81. Dikutipnya dari Laporan Komisi Ahli, Dokumen Pengadilan Perhimpunan Indonesia, hlm. 41.

tidak bisa melakukan kontak sama sekali. Dalam satu hari diberi kebebasan (*gelucht*) yakni diberi udara di luar tahanan sebanyak 2 kali pagi dan sore selama 30 menit. Mereka juga diberi kesempatan untuk mengunjungi dan meminjam buku di perpustakaan.

Pada Maret 1928, empat orang anggota Perhimpunan Indonesia yakni Muhammad Hatta, Nazir Pamundjak, Abdul Madjid Djoyoadingrat, dan Alis Sastroamidjoyo, diajukan ke pengadilan Den Haag. Dakwaan kepada mereka adalah menghasut rakyat untuk menggulingkan kekuatan Belanda dengan menggunakan kekerasan. Alasan dakwaan karena tulisan yang terdapat dalam majalah Indonesia Merdeka, dianggap membahayakan pemerintah. Salah satu isi artikel yang ditakuti tersebut berjudul *Vanderlandsche Kroniek* (Kronik Tanah Air), digambarkan bahwa kerjasama dengan Belanda tidak bisa dijalankan lagi sebagai gantinya adalah gerakan revolusi untuk menggantikan pemerintahan.

Di pengadilan, keempat anggota Perhimpunan Indonesia tersebut mendapat dua orang pembela yang bernama J.E.W. Duijs dan T.J. Mobach. Kedua orang ini merupakan seorang ahli hukum sekaligus sebagai anggota Parlemen Belanda dari SDAP. Menangani kasus ini, para pembela bekerja secara sukarela tanpa mendapat bayaran. Pada pembelaan Duijs, mengatakan bahwa kasus tersebut murni rekayasa politik bukan kriminal yang dituduhkan pemerintah. Mereka juga dituduh melanggar

undang-undang dalam kegiatan politik Perhimpunan Indonesia.⁸⁶ Dalam pembelaannya, Duijs menyanggah keterlibatan Perhimpunan Indonesia dengan *Comintern* maupun dengan pemberontakan PKI, namun ia mengakui bahwa tindakan mereka dalam Indonesia Merdeka adalah sedikit melanggar hukum. Namun, tindakan tersebut merupakan reaksi kekecewaan kaum muda dalam situasi negerinya yang terjajah. Duijs membalikkan tuduhan kepada pemerintah bahwa tindakan melanggar konstitusi, jika hanya perbuatan semacam itu menyebabkan keempat orang itu ditahan dan dijatuhi hukuman. Padahal lebih dari lima bulan mereka ditahan sebelum diajukan ke pengadilan bahkan mereka dituntut hukuman dua tahun atau lebih.

Pembela sangat paham menghadapi kasus ini. Selanjutnya Duijs mengatakan bahwa penuntut harus menarik tuduhannya. Ia membela bahwa wajar jika ada suatu perlawanan karena akibat dari sistem kolonial yang sangat mengecewakan bagi rakyat Indonesia. Mr. Duijs mengatakan: "Saya berharap, pemerintah berani melihat, bahwa kebijaksanaannya sudah salah dan bersedia memperbaiki arah yang akan ditempuh, yaitu jika tidak menghendaki timbulnya kerusuhan di Hindia".⁸⁷

Secara langsung Duijs membenarkan tindakan tersebut karena reaksi yang wajar dari yang terjajah. Pada penutupan pembelaannya, ia

⁸⁶ J.E.W. Duijs, *Membela Mahasiswa Indonesia di Depan Pengadilan Belanda*, (terjemahan), Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 7-40.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 63. Pidato Marchant pada tanggal 5 Februari 1924, hlm. 605.

mengatakan bahwa semua orang yang memiliki rasa keadilan di negeri Belanda dan Indonesia sangat menantikan keputusan yang adil dan bijaksana dalam kasus ini. Lagi Duijs mengatakan:

“Apakah akan mendukung atau menghalangi suatu revolusi, dengan sendirinya, putusan anda akan tidak ada artinya sama sekali. Seseorang tidak dapat mengeringkan air lautan dengan sendok teh. Walaupun demikian, keputusan anda memang dapat menambah apa yang sudah sedemikian banyak terjadi, yaitu meningkatkan kebencian dan memperlebar jurang pemisah”.⁸⁸

Duijs menambahkan; “Hukuman di tangan pemerintah merupakan pedang bermata dua, jika salah digunakan ujungnya akan mengarah kepada jantung negara sendiri”.⁸⁹

Setelah Mr. Duijs menutup pembelaannya, keempat terdakwa masing-masing melakukan pembelaan. Namun pembelaan mereka terlalu panjang dan diharuskan ketik ulang atas permintaan pengadilan. Secara ringkas isi pembelaan tersebut berjudul *Indonesie Vrij* (Indonesia Merdeka) di dalam brosur Perhimpunan Indonesia.⁹⁰ Perhimpunan Indonesia mengecam kecurigaan pemerintah Belanda dan sangat memuji perjuangan pemuda Indonesia yang penuh tanggung jawab. Perhimpunan Indonesia yakin bahwa dengan bekerja disiplin dalam organisasi maka akan mengembangkan gerakan nasionalis di tanah air. Perhimpunan Indonesia menolak menggunakan kekerasan untuk memperoleh

⁸⁸ John Ingleson, *op.cit*, hlm.86.

⁸⁹ J.E.W. Duijs, *op.cit*, hlm. 132.

⁹⁰ Isi pembelaan Mohammad Hatta, dkk. dapat dibaca dalam lampiran III halaman 183.

kemerdekaan Indonesia. Hanya sekedar rencana tindakan kekerasan jika pemerintah mengabaikan tuntutan kemerdekaan.

Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa empat orang dari Perhimpunan Indonesia merencanakan dan menggunakan aksi kekerasan untuk menggulingkan pemerintah Belanda tidak terbukti. Meskipun demikian, pengadilan mengatakan pidato pembelaan mengandung kata-kata keras dan merencanakan suatu tindakan kekerasan. Namun pidato tersebut tidak termasuk tindakan kejahatan. Pengadilan Belanda tidak bisa memberikan hukuman kepada empat orang mahasiswa tersebut dengan alasan bahwa konstitusi Belanda hanya berlaku di negeri Belanda bukan di Hindia Belanda. Sehingga, keempat tokoh aktivis Perhimpunan Indonesia tersebut dibebaskan atas dasar tidak melanggar konstitusi yang dijalankan pemerintah Belanda.

Pembebasan tersebut merupakan sebuah kemenangan besar bagi Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, gerakan nasional tanah air bahkan rakyat Indonesia. Selain mereka percaya pada hukum di negeri Belanda, mereka berkeyakinan bahwa pemerintah telah mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sehingga dengan cepat perjuangan Indonesia Merdeka menyebar di tanah air bahkan di beberapa negara di Asia dan Afrika ikut mendukung perjuangan tersebut, tanpa harus propaganda.

2. Kegiatan Politik di Beberapa Negara Eropa

Sejak awal tahun 1925 bentuk kegiatan Perhimpunan Indonesia disusun dalam program-program yang jelas. Apalagi sebelumnya telah terbit *Gedenkboek* dan *Statement* Sukiman, maka rencana dan prioritas kegiatan harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, arah kegiatan politik Perhimpunan Indonesia adalah untuk mendukung gerakan di Tanah Air dan memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional. Perhimpunan Indonesia menyusun program-programnya secara tegas dan intensif. Dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal program kerja yang mencerminkan kesadaran politik dari anggota Perhimpunan Indonesia bahwa bangsa Indonesia harus bergandengan tangan dengan negara-negara lain. Maka, langkah kerja Perhimpunan Indonesia (*werkprogram*) yang dirumuskan dalam pasal-pasal (*Beginselprogram*) pada tahun 1925 adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 : Mempropagandakan asas-asas Perhimpunan lebih intensif terutama di Indonesia.
- Pasal 2 : Menarik perhatian internasional pada masalah Indonesia.
- Pasal 3 : Perhatian para anggota harus dibangkitkan buat soal-soal internasional dengan mengadakan ceramah-ceramah, berpergian ke negara-negara lain untuk studi dan lain sebagainya.⁹¹

⁹¹ Ali Sastroamidjoyo, *op.cit*, hlm. 48.

Pasal 4 : Pendirian dalam mengemukakan masalah kolonial secara murni dan terang-terangan, dalam perlakuan secara prinsipil dari bentuk-bentuk wujudnya harus dilihat satu-satunya pendirian paling tepat bagi kita.

Pasal 5 : Perubahan anggaran dasar.

Pasal 6 : Mendirikan suatu pusat perhimpunan.

Pasal 7 : Tindakan keuangan untuk berbagi-bagi tujuan.⁹²

Para anggota Perhimpunan Indonesia siap melaksanakan agenda program kerjanya. Setelah jabatan Sukiman Wiryosandjoyo diganti oleh Muhammad Hatta, maka sejak pimpinan Sukiman sebagai peletak dasar kegiatan politik sedangkan pimpinan Hatta sebagai pelaksana semua agenda kerja. Keputusan rapat anggota Perhimpunan Indonesia pada tanggal 17 Januari 1926, maka terpilih sebagai pengurus inti organisasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Mohammad Hatta

Sekretaris : Abdul Madjid Djoyodiningrat

Bendahara : Abutari

Komisaris : Sunaris dan Darsono

Anggota-anggota Perhimpunan Indonesia tersebar keluar Nederland, seperti Arnold Mononutu ditugaskan jadi wakil Perhimpunan Indonesia di Paris, dengan meninggalkan studinya untuk mempropagandakan cita-cita

⁹² Sunario, *op.cit*, hlm. 19.

kemerdekaan disegala lapisan masyarakat Perancis; Hatta dan Samsi Sastrowidagdo ke Denmark, Swedia, dan Norwegia, untuk mempelajari organisasi koperasi di sana; Ahmad Subardjo pergi ke London, mengadakan kontak dengan orang-orang dari India, Birma, Srilangka (Ceylon), dan negeri-negeri *British Commonwealth*; dan tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia lainnya yang mempopulerkan nama Indonesia dan gerakan kemerdekaan Indonesia di luar negeri.

a. Propaganda di Paris

Para anggota Perhimpunan Indonesia harus melaksanakan tiga pasal penting dari program dalam melakukan propaganda di luar negeri. Tujuan pertama adalah Perancis, Paris. Kota Paris merupakan kota pendidikan yang terkenal sejajar dengan kota-kota besar dunia pada saat itu seperti; Washington, New York, London, dan lain sebagainya. Sebagai kota pendidikan dunia, maka banyak sekali para mahasiswa yang datang dari berbagai negara termasuk negara belum maju seperti Asia dan Afrika. Salah satu tujuan kuliah para mahasiswa adalah Universitas "*La Sorbonne*" termasuk juga Arnold Mononutu kuliah di situ. Di universitas tersebut, banyak dimasuki oleh para mahasiswa dari Asia dan Afrika, karena banyak para mahasiswa datang dari negara-negara yang sedang terjajah. Termasuk pada saat perjuangan Perhimpunan Indonesia atas nama rakyat Indonesia untuk melepaskan diri dari ikatan penjajahan.

Pada tahun 1925 Perhimpunan Indonesia memberikan tugas kepada Arnold untuk melaksanakan propaganda politik di Paris. Hasil pertama yang diperoleh Arnold selama kegiatannya di sana adalah berdirinya organisasi pemuda Asia bernama; *Association Pour l'Etude des Civilisation Orientales* (Organisasi untuk Mempelajari Peradaban-peradaban Timur). Perkumpulan tersebut mengundang para ahli seni dan kebudayaan dari Paris, dengan demikian Arnold berhasil mendekati para ahli tersebut. Ternyata perkumpulan tersebut mengundang Perhimpunan Indonesia untuk mengadakan pertunjukan tari Jawa pada bulan Desember 1925. Perhimpunan Indonesia menunjuk Supomo dan Wirjono Prodjodikoro sebagai penari Jawa di Paris. Pertunjukan tersebut bagi Perhimpunan Indonesia merupakan mempermulus jalan untuk melaksanakan propaganda politik, supaya dunia internasional mengetahui bahwa Indonesia menuntut kemerdekaan politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Pada tahun 1926 Perhimpunan Indonesia kembali memberikan tugas kepada Arnold Mononutu untuk melakukan propaganda di Paris, baik sekedar berbincang-bincang, mengadakan ceramah atau seminar, hadir pada rapat yang bertaraf internasional, maupun menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi Asia. Arnold menjadi duta tidak resmi atau wakil Perhimpunan Indonesia selama di Paris untuk melakukan propaganda. Alasan memilih Arnold sebagai wakil Perhimpunan

Indonesia adalah karena ia sangat fasih berbahasa Perancis, memiliki hubungan yang luas dengan para diplomat negara-negara Asia maupun Eropa, dan Arnold seorang yang berani mengemukakan pendapat, walaupun baru pertama kali bertugas dalam forum internasional.

Tugas yang diemban Arnold cukup berat, namun ini adalah cita-cita dari semua anggota Perhimpunan Indonesia. Oleh sebab itu, selama di Paris ada dua tugas yang diberikan, pertama; harus mengadakan rapat, ceramah, seminar dan lain sebagainya, kedua; selama melaksanakan aktivitas, Arnold harus berkonsultasi dengan memberikan laporan tentang apa saja yang telah dilaksanakan kepada pengurus Perhimpunan Indonesia di Den Haag. Tujuannya adalah supaya para pengurus di Den Haag mengerti perkembangan kegiatan di luar negeri dan juga siap menjalankan strategi baru dalam propaganda selanjutnya.

Oleh sebab itu, Hatta menganjurkan agar Arnold melanjutkan studinya, maka ia memilih studi pada jurusan umum di *Ecole Libre de Sciences Politique et Morales* (Akademi Ilmu Politik dan Kemasyarakatan).⁹³ Di sana Arnold tinggal di hotel "*Du Progress*", di Latin *Quarte*, atau sama dengan kebanyakan tempat tinggal para mahasiswa dari Asia dan Afrika lainnya.

Di Den Haag, Arnold kuliah dalam bidang Hukum Leiden, namun atas kesadaran dari politik Perhimpunan Indonesia, maka ia

⁹³ Sudiyo, *op.cit*, hlm. 69.

menunda studinya. Langkah berikut yang diambil Arnold adalah bergabung dengan organisasi mahasiswa Asia. Tujuannya sudah jelas bahwa sebagai wadah perjuangan bersama dan menjalin komunikasi antara para mahasiswa Asia lainnya. Organisasi tersebut bernama "*Association de Students de L'Asia de Paris*" (Perkumpulan Pelajar-Pelajar Asia di Paris). Dalam kepengurusan ini, Arnold menjabat sebagai sekretaris, sedangkan ketuanya adalah Duong van Giauw (Vietnam), dia adalah seorang sarjana dan pengacara. Para anggotanya sendiri dari China (Kelompok Nasional Cina), India, Iran, Thailand, Kampuche (Kamboja), Vietnam, Indonesia, Philipina, dan sebagainya.

Sesuai dengan tujuan pengiriman tersebut, Arnold berhasil mendorong wakil dari mahasiswa negara-negara Asia untuk hadir dalam kongres di Bierviile pada tanggal 15 Agustus 1926. Dalam kongres di Bierviile, Hatta berhasil memikat peserta dengan pidatonya tentang masalah "Indonesia" terutama politik dan ketatanegaraan. Wakil dari Asia dan Afrika mendukung gerakan menuntut Indonesia merdeka tersebut. Sehingga, Arnold berhasil mempertemukan para mahasiswa Asia-Afrika selama propaganda di Paris dan dengan dipilihnya Arnold menjadi sekretaris di *Association de Students de L'Asia de Paris* (Perkumpulan Pelajar-Pelajar Asia di Paris). maka menunjukkan telah diakuinya peran dan kemampuan para mahasiswa Indonesia dalam forum internasional.

Keberhasilan tersebut berarti perjuangan untuk mencapai kemerdekaan tidak bisa berdiri sendiri, hal tersebut terbukti nantinya pada pengakuan dunia internasional kepada Kemerdekaan Indonesia. Semua tersebut berkat perjuangan para mahasiswa dikancah internasional.

b. Kongres Demokrasi Internasional di Bierville

Pada bulan agustus 1926 merupakan hari bersejarah bagi Perhimpunan Indonesia karena pada hari tersebut untuk pertama kali nama Indonesia diperkenalkan di dunia internasional. Perhimpunan Indonesia mengirimkan wakil-wakilnya untuk mengikuti *Congres Democratique Internationale Pour La Paix* (Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian), yang disponsori oleh *Comintern* di Berviile, Perancis.

Perhimpunan Indonesia dalam kongres tersebut mengirimkan Mohammad Hatta sebagai wakil. Kongres diadakan pada tanggal 15 Agustus 1926, dimana pesertanya selain dari Indonesia ada juga dari India, Tiongkok, Thailand, China, Mesir, negara-negara Afrika dan lain sebagainya.

Peraturan rapat dalam kongres memperbolehkan setiap anggota berpidato dua kali yakni pembukaan dan penutupan kongres. Ternyata Hatta tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Pidato Hatta mendapat sambutan baik dari para anggota dalam kongres. Hal tersebut baru pertama kalinya Perhimpunan Indonesia menghadapi forum internasional dengan

memperkenalkan masalah Indonesia dan tujuan Indonesia merdeka, karena di Bierviile bukan nama Hindia Belanda yang dibawa akan tetapi telah menggunakan nama Indonesia.

Keberhasilan memperkenalkan Indonesia di forum Internasional tersebut tidak hanya sampai di situ. Perhimpunan Indonesia juga berhasil membentuk suatu blok dengan organisasi mahasiswa nasionalis Asia lainnya.⁸⁸ Di dalam kongres golongan Asia mendapat kesempatan dan hak yang sama ketika mengemukakan pendapat. Delegasi Asia di dalam kongres terkenal dengan “Delegasi Asia” (*Delegation Asiatique*). Delegasi ini juga berhasil memajukan dua resolusi yang diterima oleh anggota kongres dengan suara bulat. Isi resolusi tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Kongres. Setelah memperhatikan bahwa krisis ekonomi dunia tidak dapat diatasi dengan tiada pertolongan Asia, bahwa pertolongan itu tidak mungkin apabila bangsa-bangsa Asia tidak diberi kebebasan untuk mengerjakan tugas rekonstruksi itu, peradapan dan perdamaian;

Memperhatikan lagi, bahwa penindasan bangsa-bangsa bertentangan dengan jiwa perdamaian. Meminta, sebagai suatu syarat mutlak untuk kerjasama bangsa-bangsa di dunia, kehormatan yang pasti

⁸⁸ John Ingleson, *op.cit*, hlm. 48. Dikutipnya dari Hatta, *Verhoor van Verdachten*, 8 November 1927, hlm. 22. Dokumen pengadilan P.I. kemudian bisa dibaca dalam artikel Hatta yang berjudul “*Onze Butenlansche Propaganda*” atau Propaganda Kami di Luar Negeri, *Suara Merdeka*, 1926. Diterbitkan lagi dalam *Portrait of ea Patriot*, hlm. 144-157.

kepada hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri, dengan tiada membedakan ras dan kepercayaan.

2. Memperhatikan bahwa perdamaian dunia yang kekal tidak mungkin dengan tiada membebaskan bangsa-bangsa yang tertindas. Kongres memberikan kekuasaan kepada masing-masing untuk kemerdekaan bangsa yang tertindas.⁸⁹

Kehadiran dan sebutan “Indonesia” yang diwakili Perhimpunan Indonesia dalam rapat kongres tersebut mendapat perhatian dan kritik dari pemerintah Belanda. Kehadiran mereka merupakan perjuangan kemanusiaan dengan perjuangan revolusioner untuk kemerdekaan bangsa. Maka, sesuai program Perhimpunan Indonesia untuk memperkenalkan Tanah Air Indonesia di luar negeri cukup berhasil. Nama “Indonesia” memang tidak dimajukan dalam dua resolusi tersebut, akan tetapi semua delegasi dan anggota kongres menyebut nama “Indonesia”. Para orang Belanda yang dalam pidato pembukaan menyebut “Hindia Belanda”, kata tersebut tidak diulangi mereka lagi ketika dalam perdebatan maupun dalam pembicaraan lainnya. Apalagi tulisan-tulisan yang keluar bukan lagi “*Indies Neerlanddaises*” akan tetapi “Indonesia”.⁹⁰

Pidato Hatta dalam forum tersebut telah menonjolkan “Indonesia” dalam artian politik bukan lagi dalam istilah ilmiah. Nama

⁸⁹ Mohammad Hatta, 1979, *op.cit*, hlm. 200.

⁹⁰ *Idem*, hlm. 201.

“Indonesia” dalam artian politik dimulai ketika perjuangan rakyat Indonesia dalam menuntut kemerdekaan dan membawa masalah Indonesia yang menderita dikuasai kolonial Belanda kepada dunia internasional. Pengertian “Indonesia” tidak lagi dalam arti kata ethnologi dan antropologi, melainkan memiliki arti politik tersendiri.⁹¹ Nama “Indonesia” melambangkan cita-cita kebangsaan nasional. Oleh sebab itu, Perhimpunan Indonesia-lah yang pertama kali memberikan arti nama politik dan ketatanegaraan nama “Indonesia” untuk bangsa Indonesia.

c. Kongres Anti Penindasan Kolonial di Brussel

Pada bulan Februari 1927, Perhimpunan Indonesia kemudian mengikuti Kongres Anti Imperialisme dan Penindasan Kolonial, di Brussel, Belgia. Kongres tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 10-15 Februari 1927. Delegasi Perhimpunan Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta, dengan anggotanya Nazir Pamundjak, Gatot Mangkupradja, Abdul Manab, dan Ahmad Subardjo.

Selain dari delegasi dari Indonesia turut hadir delegasi dari berbagai negara Asia dan Afrika, diantara adalah: Jawaharlal Nehru (Kongres Nasional India), Hafest Ramadan Bey (Ketua Partai Nasional Mesir dan Anggota Parlemen), Mazhur Bagal Sakri (Suriah), Hadh Ahmad Mossali (Wakil Kaum Muslimin Tunisia, Aljazair dan Maroko bernama “*Nort Afrika Stars*”), Chaldi ben Mustafa (Wakil Partai Destur

⁹¹ Sudiyo, *op.cit.* hlm. 63.

atau Partai Kristen Tunisia), Lomine Senghor (Ketua Komite Pembela Kepentingan Orang-orang Negro), dan Mohammad Hatta sebagai ketua delegasi dari Perhimpunan Indonesia yang ada di Eropa. Dalam kesempatan tersebut, semua wakil delegasi yang diberi kesempatan bicara baik tentang sejarah bangsanya maupun pergerakannya.

Isi pidato dan komentar tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia dalam kongres ternyata mendapat simpati dari negara-negara peserta. Masalah Indonesia menjadi penting dibicarakan karena Perhimpunan Indonesia merasa sesuai dengan tema yang ada di kongres. Terutama menyoroti permasalahan yang terjadi di Hindia Belanda, dimana Pemerintah Hindia Belanda meningkatkan kekejamannya setelah PKI gagal melakukan pemberontakan di Jawa Barat dan Sumatera Barat.

Kongres tersebut berhasil membuat sebuah resolusi setelah mendengarkan pendapat dari berbagai delegasi tentang kolonialisme yang terjadi di negaranya. Kongres dari tanggal 10-15 Februari 1927 itu memutuskan, bahwa:

1. Tenaga beli rakyat berkurang kira-kira 15%
2. Upah buruh kira-kira 15 % dari pada upah buruh Eropa.
3. Keperluan rakyat yang sangat penting, seperti pendidikan dan kesehatan, terlalu diabaikan;

4. Organisasi rakyat dan partai-partai yang menentang keadaan yang buruk itu ditindas dengan kekerasan, umpamanya Serikat Rakyat dan Serikat Buruh Kereta Api di larang mengadakan rapat;
5. Yang disebut “perubahan” sebenarnya adalah suatu jalan yang dipakai oleh imperialisme Belanda untuk meneruskan penindasan dan menipu rakyat;
6. Terorisme politik gubernur-gubernur Belanda menuduh secara tidak benar segala oposisi sebagai “komunis” atau Moskowit;
7. Politik luar negeri yang disebut netral oleh imperialisme Belanda dalam keadaan sekarang di Timur Jauh tidak memuaskan kepentingan imperialisme kerajaan lain, melainkan sebaliknya mengidupkan nafsu mereka untuk memiliki Indonesia, yang dalam strategi begitu penting, jadinya suatu Indonesia di bawah kekuasaan Belanda menjadi suatu faktor yang dapat menimbulkan suatu Perang Dunia Baru, yang bahayanya dapat dihindarkan dengan adanya suatu pergerakan revolusioner untuk kemerdekaan di Indonesia, menyatakan dengan ini pendapat kongres, bahwa kebebasan pergerakan perlu untuk banggunya rakyat Indonesia dan sekaligus juga suatu peristiwa yang penting bagi perikemanusiaan dan dengan itu memutuskan:

- a. Menumpahkan simpati sepenuhnya kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia dan membantu perjuangan itu dengan segala tenaga.
- b. Menuntut supaya Pemerintah Belanda memberikan kemerdekaan sepenuhnya kepada Bangsa Indonesia, menghapuskan pembuangan dan hukuman mati dan memberi amnesti umum.⁹²

Setelah kongres melihat perkembangan rapat yang semakin penting untuk diselenggarakan, karena banyak peserta delegasi mengemukakan masalah kolonialisme belum semuanya tuntas. Maka, kongres memutuskan akan membentuk organisasi yang permanen supaya bisa menjadi fasilitator permasalahan-permasalahan yang menyangkut kolonialisme dari setiap negara terjajah. Organisasi tersebut diberi nama “Liga Anti-Imperialisme, Anti-Penindasan Kolonial dan Pro Kemerdekaan Nasional”. Dalam organisasi tersebut, Perhimpunan Indonesia diwakili Mohammad Hatta yang terpilih sebagai anggota. Dalam organisasi yang telah terbentuk, maka dibentuk kembali badan-badan pelengkap organisasi. Duduk sebagai anggota eksekutif adalah seperti Nehru (India), Liao (China), Senghor (Afrika), Muzenberg (Jerman), Dr. Marteu (Belgia), Ugarte (Amerika Latin), Laushury

⁹² Mohammad Hatta, 1979, *op.cit*, hlm. 207-208. Kemudian baca dalam Arnold Mononutu. *Potret seorang Patriot*, Gunung Agung, Jakarta, 1981, hlm. 60, dan Ali Sastroamidjoyo, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*, PT. Kinta, Jakarta, 1974, hlm. 50.

(Inggris), dan Edo Fimmen (Negeri Belanda). Kemudian dibentuk lagi komisi, terdiri atas Nansen, Bernard Shaw dan Henri Barbusse. Mereka diberi tugas untuk menyelidiki penyebab terjadinya pemberontakan komunis di Indonesia. Duduk sebagai ketua kehormatan dalam “Liga” ini adalah Prof. Albert Einstein. Berarti organisasi ini benar-benar memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) akibat penindasan kolonial dan imperialisme. Tokoh-tokoh yang masuk dalam liga adalah rata-rata dari kalangan sastra, budaya dan politikus dunia.

Kongres belum bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dari delegasi. Oleh sebab itu, kongres memutuskan melanjutkannya pada tanggal 20-27 Juli 1927, di Frankfrut, Jerman. Namun, sudah diprediksi bahwa kongres yang kedua akan gagal. Hal tersebut terbukti setelah rapat kongres semua keputusan didominasi suara dari wakil-wakil dari Rusia. Perlu diketahui bahwa wakil-wakil dari Rusia berpijak pada garis Moskow yang menghendaki pimpinan bukan dari kalangan nasionalis. Garis Moskow sudah meletakkan dasar bahwa komunis harus menjadi pemimpin, dan melarang keras kepada semua anggotanya meletakkan jabatan apa pun kepada kaum nasionalis. Sehingga liga tersebut lebih mementingkan delegasi Rusia dari pada kepentingan dari delegasi-delegasi lain. Kongres liga yang kedua ini tidak menghasilkan keputusan yang penting dari pada liga yang pertama. Maka, Hatta mengatakan, bahwa: “Suatu gelombang pasang fanatisme muncul

dari pihak yang sangat mewakili komunis, yang mengancam akan menelan segala yang tidak mencerminkan perasaan, pikiran, dan cara kerja komunis”.

Kaum nasionalis memandang dari sudut pandang lain dari sudut pandang komunis, adalah:

“Bagi kaum nasionalis, kehadiran mereka di kongres itu adalah pertama-tama untuk mempropagandakan negara mereka, dan kedua untuk memelihara hubungan satu sama lain dan saling memberi informasi tentang penderitaan dan kebutuhan masing-masing, tentang perjuangan dan taktik masing-masing, dan pengalaman serta kesalahan masing-masing”.⁹³

Hal tersebut dikarenakan antara kaum Komunis dan Nasionalis tidak pernah bertemu dalam satu pikiran, karena komunis sangat berkiblat pada Komunis Moskow, pimpinan Stalin. Diketahui bahwa yang menjadi promotor utama dalam “Liga” adalah *Comintern* dan kaum nasionalis yang memimpin, maka komunis menyebutnya dengan “Burjuasi Nasional”. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan asas “Liga” karena kongres tersebut menghendaki agar organisasi internasional tersebut menentang kolonialisme dan imperialisme.

Hatta mengatakan kedudukan Perhimpunan Indonesia dalam liga tidak penting lagi, karena mungkin tidak lama lagi akan bubar, maka perlu mengambil langkah awal berikutnya. Namun PI masih aktif menjadi anggota Liga Internasional dan Liga Cabang Belanda yang telah dibentuk

⁹³ John Ingleson, *op.cit*, hlm.52-53. Mengutip dalam Indonesia Merdeka pada tahun 1929 dan dimuat kembali dalam *Portrait of Patriot*, hlm. 200-204.

pada bulan Juli 1927. Praktek seperti itu, menurut Hatta kecil kemungkinan untuk lebih memperkenalkan masalah Indonesia menuntut kemerdekaan, karena dengan alasan lambat laun organisasi tersebut akan bubar dari politik.

Memang pada kenyataannya anggota Perhimpunan Indonesia memang dipengaruhi paham Marxis dan bersedia bekerjasama dengan organisasi manapun yang menaruh perhatian dengan tujuannya. Namun setelah Hatta dan teman-teman tahu bahwa komunis hanya memanfaatkan Liga Menentang Imperialisme untuk kepentingan Moskow, maka Perhimpunan Indonesia mengundurkan diri.⁹⁴ Baru tahun 1930-an, Perhimpunan Indonesia memang menjadi organisasi komunis yang mendominasi. Namun, arti penting Perhimpunan Indonesia bagi pergerakan kebangsaan Indonesia tidak ada lagi.

Pandangan Perhimpunan Indonesia terpengaruh komunis sangat menyulitkan kegiatan politik selanjutnya. Sebelumnya Pemerintah telah menduga bahwa hubungan Perhimpunan Indonesia dengan Partai Komunis Belanda (*Comintern*) dan organisasi yang disponsornya, mendapat kecaman dari Pemerintah Belanda dan Pemerintah Kolonial Belanda.

Perhimpunan Indonesia menganggap bahwa pengaruh *Comintern* tidak memberikan sumbangan kepada perjuangan mereka, selain hanya

⁹⁴ *Idem.*

menjadi alat bagi tujuan organisasi mahasiswa lain. Namun kenyataannya Perhimpunan Indonesia-lah yang memanfaatkan organisasi tersebut untuk tujuan propaganda nasional Indonesia. Perhimpunan Indonesia sungguh bergerak nasionalis dan berbeda dengan tuduhan pemerintah Belanda bahwa Perhimpunan Indonesia alat Moskow atau sebagian dari Komunis.

d. Pidato Muhammad Hatta di Gland

Propaganda yang dilaksanakan Perhimpunan Indonesia tentang “Indonesia” memang cukup berhasil. Hal tersebut terbukti, ketika Hatta sebagai ketua perhimpunan mendapat undangan dari Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kemerdekaan, untuk memberikan ceramah pada Konferensi Vakansi Internasional tersebut. Konferensi akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1927, di Gland, Swiss. Pengundangnya bernama Ny. Henriette Roland Holst. Judul pidato Hatta adalah tentang “*L’Indonésie et son Problème de l’Indépendance*” (Indonesia dan Masalah Kemerdekaannya). Nehru dari India juga turut diundang untuk memberikan ceramah tentang keadaan dan permasalahan di India.

Pada kesempatan itu, Wakil Kepala Departemen Perburuhan di Hindia Belanda dari *Volkenbond* di Genève, turut hadir dalam konferensi. Dalam-konferensi tersebut terjadi perdebatan antara Hatta dengan wakil Perburuhan Hindia Belanda, dan yang menjadi penengah adalah Ny. Henriette Roland Holst. Pada ceramahnya, Hatta mengemukakan tentang

“*rassenjustitie*” (dua macam pengadilan) yang diberlakukan Hindia Belanda kepada penduduk di tanah air.

Secara jelas Hatta menolak atas tulisan yang dikemukakan oleh penulis Perancis, E. Fallot, dengan pidatonya berjudul *Indonesia and Her Independence Problem* (Indonesia dan Masalah Kemerdekaannya), kutipannya adalah sebagai berikut:

“Aksi yang diselenggarakan oleh suatu bangsa beradab terhadap suatu negeri yang berperadaban kurang dari bangsa tadi, dengan tujuannya mengubahnya secara berangsur-angsur dapat mengembangkan sumber-sumber alamnya serta mengadakan perbaikan dalam hal material dan moralnya”.⁹⁵

Hatta membantah dengan mengatakan bahwa dimana saja penjajahan tersebut merupakan penggunaan kekuasaan dan ketamakan bangsa-bangsa yang lebih kuat dalam hal materi untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan perdagangannya dengan mengorbankan bangsa-bangsa yang lemah.

Secara keseluruhan isi dari tulisan Hatta mencoba menggambarkan tentang sejarah Indonesia. Ia mengatakan bahwa kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia, seperti Majapahit dan kepahlawanan rakyat Aceh dari penjajah Belanda. Kemudian Hatta menjelaskan penjajahan Belanda menyebutnya “cara biadab” untuk merekrut para kuli perkebunan dan kontrak yang sangat mengikat mereka. Hatta mengatakan:

⁹⁵ Deliar Noer, *op.cit*, hlm. 69.

“Selalu dikatakan bahwa perbudakan telah dihapuskan seluruhnya sejak lebih dari setengah abad. Tetapi di Indonesia, sungguh pun telah ada segala macam perjanjian internasional, penduduk seperti ini masih dijumpai dalam bentuk yang modern dipertahankan atas nama agama Kristen oleh satu di antara bangsa-bangsa di Eropa Barat dan yang mengaku negara beradab”.⁹⁶

Pernyataan penting dari Hatta yang berkaitan dengan masalah pergerakan nasional Indonesia adalah penolakan bahwa kata “Indonesia” berada di bawah politik Belanda. Atau pertentangan antara hubungan Belanda dengan Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan pendapat dari Prof. van Vollen Hoven, mengatakan bahwa “Kata ‘Indonesia’ tidak dapat dipergunakan sebagai penamaan politik bagi daerah yang dikuasai Belanda di Asia Tenggara”.

Namun, Hatta menolak pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa karena penduduk daerah kekuasaan Hindia Belanda tidak mencakup semua orang yang termasuk orang Indonesia (katanya hanya 49 juta dari 66 juta jiwa). Kemudian Hatta mengatakan lagi bahwa sebaiknya Van Vollen juga melihat Amerika Serikat dan Jerman.

Hatta mengkritik habis tentang terbaikannya pendidikan, terjadinya diskriminasi, tekanan politik, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi di Indonesia yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal. Sedangkan perjuangan dan pemberontakan kaum nasionalis selalu dituduh pelanggaran hukum dan di buang ke Digul, khususnya yang terjadi di

⁹⁶ *Idem.*

Banten dan Minangkabau. Namun, Hatta tetap percaya bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia akan tercapai.

e. Pidato Muhammad Hatta di Utrech

Pidato Muhammad Hatta dilakukannya ketika berada di dalam Perkumpulan Mahasiswa Indologi, di Utrech, pada tahun 1930.⁹⁷ Pidato ini tidak kalah pentingnya untuk menunjukkan bahwa Indonesia tetap siap untuk merdeka. Oleh sebab itu Hatta mengatakan bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia berkaitan erat dengan bangkitnya bangsa-bangsa lain di dunia, terutama bangsa-bangsa Timur, gerakan radikal tahun 1920 dan pengaruh Mustafa Kamal dari Turki, dalam pergerakan kemerdekaan di Indonesia yang tumbuh radikal.⁹⁸

Pada kesempatan ini Hatta juga memuji pimpinan Serikat Islam yang berhasil mengatasi politik Gubernur Jenderal Indenburg yang mengakui Serikat Islam secara lokal dengan mengadakan sentralisasi. Tentang perjuangan dari pergerakan di tanah air, Perhimpunan Indonesia tidak berharap banyak dengan munculnya rasa persatuan di tanah air. Sehingga, Hatta menaruh keraguan terhadap PPPKI, tetapi ia yakin kemerdekaan pasti terjadi terhadap Indonesia.

Hatta juga menolak pendapat J.J Schrieke "*De Indische Politiek*, dan A. Kuypem, pemimpin *Anti Revolutionnare Partij*. Mengutip

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 70.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 71



pendapat Lothrop Stoddard (dalam *The New World of Islam*), Hatta mengatakan: “Nasionalisme dalam kepercayaan yang dianut oleh sejumlah individu yang jumlahnya cukup besar bahwa mereka merupakan suatu bangsa (*nationality*); ia merupakan kesadaran tentang keterikatan mereka sebagai satu bangsa (*national*).”⁹⁹

Selanjutnya Hatta menambahkan bahwa pergerakan nasional pada awalnya dilakukan oleh beberapa orang, namun dari pendapat Toynbee dengan tegas mengatakan bahwa semua gerakan bersama dimulai oleh individu-individu dan diselenggarakan terutama oleh suatu minoritas aktif, sedangkan massa mengikuti dari belakang.¹⁰⁰

Pergerakan nasional harus memerlukan *non cooperation*. Oleh sebab itu Hatta mengatakan: “Politik non-cooperation sekarang membutuhkan penguasaan kewajiban-kewajiban dalam dada mereka, membangun insan merdeka dalam tubuh mereka dan menunjukkan kepada mereka jalan pulang ke pergaulan bangsa sendiri”.¹⁰¹

Sehingga Hatta menilai bahwa Badan Perwakilan politik Belanda hanyalah semu, karena yang memilih hanya terbatas pada orang-orang Belanda dan juga orang Indonesia yang melek huruf. Dewan kota dan propinsi disediakan untuk orang Belanda, rakyat sama sekali tidak memiliki suara dalam Dewan Perwakilan Propinsi (*Provinciale raad*).

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 72.

¹⁰⁰ *Idem*.

¹⁰¹ *Idem*.

Dewan rakyat merupakan perwakilan kaum kalangan atas yakni terdiri dari kaum terpelajar dan pegawai-pegawai bangsa Indonesia, karena dipilih Dewan-Dewan Daerah, sedangkan lainnya diangkat oleh Gubernur Jenderal.

Perjuangan propaganda-propaganda Perhimpunan Indonesia di luar negeri memang berhasil membawa nama Indonesia ke dunia Internasional, sehingga dunia mengetahuinya. Sehingga berbagai kesempatan untuk memperkenalkan Indonesia dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Tanah Air, menjadi pendukung gerakan perjuangan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda maupun di Tanah Air kelak.

Bagi bangsa-bangsa Eropa, Afrika dan Asia, perjuangan Perhimpunan Indonesia untuk kemerdekaan nasional bangsa Indonesia dari pemerintahan kolonial Belanda, memang telah mendapat simpati yang serius. Hal tersebut terbukti ketika Hatta mendapat undangan untuk memberikan ceramah tentang permasalahan kemerdekaan Indonesia di Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kemerdekaan tersebut.

B. Kegiatan Politik Perhimpunan Indonesia di Indonesia

1. Hubungan Perhimpunan Indonesia dengan Tanah Air

a. Rencana Pembentukan Partai Nasional Baru

Para pengurus Perhimpunan Indonesia selain mengadakan propaganda di negeri Belanda dan negara-negara Eropa, juga mendukung gerakan kemerdekaan tanah air. Langkah awalnya dengan pembentukan Partai Nasional Baru di tanah air. Pengurus Perhimpunan Indonesia pada dasarnya setuju untuk mendirikan partai tersebut. Maka pada akhir tahun 1926, mereka mengadakan rapat untuk mendiskusikan rencana pembentukan sebuah Partai Nasional Indonesia. Oleh sebab itu, Hatta mengajukan program-program dan resmi diterima sebagai kebijakan Perhimpunan Indonesia pada 23 November 1926. Program tersebut mengajukan pembentukan sebuah *Indonesische Nationalistische Volkspartij* (Partai Rakyat Nasional Indonesia). Anggaran dasarnya meliputi bidang politik, sosial dan ekonomi. Ringkasan isinya adalah sebagai berikut;

a. Politik

1. Hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Indonesia.
2. Suatu bentuk pemerintahan Indonesia di masa depan atas dasar demokrasi murni dengan masyarakat pedesaan sebagai unsur penting.

3. Kebebasan pers dan hak mengadakan perserikatan dan pertemuan tanpa larangan.
4. Dihapuskannya “wewenang istimewa” Gubernur Jenderal.
5. Hak pilih untuk semua.

b. Ekonomi

1. Memajukan koperasi pertanian dan bank-bank pinjaman untuk rakyat.
2. Memajukan industri nasional berdasarkan koperasi.
3. Penghapusan sistem sewa tanah.
4. Penghapusan tanah partikelir.
5. Peraturan yang adil untuk kebijakan perpajakan dengan membebaskan pungutan pajak bagi petani yang luas tanahnya kurang dari setengah bahu (1,75 a).

c. Sosial

1. Undang-undang sosial; penghapusan *poenale sanctie*; 8 jam kerja dalam sehari.
2. Penghapusan sama sekali praktek riba.
3. Pembinaan pendidikan nasional.
4. Perbaiki kesehatan masyarakat.

Sebagai gambaran partai yang diharapkan nanti, bahwa partai tersebut harus menyerupai pergerakan Perhimpunan Indonesia, dalam arti dasar dan tujuannya melakukan politik untuk tanah air Indonesia. Partai

tersebut harus moderat, *non-cooperation* dan tanpa agitasi dengan mendorong ke arah organisasi. Partai ada dalam kongres, wakil-wakilnya yang duduk di dalam kongres harus dipilih oleh rakyat. Sedangkan partai-partai yang telah ada sebelumnya, partai yang kooperasi boleh masuk menjadi anggota kongres, asalkan dipilih oleh rakyat. Kongres menyerupai Dewan Rakyat yang sebenarnya karena disitulah tempat wakil rakyat bersuara. Oleh sebab itu, semua anggota Perhimpunan Indonesia yang telah selesai dalam studinya pulang ke tanah air harus masuk menjadi anggota partai yang akan dibentuk tersebut. Partai baru tersebut harus berkembang dengan jalan pendidikan kader, sehingga tercapai tujuan mendirikan negara dalam negara. Langkahnya adalah mendirikan Indonesia di sebelah Hindia Belanda, hal tersebut berdasarkan politik *non-cooperation*.

Langkah pembentukan Partai Nasional Indonesia baru tersebut, merupakan reaksi kegagalan PKI melakukan pemberontakan.¹⁰² Pada bulan November 1926, melalui Komite Revolusioner PKI melancarkan pemberontakan di Jawa Barat dan Januari melakukan aksi yang sama di pantai Barat Sumatera. Pemberontakan tersebut gagal karena hanya didukung sebagian rakyat. Sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda

¹⁰² Mohammad Hatta, 1979, *op.cit*, hlm. 203.

membubarkan partai tersebut dengan menganggap partai tersebut sebagai sebuah partai terlarang.

Perhimpunan Indonesia melalui Kantor Berita Indonesia mengeluarkan pernyataan pers pada bulan April 1927, isi pernyataan tersebut adalah sebagai berikut: “Kegagalan dari Revolusi Indonesia ini tidak menjadi halangan bagi jalan kita menuju kemerdekaan Indonesia tetapi memberi kita pelajaran dari banyak sekali pengalaman untuk membentuk organisasi yang lebih baik dan melakukan aksi dengan lebih seksama”.¹⁰³

Pernyataan-pernyataan Perhimpunan Indonesia lewat pers bernada keras dengan memberikan semangat kepada rakyat Indonesia. Seperti rakyat Indonesia tidak akan berhenti memperjuangkan kemerdekaan tanah air sebelum mendapat kemerdekaan. Mereka rela mengorbankan apa saja, bila perlu jiwa dan harta. Mereka tidak akan gentar untuk berjuang, melainkan lebih mantap, lebih kuat, dan lebih kuat lagi.¹⁰⁴

Pertemuan Hatta dengan Semaun adalah menindaklanjuti penjelasan ide-ide Semaun ketika bertemu dalam diskusi dengan para anggota Perhimpunan Indonesia. Semaun mendesak pembentukan sebuah partai nasionalis baru berdasarkan prinsip non kooperasi dan swadaya, dan

¹⁰³ John Ingleson, *op.cit.*, hlm. 56.

¹⁰⁴ *Idem.* Mengutip dalam pernyataan pers Kantor Berita Indonesia yang berjudul, *After the Insurrection In Indonesia* (Setelah Pemberontakan di Indonesia), April 1927. Pidato tersebut menggunakan Bahasa Inggris.

khusus ditujukan untuk membentuk “negara dalam negara” dan akhirnya mengorganisasikan revolusi untuk menggulingkan Belanda. Rencana Semaun tersebut dinamakan rencana induk untuk organisasi nasional yang baru di Indonesia, yang disebut; “*Organisatie-Plan Voor Onze Nationale Beweging*” (Rencana Organisasi untuk Gerakan Nasional Kita), diserahkan oleh Semaun kepada Hatta untuk diterima Perhimpunan Indonesia.

Menurut rencana Semaun, organisasi tersebut harus bergerak dua arah; pertama, aksi terang-terangan seperti pendidikan dan kerja sosial; kedua, merongrong penguasa dengan membentuk suatu kekuatan tempur nasional melalui aksi bawah tanah.¹⁰⁵ Rencana kedua dianggap Semaun paling penting. Anggapannya bahwa organisasi yang kokoh dan kuat memerlukan anggota inti yang kuat, dengan menekankan sisi kualitas, bukan kuantitas. Sebagai pusatnya partai adalah di Bandung, baru kemudian dibuka di setiap ibukota keresidenan. Pergerakan dilakukan di semua residenan, karena akan membuat kolonial Belanda kalah.

Setelah melalui diskusi dan pertukaran pikiran, ternyata Hatta menolak rencana pembentukan partai nasional tersebut. Semaun merasa kecewa karena rencana tersebut langsung ditolak, bukan melalui pertimbangan terlebih dahulu. Alasan Hatta menolaknya adalah karena aksi Semaun terlalu berhaluan ideologi komunis dan melakukan aksi

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 60.

dengan kekerasan sebagai cara terbaik untuk menuju sasarannya yang ingin dicapai. Apa yang dikatakan Mohammad Hatta ketika menolak rencana Semaun, sebagai berikut:

“Rencana yang disusun oleh Semaun bertentangan dengan pandangan saya sendiri dalam hal bagaimana kemerdekaan harus dicapai. Menurut rencana saya rakyat melalui peningkatan pendidikan, harus dituntun secara bertahap ketinggian perkembangan yang dapat membawa kepada suatu kehidupan yang merdeka. Tetapi, cara Semaun adalah menentukan rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa yang ada melalui aksi bawah tanah”.¹⁰⁶

Rencana Hatta meninggalkan aksi kekerasan mencapai Indonesia merdeka merupakan keyakinan tercapainya tujuan tersebut. Hatta mengharapkan aksi tanpa kekerasan yakni dengan menyiapkan masyarakat melalui pendidikan, baik politik, sosial, ekonomi, maka rakyat sadar dengan kondisinya, maka dengan perlahan namun pasti kemerdekaan tersebut akan tercapai.

Walaupun Muhammad Hatta menolak rencana Semaun, melainkan memilih rencananya sendiri, maka pada tanggal 5 Desember, Muh. Hatta dan Semaun menandatangani suatu konvensi, masing-masing atas nama Perhimpunan Indonesia dan Partai Komunis Indonesia.¹⁰⁷ Konvensi tersebut hanya terdiri dari empat kausal pendek, sebagai berikut:

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 61. Ia mengutip dalam Mohammad Hatta, *Verhor van Verdachten*, 2 November 1927, Dokumen Pengadilan PI.

¹⁰⁷ *Idem*. Dikutipnya dari *Conventie Tuschen de Heeren Semaun en Mohammdt Hatta, Gesloten te's Gravenhage Den Vijfden*, Desember 1928 dan terjemahannya di lampiran 3, hlm. 179.

Pasal 1. Perhimpunan Indonesia yang akan berkembang menjadi suatu Partai Rakyat Nasional Indonesia, berjanji akan bekerja dalam bidang politik dan sosial untuk kepentingan rakyat Indonesia. PI mesti mengambil dalam tangannya pimpinan umum dan tanggungjawab sepenuh-penuhnya tentang pergerakan rakyat Indonesia. Bidang sosial meliputi pendidikan rakyat, kesehatan rakyat dan segalanya yang berguna untuk memperkuat tenaga rakyat.

Pasal 2. PKI mesti mengakui pimpinan PI sebagai yang tertulis dalam pasal 1 dari konvensi ini, dan mesti memberikan kepadanya kepercayaan sepenuh-penuhnya. PKI dan organisasi-organisasinya yang berada di bawah pimpinannya berjanji tidak sekali-sekali akan mengadakan oposisi terhadap pergerakan rakyat nasional yang dipimpin oleh PI, selama PI konsekuen menjalankan politik menuju kemerdekaan Indonesia.

Pasal 3. Segala percetakan yang sampai sekarang kepunyaan PKI mesti diserahkan kepada PI atas syarat-syarat yang akan ditentukan kelak. PI berjanji akan mengorganisasi pers nasional.

Pasal 4. Konvensi diperbuat dalam enam lembar masing-masing pihak memperoleh tiga lembar.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Mohammad Hatta, 1979, *op. cit*, hlm. 204.

Konvensi tersebut merupakan kesepakatan pribadi antara Muhammad Hatta dan Semaun tanpa sepengetahuan pengurus Perhimpunan Indonesia dan *Comintern*.¹⁰⁹ PKI sebenarnya semakin terdesak oleh pemerintahan Belanda, maka atas nama PKI Semaun pun setuju Perhimpunan Indonesia memimpin gerakan nasionalis. Muhammad Hatta juga mengatakan bahwa konvensi semacam itu cocok dengan tujuan membentuk organisasi masa di Indonesia, adalah:

“Saya membuat konvensi semacam itu karena saat ini masa rakyat di Hindia Belanda berada di bawah pengaruh PKI, dan bahwa tujuan saya ialah menghilangkan pengaruh tersebut dan membawa masa rakyat ke bawah pengaruh organisasi kita dan dengan demikian di bawah pengaruh nasionalisme murni”.¹¹⁰

Konvensi tersebut diakhiri Semaun pada tanggal 19 Desember 1927 setelah dibatalkan oleh *Comintern*. Walaupun konvensi hanya sebagai keinginan Perhimpunan Indonesia dan PKI, namun sumbangannya dalam politik nasional Indonesia dapat memberikan suatu keteguhan perjuangan selanjutnya.

Sejak bulan April 1926, Sudjadi telah mulai melaporkan setiap kegiatannya kepada Perhimpunan Indonesia. Bertepatan dengan surat Sudjadi tanggal 15 April 1926 yang ditujukan kepada pengurus Perhimpunan Indonesia, melaporkan bahwa beberapa anggota Budi

¹⁰⁹ *Idem*. Dijelaskan bahwa konvensi tersebut disaksikan pula oleh Abdul Madjid Djyoadingrat, Abdul Madjid merupakan tokoh penting dalam pergerakan Indonesia dan nasionalis murni walaupun akhirnya ia menjadi seorang komunis.

¹¹⁰ John Ingleson, *op.cit*, hlm. 62. Dalam *Verhoor van Verdachten*, 8 November 1927, Dokumen Pengadilan PI.

Utomo telah berjanji mendukung buah pikiran Perhimpunan Indonesia dan menyatakan rencananya untuk menyebarluaskan propaganda pada rapat-rapat Budi Utomo.¹¹¹ Kemudian pada bulan Mei 1926 Sudjadi dan Arnold melaporkan kembali perkembangannya, namun hasilnya kurang mengembirakan bagi Perhimpunan Indonesia. Dari laporan tersebut diketahui bahwa tidak ada dukungan penuh dari Budi Utomo karena menjalankan sikapnya masing-masing. Seperti yang dikatakan Sudjadi bahwa sekarang saya tidak bisa mengharapkan banyak dari Budi Utomo, 99 persen anggotanya adalah orang-orang *Jan Compagnie*, pengaruh tersebut yang ditanamkan hanya bersifat sementara saja.¹¹²

Sudjadi juga menjalin hubungan baik dengan para mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum (*Rechts-Hoogsechool*) dan Sekolah Kedokteran (STOVIA) di Batavia. Ia mengajukan agar mereka tidak masuk dalam Jong Java, dengan alasan bahwa Jong Java tidak cocok dengan kegiatan politik Perhimpunan Indonesia. Dari surat menyurat Muhammad Hatta pada tanggal 9 Februari 1926, menyarankan agar membujuk para alumni Perhimpunan Indonesia yang pulang ke tanah air untuk lebih aktif terlibat secara langsung dalam bidang politik, maka sebaiknya alumni membentuk suatu Partai baru. Dalam surat menyurat tersebut Muhammad Hatta mengatakan bahwa: “Karena itu hak saya mohon bantuan pengurus

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 39-40.

¹¹² *Idem*.

Perhimpunan Indonesia untuk menghimbau alumninya agar bersatu dalam suatu organisasi baru di tanah air, yang akan berbuat lebih banyak untuk kepentingan rakyat dibandingkan organisasi-organisasi yang sudah ada”.¹¹³

Pendapat tersebut telah ada ditujuan program Perhimpunan Indonesia sejak awal dan selama berbulan-bulan telah ada rencana membentuk partai nasional baru yang membawahi semua aliran politik yang telah ada. Gambaran organisasi tersebut harus menunjuk pada suatu organisasi yang benar-benar nasionalis. Sehingga J.D. Legge mengatakan bahwa nasional “Sekuler” dalam artian tidak mencari landasan Islam ataupun ideologi komunis.¹¹⁴

Atas inisiatif alumni Perhimpunan Indonesia yang telah memiliki keberanian yang ada di Surabaya, Batavia dan Bandung membentuk sebuah kelompok studi di Indonesia.¹¹⁵ Kelompok studi tersebut merupakan langkah awal yang sangat penting bagi persatuan Indonesia. Khususnya kelompok studi di Bandung sangat berperan besar dalam proses pembentukan organisasi baru tersebut.

b. Penyusupan Kedalam Partai Politik

Salah satu dasar kerja dari pada Perhimpunan Indonesia adalah mempropagandakan asas-asas perhimpunan lebih intensif terutama di

¹¹³ *Ibid*, hlm. 41. Dikutipnya dalam surat Sudjadi kepada Hatta tanggal 12 April 1926.

¹¹⁴ John. D. Legge, *Sukarno Sebuah Biografi Politik*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985, hlm.13.

¹¹⁵ Sunario, *op.cit*, hlm. 48.

Indonesia. Pernyataan untuk memperkenalkan cara perjuangan tersebut, telah disampaikan baik dalam rapat-rapat, diskusi maupun dalam kesempatan apa saja. Harapannya para pengurus Perhimpunan Indonesia yang telah menyelesaikan studinya yang pulang ke tanah air, segera mempengaruhi bentuk-bentuk perjuangan dengan ideologi dan cita-cita Perhimpunan Indonesia. Diharapkan pula para alumni setibanya di tanah air segera bergabung dengan partai-partai politik yang ada, menanamkan pengaruhnya dikalangan anggotanya dan berupaya membujuk agar mereka menerima ide-ide Perhimpunan Indonesia.

Anjuran tersebut menandakan bahwa Perhimpunan Indonesia bukan lagi organisasi sosial-budaya yang menjadi *image* sebelumnya, akan tetapi sejak tahun 1923, Perhimpunan Indonesia telah menjadi organisasi politik yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh pemerintah Belanda. Perhimpunan Indonesia juga telah menjadi pusat kemajuan gerakan Nasional Indonesia. Sehingga diharapkan dari semua alumni yang telah pulang ke Hindia Belanda harus bergabung dengan rakyat dan berjuang bersama rakyat seaktif mungkin.

Pandangan anggota Perhimpunan Indonesia, para aktivisnya adalah kumpulan calon-calon pemimpin yang cakap jika dibandingkan dengan para pemimpin partai Hindia Belanda. Alasannya karena lulusan Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda dibekali semangat, jiwa

kepemimpinan dan pengetahuan yang luas karena tinggal jauh dari kekuatan kolonial. Oleh sebab itu, Muhammad Hatta mengatakan bahwa:

“Seperti pendaki gunung pada puncak bukit, ia akan memiliki pandangan yang lebih baik atas daratan di bawahnya dari pada orang-orang yang tinggal di dataran tersebut, begitu posisi yang lebih baik untuk menentang situasi kolonial di bandingkan rakyat negeri mereka yang tinggal di bawah hipnotis kolonial”.¹¹⁶

Kemudian Muhammad Hatta juga menambahkan bahwa lulusan Perhimpunan Indonesia sebagai faktor pemersatu, melalui penyusupan ke dalam partai-partai yang ada, dapat mendorong kaum nasionalis untuk siap mengesampingkan masalah-masalah primordial demi kepentingan yang lebih besar yaitu menyatukan tenaga revolusi untuk merebut kemerdekaan Indonesia.

Usaha menjalin hubungan dengan tanah air telah berlangsung cukup lama, yakni ketika para mahasiswa ke Netherland bergabung dengan Perhimpunan Indonesia. Mereka tetap menjalin hubungan dengan keluarga yang bekerja di pemerintahan Hindia Belanda, teman-teman dalam Budi Utomo, Serikat Islam, dan sebagainya, hanya untuk mengetahui perkembangan sikap perjuangan dan situasi tanah air.

Menjalिन hubungan yang pertama adalah dilakukan oleh Sudjadi, Arnold Mononutu dan Singgih ke dalam Budi Utomo, kemudian dalam

¹¹⁶ Marvis Rose, *Indonesia Merdeka. Biografi Politik Mohammad Hatta*, Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 50.

Serikat Islam.¹¹⁷ Dipertengahan tahun 1926, strategi alumni Perhimpunan Indonesia untuk penyusupan dalam Budi Utomo dan Serikat Islam harus ditambah lagi dengan organisasi yang jelas mencerminkan perjuangan menuju kemerdekaan. Oleh sebab itu, para anggota menganjurkan para alumni di tanah air harus membentuk organisasi nasional baru menurut cita-cita Perhimpunan dan bertujuan mengambil alih kepemimpinan gerakan kebangsaan Indonesia. Melalui rencana tersebut diharapkan seluruh gerakan nasional berubah menjadi gerakan radikal akan tetapi tetap bertanggungjawab berdasarkan garis ideologi Perhimpunan Indonesia.¹¹⁸

Supaya usaha penyebaran tersebut berjalan baik, maka pada bulan Januari 1925, pengurus Perhimpunan Indonesia menugaskan Budiarto, Sartono, dan Arnold Mononutu, untuk menyiapkan dan menyebarluaskan propaganda di negeri Belanda dan terutama Indonesia. Cara yang dilakukan mereka adalah penyebarluasan melalui majalah Indonesia Merdeka. Majalah Indonesia Merdeka terbit dalam bahasa Belanda. Kemudian majalah tersebut disebarluaskan ke tanah air melalui wakil-wakilnya di tanah air seperti para alumni yang telah selesai studi dan simpatisan Perhimpunan Indonesia. Majalah-majalah diselundupkan

¹¹⁷ Menjalin hubungan dengan tanah air yang dilakukan oleh para mahasiswa bukan baru pertama kali itu saja, akan tetapi telah berlangsung selama sebelum Arnold Mononutu, dkk. yang berangkat ke Netherland. Para mahasiswa sebelumnya telah berpengalaman dalam organisasi sosial budaya, sampai politik. Tujuannya hanya ingin mengetahui keadaan tanah air dan hubungan keluarga. Namun, peran Arnold Mononutu, dkk. luar biasa dalam PI setelah reorganisasi perhimpunan.

¹¹⁸ John Ingleson, *op.cit*, hlm.37.

supaya bebas dari pengawasan polisi Belanda. Caranya dengan dimasukkan dalam bagasi anggota yang pulang atau dengan dititipkan kepada para pelaut yang bekerja di kapal Belanda. Khususnya untuk majalah Indonesia Merdeka dimasukkan ke dalam majalah *Haagsche Post* Belanda dengan cara ditempelkan di halaman majalah tersebut, kemudian dibungkus dan dikirim ke alamat para distributor maupun simpatisan di tanah air.

Setelah majalah Indonesia Merdeka sampai di tangan pembacanya, ternyata mendapat respon yang sangat baik. Puncaknya banyak para perkumpulan mendiskusikan tentang isi majalah tersebut. Diketahui diskusi politik yang pertama dilakukan oleh kalangan mahasiswa di Surabaya dan kemudian Bandung. Isi dari pada majalah tersebut bebas dari pengawasan pers mempengaruhi pemuda-pemuda nasional Indonesia dan menjadi suatu dasar intelektual serta ideologi untuk pandangan politik perkumpulan tersebut.

Tenaga penghubung yang paling berjasa bagi Perhimpunan Indonesia adalah Sudjadi. Ia seorang juru tulis di departemen keuangan di Batavia. Pada tanggal 21 Januari 1926, Sudjadi resmi ditunjuk menjadi wakil Perhimpunan Indonesia di Indonesia.¹¹⁹ Tugas utama Sudjadi adalah mempublikasikan majalah Indonesia Merdeka, mencari langganan baru, mengatur distribusinya dan mengirim info kepada Perhimpunan Indonesia

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 39.

tentang situasi politik di Indonesia. Tugas itu dijalankan dengan baik oleh Sudjadi, hal tersebut dapat dilihat dengan hubungan baik lewat surat menyurat antara Sudjadi dengan Muhammad Hatta. Sudjadi juga menyebarkan ide-ide Perhimpunan Indonesia dikalangan organisasi politik di Indonesia dan berusaha mempengaruhi mereka supaya berpikir ke arah perjuangan Perhimpunan Indonesia. Menurut John Ingleson, hubungan surat menyurat antara Sudjadi dengan Muhammad Hatta sangat memiliki peran penting karena Sudjadi telah menjadi orang kepercayaan Muhammad Hatta, sehingga perannya dalam penyebarluasan Perhimpunan Indonesia di Indonesia sangat baik, hal tersebut terbukti anjurannya untuk membentuk sebuah gerakan nasional baru menjadi kenyataan.

2. Kegiatan Politik Anggota Perhimpunan Indonesia di Indonesia

a. Pembentukan Kelompok Studi

Berdirinya kelompok-kelompok studi (*Study Clubs*) merupakan gagasan para alumni Perhimpunan Indonesia untuk merespon ketidakpuasan mereka terhadap partai politik yang telah ada. Kelompok-kelompok studi tersebut disambut baik dari beberapa kalangan, karena Perhimpunan Indonesia beranggapan bahwa *Studieclubs* merupakan *thesis* ketidakpuasan mereka terhadap kerja partai-partai yang telah ada. Susanto Tirtoprodjo, mengatakan bahwa pendirian kelompok-kelompok studi tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap pergerakan nasional yang

makin keras, jadi dengan pendirian kelompok studi tersebut untuk lebih mengurangi pengawasan kolonial Belanda terhadap aktivitas mereka.¹²⁰

Setelah para alumni kembali ke tanah air, dengan menyebarkan gagasan dan cita-cita Perhimpunan Indonesia, baik melalui majalah Indonesia Merdeka maupun alumni yang masuk organisasi politik lama, maka beberapa mahasiswa mengadakan diskusi dengan para alumni tersebut. Senada John Ingleson mengatakan:

“Indonesia merdeka yang disebarluaskan di Indonesia dan artikel-artikelnya menjadi bahan diskusi politik yang hangat dikalangan mahasiswa di Bandung dan Batavia. Isinya yang bebas dari pengawasan ketat terhadap semua surat kabar dan jurnal terbitan Indonesia, mempengaruhi pemuda nasionalis di Indonesia yang pada waktu itu sedang mencari jati diri pribadi sekaligus jati diri bangsa Indonesia juga suatu dasar intelektual dan Ideologi untuk pandangan politik mereka”.¹²¹

Di antaranya mereka yang tergabung dalam pembentukan kelompok studi adalah Tjipto Mangunkusumo, Abdul Nazir dan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Cara seperti itulah diharapkan bisa diterimanya cita-cita dan ideologi Perhimpunan Indonesia sebagai gerakan nasional baru.

Berdiri pertama adalah kelompok studi Indonesia berdiri tanggal 11 Juli 1924 di Surabaya.¹²² Sutomo merupakan pendiri sekaligus penggerak utama dalam kelompok studi ini. Ia merupakan alumni

¹²⁰ Susanto Tirta Prodjo, *Sejarah Pergerakan Nasional*, 1989, Jambatan, Jakarta, hlm. 74.

¹²¹ John Ingleson, *op.cit.*, hlm. 39.

¹²² Bernhar Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan* (terjemahan), LP3ES, Jakarta 1987, hlm. 65.

Perhimpunan Indonesia tahun 1919-1923. Tujuan berdirinya kelompok studi tersebut ialah untuk menyatukan elit intelektual dan mengembangkan kesadaran nasionalisme Indonesia. Hal tersebut menjawab dari organisasi Budi Utomo, Serekat Islam dan *Jong Java*, yang tidak berorientasi kebangsaan. Selain berorientasi dalam bidang politik dengan mengembangkan kesadaran nasionalisme Indonesia, kelompok ini juga bergerak dalam bidang kemasyarakatan Indonesia. Dengan kata lain bahwa masyarakat diajak untuk mengatasi masalah sosial dan nasional secara konstruktif.¹²³ Berdirinya organisasi ini telah menghasilkan seperti asrama anak sekolah, asrama wanita, sekolah tenun, kerajinan, koperasi, perkreditan, Bank Nasinal Indonesia, Biro Aktivistis, Bank Kredit Bumi Putra dan lain sebagainya.

Kelompok studi ini pada tahun 1926 berhasil menghidupkan diri pada ideologi yang ada pada Perhimpunan Indonesia yakni dengan melakukan propaganda ke seluruh Jawa agar memantapkan semangat persatuan dan mendorong para pemuda untuk lebih aktif dalam kelompok ini. Pengaruh propaganda yang intensif tersebut Komite Persatuan Indonesia di Bandung dan kota-kota lainnya.

Kelompok studi yang kedua adalah Kelompok Studi Umum (*Algemene Studie Clubs*) Kelompok Studi Umum berdiri pada tanggal 29

¹²³ D.M.G. Kokch, *Menuju Kemerdekaan Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia Sampai 1942*, Yayasan Pembangunan, Jakarta, 1951, hlm. 126.

November 1925, di Bandung. Kelompok ini didirikan oleh para alumni Perhimpunan Indonesia dan juga Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik (STOVIA). Gagasan pertama pembentukan kelompok studi tersebut adalah bermula dari Arnold Mononutu. Namun, realisasinya dilakukan oleh Sukarno dan Anwar, mahasiswa jurusan arsitektur dan mesin.¹²⁴

Kelompok studi ini banyak mendapat sumbangan baik dalam bentuk pemikiran dan pengalaman dari para tokoh nasionalis seperti Cipto Mangunkusumo, Cokroaminoto, Sartono, dan tokoh-tokoh lainnya. Sebagai ketua umumnya adalah Arnold Mononutu yang menjabat selama satu tahun. Arah dan tujuan kelompok studi ini adalah bergerak dalam bidang politik yakni menyebarkan nasionalisme melalui pembentukan organisasi baru.

Usaha untuk mendukung propaganda, kelompok ini mendirikan majalah "Indonesia Muda". Terbit menurut model majalah "Indonesia Merdeka" Perhimpunan Indonesia dan sangat menarik para pembaca dari pulau Jawa dan Sumatera. Majalah ini dipimpin oleh Sukarno yang menyumbangkan banyak artikel. Artikel edisi pertama, kedua dan ketiga, berisi tulisan Sukarno. Salah satu judul tulisannya adalah "Nasionalisme, Islam, dan Marxisme".¹²⁵

¹²⁴ Suhartono, *op.cit*, hlm. 58.

¹²⁵ John De Legge, *op.cit*, hlm. 99. Dan bisa juga dibaca dalam Sukarno, *Di bawah Bendera Revolusi*, Panitia di bawah Bendera Revolusi, Jakarta, 1965, hlm. 123.

Artikel tersebut merupakan uraian paling jelas tentang pokok-pokok pikiran politik Sukarno pada tahun 1926. Dalam uraiannya Sukarno menyatakan bahwa, berdasarkan tradisi perjuangan kemerdekaan nasional Indonesia yang terdapat tiga aliran politik yang dominan dalam melawan kolonialisme Belanda, yakni aliran politik nasionalisme, aliran politik agama (Islam) dan aliran politik Marxisme. Sukarno kemudian mengemukakan pertanyaan sekitar tiga aliran politik tersebut, dan baginya merupakan pertanyaan sentral adalah sebagai berikut: "Dapatkah roh-roh itu dalam situasi kolonial bekerja bersama-sama menjadi roh besar, roh persatuan yang akan membawa kita ke kebebasan?"¹²⁶

Pernyataan pokok pikiran Sukarno tersebut berasal dari suatu dasar yang sama yaitu hasrat kebangsaan untuk melawan kolonialisme Belanda dan ketiga aliran politik tersebut harus bersatu dalam perjuangan melawan musuh bersama.

Pokok-pokok pikiran Sukarno tersebut telah jelas dalam program Perhimpunan Indonesia yang dipropagandakan di dalam dan luar negeri Belanda untuk tujuan Indonesia Merdeka. Kesimpulan dan argumen-argumen yang diambil Sukarno telah disimpulkan Perhimpunan Indonesia sebelumnya. Sukarno ternyata lebih mengarahkan supaya ide-ide tersebut bisa ditangkap oleh masyarakat Indonesia dengan mudah. Hal itu dikemukakannya dengan tulisan, bahasanya yang sederhana membuat

¹²⁶ *Idem.*

sintesa dan kemudian menerjemahkannya dengan kemampuan daya tangkap pembaca.

Kelompok Studi Indonesia dan Kelompok Studi Umum berdiri karena pengaruh ideologi dan cita-cita Perhimpunan Indonesia sangat besar, hal tersebut ditegaskan oleh Ingleson, bahwa bangkitnya nasionalisme generasi muda dari kota-kota besar di Indonesia berkat alumni Perhimpunan Indonesia, yang bergerak secara politis bagaikan magnet menggugah semangat mereka.

Kelompok Studi di Bandung lebih kuat bergerak dalam bidang politik dan bersikap non kooperasi terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Sedangkan Kelompok Studi di Surabaya lebih bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Walaupun mengembangkan semangat nasional Indonesia. Hal tersebut perlu disadari bahwa anggota kelompok studi ini adalah para pegawai pemerintahan kolonial yang mau tidak mau harus bersikap moderat. Ditambah lagi karena dukungan Sutomo yang telah berpegalaman dalam Budi Utomo yang sudah tentu bertindak mantap dan memiliki orientasi yang luas, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.¹²⁷

Kedua kelompok studi baik Kelompok Studi surabaya dan Kelompok Studi Bandung merupakan jawaban perjuangan para alumni Perhimpunan Indonesia di tanah air. Perjuangan mereka tidak hanya itu,

¹²⁷ Suhartono, *op.cit.* hlm.59.

melainkan harus mencari peranan politik yang lebih luas dan kebutuhan akan partai nasional yang bercirikan kebangsaan Indonesia, dan mencakup seluruh aspek bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, langkah pertama dengan menjalin persatuan diantara pelbagai kelompok telah berhasil dilakukan, tinggal menunggu sebuah gerakan kebangsaan yang bisa diterima masyarakat luas.

Alumni Perhimpunan Indonesia telah berhasil dalam mengembangkan benih-benih ideologi nasionalisme baru, perpolitikan Indonesia melalui propaganda yang intensif.¹²⁸ Hal ini menimbulkan harapan di kalangan nasionalis dari berbagai golongan dan partai politik, karena membawa kebijaksanaan baru dan harapan baru dunia politik Indonesia.

b. Pembentukan Partai Nasional Indonesia

Pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Bandung dan Sumatera Barat, berakibat pada kegiatan politik para kaum nasionalis. Para tokoh nasionalis sangat sulit dalam melakukan pergerakan karena pemerintah kolonial Belanda semakin ketat melakukan pengawasan. Setidaknya ada empat dari tujuh dampak revolusi yang gagal terhadap gerakan nasional, adalah: pertama menunjukkan bahwa pemberontakan semacam itu hanyalah sia-sia belaka, karena dengan mudah ditumpas oleh kekuatan Belanda yang lebih unggul, kedua; pelarangan PKI dan

¹²⁸ John Ingleson, *op.cit.* hlm. 24.

dibuangnya sejumlah besar pemimpin dan pendukungnya, ke Boven, Digul, telah menyingkirkan kaum komunis dari kancah politik sampai penjajahan Belanda berakhir, ketiga; setelah PKI gagal menyusun suatu revolusi yang luas dan berhasil, kaum nasionalis semakin sadar akan kelemahan organisasi, bukan hanya dari PKI tetapi juga dari semua organisasi nasionalis. Mereka juga menyadari perlunya membentuk suatu organisasi yang kuat dan berdisiplin, dan keempat; tersingkirnya PKI menimbulkan kekosongan dalam gerakan kebangsaan: gerakan kebangsaan ini memerlukan pengarah dan pemimpin, baik dari organisasi politik yang ada dan bangkit kembali maupun dari pembentukan partai baru.¹²⁹

Setelah mengetahui pemberontakan PKI tersebut gagal, maka dengan cepat Sudjadi memberitahu Hatta. Sudjadi mengatakan bahwa sebagai langkah berikutnya Arnold dan Budiarto, secepat mungkin akan mengambil langkah yakni, membentuk suatu partai baru, sesuai rencana.¹³⁰ Setelah menerima rencana Hatta tentang pembentukan sebuah partai nasional baru “Sarekat Rakyat Nasional Indonesia” (SRNI) dengan menyelenggarakan sebuah Kongres Nasional. Namun agak lama dan memberatkan langkah pergerakan karena akan dilaksanakan pada bulan Juli 1927. Kaum nasionalis Bandung dan Surabaya mengharapkan

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 63.

¹³⁰ *Ibid*, hal. 64. Surat Sudjadi kepada Hatta pada tanggal 20 Desember 1926.

sesegera mungkin dilaksanakan langkah yang konkrit untuk mengisi pergerakan yang kosong setelah ditinggalkan PKI.

Sesuai anjuran Hatta dari Nederland bahwa para anggota Perhimpunan Indonesia setuju untuk mendirikan sebuah partai nasional baru yang berbasiskan cita-cita dan ideologi Perhimpunan Indonesia. Namun apa yang diharapkan Hatta tidak didukung sepenuhnya oleh kaum nasionalis di tanah air yang kebanyakan alumni Perhimpunan Indonesia kecuali Sukarno dan Anwari. Hatta menyakini dapat mengendalikan sikap politiknya dari Nederland, akan tetapi Hatta tidak mengetahui secara baik situasi Indonesia pada pertengahan tahun 1926, bahwa para alumni telah mencapai sasaran pada persatuan nasional Indonesia dan kesadaran kebangsaan. Semuanya dilaksanakan oleh Kelompok Studi Surabaya (Kelompok Studi Indonesia) dan Kelompok Studi Umum (*Elegemen et Club*) di Bandung, dengan merencanakan partai nasional baru juga.

Tampak terdapat dua aliansi dukungan untuk menyikapi perkembangan gerakan nasional selanjutnya. Pertama; Hatta menegaskan alumni harus membentuk partai nasional baru sesuai dengan Ideologi dan cita-cita Perhimpunan Indonesia. Kedua; alumni telah tergabung dalam dua kelompok studi ragu-ragu untuk beraliansi kepada rencana Hatta karena mereka beranggapan bahwa alumni Perhimpunan Indonesia di tanah air lebih mengerti situasi sebenarnya dan juga para alumni telah merencanakan akan membentuk sebuah partai nasional baru di bawah



kesatuan dari Kelompok Studi Surabaya dan Kelompok Studi Bandung. Supaya mengurangi ketegangan, Sudjadi mengirim kepada Hatta bahwa sikap alumni di Bandung dan Batavia tidak mendukung SRNI buatan Hatta. Sudjadi menulis sebagai berikut:

“Program partai tersebut tidak sesuai dengan keinginan para pendukung Anda. Lebih-lebih lagi, ini jelas bertentangan dengan apa yang ditegaskan dalam Indonesia Merdeka dan dengan kritik dari Dr. Sutomo. Tentu saja, kita harus mempunyai suatu program yang cocok dengan semangat “non kooperasi”. Program anda juga tidak sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia”.¹³¹

Hatta juga mengatakan keberatannya, kenapa pembentukan partai nasional baru tersebut ditolak. Ia menolak cara yang ditempuhnya terlalu moderat dan ia mengatakan bahwa itu adalah pilihan universal bagi semua orang. Hatta mengatakan bahwa:

“Saya kira Sudjadi menaruh keberatan atas program ini karena mengandung tuntutan untuk memperoleh hak pilih universal yang menurut pendapatnya bertentangan dengan prinsip “non kooperasi”, dalam arti bahwa agar memperoleh hak pilih universal barangkali orang Indonesia mau menerima sejumlah kursi di Volkstraad”.¹³²

Penolakan terhadap rencana Hatta tersebut sangat berkaitan dengan pandangan Hatta untuk mencerdaskan masyarakat terlebih dahulu melalui pendidikan rakyat dan juga pendidikan politik. Para tokoh nasionalis di tanah air menolak rencana tersebut karena diperlukan gerakan yang cepat, bukan menunggu pendidikan rakyat yang memakan waktu lama.

¹³¹ *Ibid*, hlm 65. Surat Sudjadi kepada Hatta pada tanggal 7 Februari 1927.

¹³² *Idem*. Dikutipnya dalam Hatta, *Verhoor van Verdachten*, 8 November 1927, hlm. 43.

Pada bulan April diadakan pembicaraan di rumah Sukarno di Bandung, turut hadir Arnold Mononutu, Sunario, Budiarto, Cipto Mangunkusumo, J. Tilaar, dan Sudjadi. Tahap awal pembicaraan tersebut hanya membahas bagaimana membentuk federasi yang terdiri dari semua partai nasional.¹³³ Sebelumnya pada bulan Mei diambil keputusan untuk meninggalkan SRNI, ini diusulkan untuk menyelenggarakan kongres untuk partai baru pada bulan Juli dan Agustus 1927.

Kemudian diadakan lagi pertemuan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Ketika itu juga diumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI). Susunan kepengurusannya adalah Sukarno sebagai ketua, Arnold sebagai sekretaris-bendahara, dan Dr. Samsi sebagai komisioner. Di dalam kepengurusan ini sesuai dengan rencana akan diselenggarakan kongres pada bulan September atau Desember 1927.

Setelah berdirinya PNI tidak ada lagi menyebut nama SRNI maupun kegiatannya. Dalam perkembangannya terdapat perbedaan pandangan dan tujuan dalam mengambil sikap dalam PNI. Sudjadi dan Arnold Mononutu sebagai alumni dalam empat tahun yakni ditahun 1929 dan 1930 perkembangan PNI merasa tidak menyukai arah perkembangan PNI. Sebaliknya dengan Budiarto sangat konsen dengan kegiatan PNI.

¹³³ *Ibid*, hlm. 69. Kemudian ia menjelaskan bahwa PPPKI adalah singkatan dari Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, yang didirikan di Bandung, Desember 1927.

Selama tiga tahun berikutnya, PNI terus menggunakan ideologi yang telah disusun Perhimpunan Indonesia di Nederland pada tahun 1923 dan memiliki pengaruh besar atas perjalanan pergerakan kebangsaan. Pemimpin Kelompok Studi Umum telah menolak rencana Muhammad Hatta untuk membentuk partai nasional baru sesuai dengan rencananya dan mengambil langkah sendiri dengan membentuk PNI yang bebas dari pengawasan Perhimpunan Indonesia dan Muhammad Hatta. Akan tetapi ideologi yang dikemukakan PNI sama dengan ideologi yang dikembangkan Perhimpunan Indonesia. Hubungan PNI dan Perhimpunan Indonesia dapat dilihat dalam proses persidangan Sukarno dihadapan pengadilan kolonial Belanda pada tahun 1930, sebagai berikut:

“Presiden Lendraad: “Apakah ada bekas anggota PI di antara tuan-tuan yang turut mendirikan PNI itu?”

Terdakwa: “Ya, Mr. Budiarto, Mr. Sunario dan Mr. Arnold”

Predien Lendraad : “Apakah mereka itu mempunyai pengaruh pada berdirinya PNI di sini?”

Terdakwa : “Sudah barang tentu, bahwa mereka bertiga itu dari negeri Belanda membawa asas yang bersamaan, yang lantas menjadi asas partai yang didirikan di negara kita ini. Tuan-tuan Mr. Arnold dan Budiarto dan juga yang lain-lainnya yang baru kembali dari Holland, mempunyai cita-cita yang hampir sama dengan cita-cita kita”.¹³⁴

Kemudian Sunario juga mengatakan: seperti dikira oleh beberapa pengarang bahwa seolah-oleh PNI adalah perlanjutan atau penjelmaan semata-mata dari *Algemene Studie Club* di Bandung. Oleh karena pada

¹³⁴ Sunario, *op.cit*, hlm 51-52.

waktu PNI didirikan, tidak sepele kata pun yang diucapkan oleh para pendiri *Algemene Studie Club*.¹³⁵

Pada tahun 1925 Perhimpunan Indonesia telah menetapkan empat gagasan pokok yang harus dikembangkan adalah kesatuan nasional, solidaritas, *non cooperation*, dan swadaya.¹³⁶ Kemudian dipakai oleh PNI dalam propagandanya supaya lebih dipahami oleh masyarakat yang menghadiri pidatonya. Seperti penyederhanaan lain yang dikemukakan oleh Sukarno dan PNI terhadap ideologi yang dikemukakan Hatta dan Perhimpunan Indonesia. Seperti Perhimpunan Indonesia mengemukakan tentang tekanan konflik antara kepentingan penjajah dengan yang dijajah yakni perlunya membentuk suatu “*front* kulit berwarna” melawan “*front* kulit putih”, tetapi Sukarno menyederhanakan dengan slogan antara “sana” dan “sini”.¹³⁷

Perbedaan pandangan antara Sukarno dan Muhammad Hatta telah tampak sekitar tahun 1926, semakin tampak pada tahun 1929. Perbedaan yang terjadi hanya pada penerapan praktis pada gagasan dasar, sedangkan gagasan tersebut tidak berbeda. Penekanan keduanya hanya pada percepatan konfrontasi tentang pembentukan sebuah gerakan masa. Meskipun perbedaan ideologi dari kedua tokoh ini, namun memegang teguh ideologi yang telah dikembangkan oleh Perhimpunan Indonesia.

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 56.

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 70.

¹³⁷ *Ibid*, hlm 71.

c. Berdirinya Organisasi Persatuan Pemuda

Propaganda Perhimpunan Indonesia memang menarik perhatian para pemuda pelajar dan mahasiswa di tanah air. Usaha yang dilakukan Perhimpunan Indonesia, pertama melalui majalah “Indonesia Merdeka” yang sangat mendapat tanggapan luar biasa, seperti terjadinya diskusi politik tentang masalah tanah air, pembentukan kelompok belajar dan pembentukan PNI.

Perhimpunan Indonesia selaku aktor dalam gagasan moderat tentang Indonesia merdeka sangat berpengaruh di kalangan pemuda. Oleh sebabnya, Muhammad Hatta mengatakan “Propaganda tentang Indonesia Merdeka” dan “Politik *non-cooperation*” yang dilancarkan Perhimpunan Indonesia cepat mengikat hati para pemuda, pelajar dan pemimpin yang telah berpengalaman di tanah air”.¹³⁸

Pengaruh Perhimpunan Indonesia melalui para alumni memang sangat besar terhadap pergerakan kebangsaan Indonesia. Buktinya lahir beberapa gerakan kebangsaan seperti *Studi Clubs*, PNI dan nantinya pembentukan tekad dari para pemuda untuk bersatu. Organisasi-organisasi tersebutlah yang nantinya mendorong lahirnya semangat persatuan di kalangan pemuda Indonesia, karena ideologi mereka sangat mendominasi

¹³⁸ *Ibid*, hlm.44

pergerakan nasional Indonesia. Sudiro juga mengatakan bahwa propaganda Perhimpunan Indonesia di Indonesia merupakan sukses besar, sebab mahasiswa, pemuda-pemuda, kaum terpelajar, dan sebagainya banyak dijiwai cita-cita Perhimpunan Indonesia.¹³⁹

Pada perkembangannya setelah tahun 1926, lahir berbagai macam gerakan pemuda seperti berdirinya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), Pemuda Indonesia (PI), Kongres Pemuda I, dan Kongres Pemuda II.

1). Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia

Pemrakarsa awal berdirinya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) ialah Djokoadipura, di Batavia. Langkah pertama dengan mengadakan pertemuan kecil dengan para mahasiswa *Technische Hoogesschool dan Rechtshoogeschool*. Pada pertemuan awal hanya membahas sekitar kesadaran pemuda intelektual terhadap tanah airnya. Dari pembicaraan tersebut tampak bahwa tugas utama dari kaum intelektual bukan hanya belajar, kemudian memperoleh ijazah, akan tetapi penerapan ilmunya bagi kepentingan masyarakat.

Atas dasar pemikiran tersebut, kemudian diadakan kembali pertemuan II di Bandung. Kebetulan sekali bahwa *Jong Java* dan *Jong Islamieten Bond* sedang mengadakan kongres pada bulan Desember

¹³⁹ Sudiro, dkk. *45 Tahun Sumpah Pemuda*, Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah, Jakarta, 1974, hlm.39.

1925.¹⁴⁰ Ternyata peserta yang mengikuti kongres pernah ikut pula di Jakarta waktu itu. Hasil dari pertemuan ini ialah keinginan untuk mendirikan *Indonesische Studentbond*. Akan tetapi baru terbentuk pada bulan Agustus 1928 yang diprakarsai oleh empat mahasiswa dari STOVIA dan juga *Rechtshoogeschool*. Sejak saat itulah namanya menggunakan “Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia” (PPPI).

Asas yang mendasar dari PPPI adalah berjuang untuk kemerdekaan bangsa. Asas tersebut didasarkan pada pertentangan terhadap penjajahan Belanda di Indonesia dengan perlawanan menggunakan PPPI yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat. Sekilas memang tidak ada hubungannya dengan Perhimpunan Indonesia, namun perlu diteliti bahwa Perhimpunan Indonesia-lah sebagai penggagas awal cita-cita PPPI. Pringgodigdo mengatakan bahwa walaupun PPPI tidak berhubungan secara langsung dengan Perhimpunan Indonesia, namun PPPI meneruskan ideologi Perhimpunan Indonesia. Sunario juga mengatakan bahwa berdirinya PPPI merupakan reaksi para mahasiswa Sekolah Tinggi di Jakarta (Sugondo, Suwiryono, Sigit, dll.) atas perjuangan pemuda-pemuda dari Perhimpunan Indonesia.¹⁴¹

¹⁴⁰ Ahmaddani G. Martha, dkk. *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, PT. Kalina Purbasari, Jakarta, 1984, hlm. 52.

¹⁴¹ Sunario, *op.cit.* hlm. 58.

Peranan Perhimpunan Indonesia tidak secara langsung aktif dalam organisasi tersebut, akan tetapi majalah “Indonesia Merdeka” sampai pada tangan para pelajar di Bandung dan sebaliknya majalah “Indonesia Raya” sampai pada Perhimpunan Indonesia di Nederland, telah mempengaruhi pola pola pikir dari mahasiswa Teknik Tinggi di Jakarta. Sehingga terbentuklah PPPI berkat interaksi timbal balik pertukaran komunikasi. Oleh karena itu, J.Th. Blumberger, mengatakan: “PPPI” Indonesia Merdeka (berusaha untuk sedikit banyak mengisi tempat Perhimpunan Indonesia di Nederland dan dalam Majalah “Indonesia Raya” mempropagandakan usaha ke arah “Indonesia Raya” yang merdeka.¹⁴²

Jadi, bukan berarti berdirinya PPPI tidak ada pengaruh dari Perhimpunan Indonesia, pengaruhnya memang tidak secara langsung, akan tetapi PPPI telah dialiri ideologi dan cita-cita dari Perhimpunan Indonesia. Walaupun tokoh alumni Perhimpunan Indonesia seperti Budiarto, Sunario, dan lain-lain tidak bergabung mendirikan PPPI, namun saling berhubungan tersebut diketahui dari pertukaran informasi tentang pergerakan tanah air melalui majalah masing-masing.

¹⁴² *Idem*, hlm. 59.

2). Kongres Pemuda I

Pergerakan selanjutnya dari pergerakan kebangsaan Indonesia ialah berhasilnya para pemuda merencanakan persatuan dan kesatuan dari para pemuda Indonesia. Oleh sebab itu diadakan sebuah kongres pemuda yang diadakan pada tanggal 30 April sampai 26 Mei 1927 di Jakarta. Kongres tersebut dihadiri oleh wakil-wakil organisasi seperti *Jong Java*, *Jong Islamieten Bond*, *Jong Sumatera Bond*, *Jong Ambon*, *Sekar Rukun*, *Studerende Minahassers*, *Jong Bataks*, dan Pemuda Kaum *Theosofi*. Kongres diselenggarakan oleh sebuah panitia yang anggotanya terdiri dari organisasi-organisasi perkumpulan pemuda, yang dipimpin oleh Mohammad Tabrani.

Tujuan utama diselenggarakannya kongres ini adalah untuk membentuk dan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yakni sebagai sebuah badan pusat. Maksudnya adalah pertama; memajukan paham persatuan dan kebangsaan dan yang kedua mempererat hubungan antara sesama perhimpunan-perhimpunan pemuda kebangsaan.¹⁴³

Uraian kongres tersebut pertama-tama adalah tentang sejarah perjuangan Indonesia dan menekankan kepada masalah yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat diserap dan dihayati dalam mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Uraian ini secara jelas terdapat

¹⁴³ *Idem.*

dalam pidato-pidato anggota kongres. Dari pidato-pidato tersebut menekankan “Indonesia Bersatu”. Harapannya, pemuda bisa memperkuat rasa kesatuan dengan meninggalkan kepentingan golongan, agama, daerah, dan sebagainya.

Kongres pemuda yang berlangsung selama lima belas hari tersebut menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:

1. Mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia
2. Usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan ke daerahan yang kolot, dan lain-lain.

Memperhatikan hasil kongres pemuda yang diselenggarakan tersebut, ternyata belum memenuhi cita-cita untuk membentuk persatuan pemuda yang tunggal. Sehingga, penekanan persatuan masih samar-samar dan belum menentukan sikap pemuda yang sebenarnya. Maka diperlukan kongres pemuda lanjutan untuk memutuskan langkah selanjutnya yang harus segera diambil sikap dari pemuda Indonesia. Oleh sebab itu, tepatlah pengurus pemuda tersebut dinamakan Kongres Pemuda I dan diperlukan Kongres Pemuda selanjutnya.

- 3). Pemuda Indonesia

Organisasi Pemuda Indonesia (OPI) berdiri pada tanggal 20 Februari 1927 di Bandung, yang bersifat nasional. Pemrakarsa *Jong* ini adalah Sugiono, Sunardi, Mulyadi, Supangat, Agus Prawiranata, Sukamso, Sulasmi, Katjo Sungkono dan Abdul Gani. Sebagai ketua

Jong Indonesia adalah Sugiono. Sedangkan untuk cabang Jakarta dan Bandung telah berdiri yang mempunyai nama bagian untuk pemuda yakni “Putri Indonesia”.

Tujuan *Jong* Indonesia adalah untuk menyebarkan dan memperkuat cita-cita kebangsaan Indonesia yang bersatu sesuai dengan cita-cita kebangsaan Indonesia yang bersatu sesuai dengan tujuan Perhimpunan Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Indonesia Merdeka: “Kita hanya tinggal menyambut lahirnya *Jong* Indonesia itu hanya dengan gembira. Ia adalah dibangun sesuai dengan jiwa Perhimpunan Indonesia”.¹⁴⁴

Terbentuknya organisasi pemuda ini merupakan embrio dari perkumpulan pelajar di Bandung dan terinspirasi dari kongres pemuda I. Hal tersebut didasarkan pada perubahan pandangan atas organisasi pemuda kedaerahan yang dipimpin oleh Sukarno bersama *Alegemene Studie Club*. Perubahan dilakukan untuk menghilangkan sifat kedaerahan dan netral terhadap agama, sehingga tanpa embel-embel apapun bisa bergabung kedalamnya.

Mengenai gerakannya belum secara aktif bergerak dalam bidang politik, akan tetapi tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan ke arah persatuan. Konsentrasi *Jong* Indonesia masalah persatuan dan kesatuan. Kegiatannya ialah bekerjasama dengan perkumpulan-

¹⁴⁴ *Idem.*

perkumpulan pemuda lain, memajukan kepaduan kebangsaan Indonesia dan berolahraga bersama.¹⁴⁵

Pada perkembangannya, *Jong* Indonesia meluaskan kegiatannya sampai ke beberapa daerah Indonesia. Sebab dari itu, *Jong* Indonesia mendirikan cabang di Yogyakarta, Solo dan Jakarta. Melihat *Jong* Indonesia banyak yang mendukungnya, maka pada tanggal 28 Desember 1927 mengadakan kongres yang pertama. Keputusan kongres yang dicapai adalah :

1. Nama organisasi yang sebelumnya dalam bahasa Belanda, sesuai dengan keinginan untuk menggunakan bahasa nasional, kemudian menjadi "Pemuda Indonesia".
2. Gagasan PPPI untuk membentuk wadah fusi, asal semua organisasi pemuda lainnya juga ikut serta dalam badan fusi yang akan dibentuk seandainya ada organisasi pemuda yang tidak menyetujui maksud tersebut maka Pemuda Indonesia akan menetapkan pendiriannya kemudian.¹⁴⁶

Jika memperhatikan hasil keputusan kongres pemuda Indonesia ini, ternyata arah gerakannya sama dengan organisasi sebelumnya seperti Perhimpunan Indonesia, PNI, dan PPPI. Organisasi tersebut erat hubungannya dengan ideologi dan cita-cita

¹⁴⁵ A.K. Pronggodigdo, *op.cit*, hlm. 103.

¹⁴⁶ Sunario, *op.cit*, hlm. 44.

Perhimpunan Indonesia. Sehingga arah dan tujuannya tidak jauh berbeda, karena organisasi ini masih didominasi oleh para alumni Perhimpunan Indonesia seperti Sartono, Arnold Mononutu, Budiarto, Sunario, dan alumni-alumni lainnya.

4). Kongres Pemuda II

Pada Kongres Pemuda pertama belum mendapatkan rumusan yang tepat untuk bisa menyatukan para pemuda Indonesia di bawah organisasi yang sentral dan tunggal. Maka pada tanggal 15 Agustus 1926 atas prakarsa dari *Jong Java* diadakan kembali pertemuan lanjutan (*Na-Conferentie*) untuk meninjau kembali Kongres Pemuda I. Turut hadir dalam pertemuan ini adalah wakil-wakil dari *Jong Java*, *Jong Sumatera Bond*, *Jong Islamieten Bond*, *Jong Bataks*, Sekar Rukun, *Jong Celebes*, *Jong Minahasa*, *Jong Ambon*, dan panitia Kongres Pemuda I. Pada pertemuan ini diketuai oleh Mohammad Tabrani.

Agenda utama dalam pertemuan kali ini masih membahas permasalahan penyatuan pemuda didalam satu wadah tunggal. Permasalahan yang diperdebatkan pada Kongres pertama bisa dilanjutkan. Oleh sebab itu, panitia dan para wakil-wakil organisasi kepemudaan sepakat untuk meneruskan agenda kongres pertama bisa dilanjutkan. Oleh sebab itu panitia dan para wakil-wakil organisasi kepemudaan sepakat untuk meneruskan agenda kongres pertama

tentang usaha penyatuan organisasi pemuda. Sebagai keputusan sementara dalam pertemuan tersebut masing-masing organisasi peserta *Na-Conferentie* setuju merundingkan kembali keputusan tersebut dengan pengurusnya masing-masing dan meneruskan konsultasi-konsultasi dengan panitia.

Kemudian diadakan lagi pertemuan susulan yang jatuh pada tanggal 20 Februari 1927. Wakil-wakil yang hadir seperti *Jong Java*, *Jong Sumatera Bond*, *Seka Rukun*, *Jong Batas Bond*, *Jong Islameten Bond*, *Jong Ambon*, *Jong Minahasa*, dan PPPI. Dalam pertemuan kali ini belum menemukan kesepakatan yang berarti. Fusi yang sejak semula menjadi harapan masih jauh dari angan-angan.

Kegagalan dalam dua kali pertemuan, sebelumnya ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya. Maka pada tanggal 20 April 1927 diadakan kembali pertemuan yang ketiga kalinya. Hadir dalam pertemuan ini adalah *Jong Java*, *JSB*, *Jong Bataks Bond*, *Jong Ambon*, *Jong Minahasa*, Pemuda Indonesia, dan PPPI.¹⁴⁷ Pertemuan kali ini masih membahas tujuan semula yakni untuk mencari wadah tunggal yang belum terselesaikan pada pertemuan sebelumnya.

Pertemuan kali ini telah menemukan titik terang untuk membahas permasalahan selanjutnya. Mereka berhasil merumuskan dasar pemikiran bersama sebagai landasan untuk langkah selanjutnya.

¹⁴⁷ Ahmaddani G. Martha, dkk. *op.cit.* hlm. 64-65

Permasalahan yang telah disepakati bersama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa cita-cita Indonesia Merdeka harus menjadi cita-cita semua putra Indonesia.
2. Semua perkumpulan pemuda harus berdaya upaya menuju penyatuan para pemuda Indonesia dalam satu wadah tunggal.¹⁴⁸

Hasil pertemuan kali ini menunjukkan adanya kemajuan yang telah dicapai dari pada pertemuan sebelumnya. Hal tersebut berarti ada keinginan bersama untuk membentuk satu wadah tunggal yang telah disepakati bersama oleh wakil-wakil organisasi pemuda sebelumnya.

Penegasan-penegasan tersebut menunjukkan bahwa pentingnya penyatuan diantara para pemuda dibawah wadah yang satu. Sehingga dari pertemuan kali ini, para pemuda menyetujui bersama mengenai tujuan akhir perjuangan pemuda Indonesia adalah kemerdekaan Indonesia

Situasi umum pergerakan kebangsaan saling membantu dan mendorong organisasi pemuda untuk saling bekerjasama dalam menentukan fusi atau federasi. Bantuan dan juga dorongan tersebut menghasilkan suatu perkumpulan permufakatan yang bernama Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 64. Dikutipnya dalam *Gadenkboek Jong Java*, tanggal 7 Maret 1915 - 20 April 1930, hlm. 325.

Permufakatan ini terbentuk pada tanggal 17 Desember 1927, dengan programnya adalah sebagai berikut:

1. Berusaha untuk mencapai dan menyamakan arah aksi kebangsaan, memperkuat dan memperbaiki organisasi, dengan kerjasama dengan anggota-anggotanya.
2. Menghindari perselisihan sesama anggotanya, yang hanya bisa melemahkan aksi kebangsaan.¹⁴⁹

Interaksi yang saling mendukung antara organisasi dewasa dengan kaum muda semakin menambah kuat ke arah persatuan dan kesatuan. PPPKI-lah yang bisa mendukung hal semacam itu. Sehingga dalam beberapa bulan kemudian organisasi pemuda semakin matang dan menunjukkan langkah positif ke arah persatuan yang nyata.

Usaha para pemuda untuk bergandeng bersama dalam suatu wadah semakin terasa di kalangan organisasi kepemudaan pada saat itu. Sehingga pada tanggal 3 Mei 1928, disepakati bersama akan diadakan Kongres Pemuda II. Kongres akan dilaksanakan di Gedung Indonesia *Clubgebouw*, Jalan Kramat Raya No. 106.¹⁵⁰

Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan berikutnya tanggal 12 Agustus 1928, yang berhasil menyusun bentuk kepanitian, waktu, tempat, tujuan, dan agenda dalam

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 68.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 69.

kongres. Pada pertemuan ini hampir dihadiri semua wakil-wakil organisasi pemuda yang sejak semula mendukung usaha membentuk wadah kesatuan bersama. Sesuai dengan keputusan tersebut, maka susunan kepanitian Kongres Pemuda II adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Sugondo Joyopuspito (dari PPPI dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum)
2. Wakil Ketua : Joko Marsaid (*Jong Java* dan mahasiswa Fak. Hukum)
3. Sekretaris : Mohammad Yamin (*Jong Sumatera Bond*)
4. Bendahara : Amir Syarifuddin (*Jong Bataks Bond*)
5. Pembantu I : Johan Mohammad Cai (*Jong Islamieten Bond*)
6. Pembantu II : Kacasungkono (Pemuda Indonesia)
7. Pembantu III : Senduk (*Jong Ambon*)
8. Pembantu IV : J. Leimena (*Jong Ambon*)
9. Pembantu V : Rohyani (Pemuda Kaum Betawi).¹⁵¹

Maka pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, diadakanlah Kongres Pemuda II. Hasil kongres tersebut tersusunlah tekad yang kuat untuk bersatu padu di bawah organisasi pemuda-pemuda nasional Indonesia. Maka pada tanggal 28 Oktober 1928 disepakati hasil daripada kongres tersebut sebagai keputusan bersama dari para

¹⁵¹ MD. Sagimun, *90 Tahun Prof. Mr. Soenario (Manusia Langkah Indonesia)* Rosdajaya Putera, Jakarta, 1992, hlm. 166.

pemuda. Keputusan pemuda tersebut sampai sekarang disebut “Sumpah Pemuda”. Bunyinya adalah sebagai berikut:

Pertama : Kami Putera dan Puteri Indonesia, Mengaku
Bertumpah Darah Yang Satu, Tanah Indonesia.

Kedua : Kami Putera dan Puteri Indonesia, Mengaku
Berbangsa Satu, Bangsa Indonesia.

Ketiga : Kami Putera dan Puteri Indonesia, Menjungjung
Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.

Tercetusnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, tersebut, menunjukkan pemuda Indonesia telah mengesampingkan perbedaan perbedaan sempit dan perbedaan yang tidak cocok dengan semangat organisasi pemuda. Semangat dan cita-cita menuju negara kesatuan Indonesia yang merdeka telah dikemukakan pemuda lewat Sumpah Pemuda.

Setelah persatuan pemuda tecetus lewat “Sumpah Pemuda”, maka terlihat jelas bahwa wakil-wakil PPPI mendapat tempat terpenting dalam kepengurusan. Sudah diketahui bahwa PPPI memang memiliki peran penting dalam mempersatukan kalangan pemuda. Hal tersebut dipertegas lagi oleh Sunario, sebagai berikut: “Maka atas inisiatif PPPI, yang bercita-cita menyatukan (melalui *fusi*) semua perhimpunan pemuda, sesuai dengan perjuangan Perhimpunan Indonesia dan PNI, diadakan di Jakarta, Kongres Pemuda-Pemuda

Indonesia yang kedua (27-28 Oktober 1928) di bawah ketua Soegondo.¹⁵²

Pengaruh PPPI dalam Kongres Pemuda II secara tidak langsung diilhami oleh semangat Perhimpunan Indonesia. Keberadaan PPPI merupakan penerus cita-cita dan ideologi Perhimpunan Indonesia. Diketahui bahwa Kongres Pemuda tersebut telah mendapat masukan dari tokoh-tokoh alumni Perhimpunan Indonesia seperti Sunario, Arnold Mononutu, Sartono Kartodirdjo, dan Mohammad Nasif. Walaupun tokoh-tokoh tersebut mewakili organisasinya untuk ikut dalam Kongres Pemuda II, seperti Sartono mewakili PNI, dimana PNI pada dasarnya kelanjutan ideologi Perhimpunan Indonesia, kemudian Sunario mewakili PAPI (Persaudaraan Antara Pandu Indonesia) dan Arnold Mononutu, yang mewakili Perserikatan Minahasa, mereka adalah tokoh alumni Perhimpunan Indonesia.

Mengenai hubungan Perhimpunan Indonesia dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 tersebut, Muhammad Hatta mengatakan sebagai berikut:

“Adalah benar dan tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar dari Pemuda-Pemuda Indonesia di tanah air telah terpicat oleh asas-asas kita. Dan mereka tidak tinggal diam menanam dan menghidupkan cita-cita yang dianjurkan oleh Perhimpunan Indonesia. Di atas persada tanah air yaitu Indonesia satu dan tidak terbagi-bagi. Dalam tahun 1928, pergerakan pemuda yang bersifat kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumateranen

¹⁵² Sunario, *op.cit.*, hlm. 60.

Bond, Jong Ambon, Jong Celebes, dan lain-lain, bergabung menjadi Pemuda Indonesia dengan mengambil suatu keputusan yang bersejarah, yang menentukan bentuk Indonesia untuk masa datang”.¹⁵³

Memang antara Perhimpunan Indonesia dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, memiliki hubungan yang sangat erat. Pengaruh Perhimpunan Indonesia memang sangat besar dalam perkembangan organisasi-organisasi, Perkumpulan Pelajar dan sampai lahirnya Sumpah Pemuda. Sehingga Perhimpunan Indonesia dapat disebut sebagai Roh dari semua perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia sampai Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945.

¹⁵³ *Ibid*, hlm. 60-61.

BAB IV

SUMBANGAN PERHIMPUNAN INDONESIA BAGI BANGSA INDONESIA

A. Kontribusi Perhimpunan Indonesia Bagi Bangsa Indonesia

Perhimpunan Indonesia berdiri sejak tahun 1908 sampai sekitar tahun 1920-an belum bergerak dalam bidang politik. Arah dan tujuan perjuangannya masih bersifat sosial-budaya, walaupun diketahui bahwa tokoh tiga serangkai telah mempengaruhinya. Perjuangan Perhimpunan Indonesia masih sebatas Ide-ide untuk tujuan Indonesia merdeka. Perubahan perjuangan Perhimpunan Indonesia dalam bidang politik, baru mulai aktif sejak kepemimpinan Herman Kartowisastro sampai dengan kepemimpinan Muhammad Hatta. Perhimpunan Indonesia telah terlibat dalam propaganda-propaganda tentang masalah Indonesia dan tujuan Indonesia merdeka di dalam negeri Belanda, luar negeri Belanda dan juga di Indonesia. Berangkat dari semua itu, tentunya Perhimpunan Indonesia memiliki peranan dan sumbangan untuk bangsa Indonesia. Peran dan sumbangan Perhimpunan Indonesia tersebut berupa nama Indonesia, bahasa Indonesia, bendera, identitas nasional, pergerakan nasional, ide persatuan, dan ideologi perjuangan lainnya.

Pada masa kepemimpinan Herman Kartowisastro (1922-1923) terjadi perubahan nama organisasi. Semula bernama "*Indische Vereeniging*" diubah menjadi "*Indonesische Vereeniging*". Kata "*Indische*" diganti dengan "*Indonesische*". Perubahan nama tersebut menunjukkan adanya suatu

perkembangan kesadaran nasional dari para anggota Perhimpunan Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya terjadi perubahan nama dari "*Indonesische Vereeniging*" menjadi "Perhimpunan Indonesia". Kemudian diikuti pula perubahan pada media propaganda seperti majalah "Hindia Putera" menjadi "Indonesia Merdeka". Perubahan nama ini telah mengandung arti politik, sehingga pada kepemimpinan Sukiman, nama "Indonesia" secara resmi digunakan dalam propaganda di luar negeri. Sedangkan nama yang masih menggunakan bahasa Belanda tidak dipakai lagi.

Secara resmi kata "Indoensia" disebut untuk Perhimpunan Indonesia. Nama "Indonesia" digunakan pertama kali oleh dua orang sarjana, yakni *anthropolog* James Ricardson Logan berkebangsaan Inggris yang ditulis dalam *Journal Indian Archipelago* pada tahun 1850. Istilah "Indonesia" dipergunakan pula oleh Prof. Herr Adolf Bastian, *ethnolog* Jerman, dalam bukunya yang berjudul "*Indonesian Oder die Inseln des Malayischen Archipels*" 1884-1889 atau Indonesia atau Pulau Indonesia itu di Kepulauan Malaysia.

Pemakaian nama tersebut dipergunakan untuk menunjukan wilayah-wilayah hukum adat yang meliputi Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sebelah Barat Samudera Hindia yang terletak di Madagaskar, terdapat kerajaan Merina yang didirikan oleh orang-orang emigran Indonesia dengan latar belakang adat istiadat Indonesia pula. Sedangkan dari sebelah Timur Samudera Pasifik "*Easter Island*" dekat Chili, di Utara Taiwan terdapat emigran suku Dayak di *Borneo* (Kalimantan), dengan membawa hukum dan adat-istiadatnya yang khas.

Sebagai contoh adalah orang Philipina berasal dari orang Melayu terdapat hukum dengan adatnya, begitu pula orang Dayak, Sumatera, Jawa, Sunda, Asmat dan lain sebagainya.

Sejak tanggal 8 Februari 1925, untuk pertama kalinya nama “Indonesia” populer dalam artian politik, mulai dikalangan orang Indonesia sendiri kemudian di Netherland dan juga dunia internasional. Perubahan nama tersebut sangat penting bagi Perhimpunan Indonesia dan bangsa Indonesia. Bukan hanya menggambarkan Indonesia bebas dari Netherland, akan tetapi Indonesia yang merdeka dan bersatu. Penggunaan nama “Indonesia” tersebut berarti telah menjadi peletak dasar ketatanegaraan Indonesia.

Perhimpunan Indonesia juga pada saat itu masih mencari identitas nasional yang tepat sebagai alat komunikasi. Maka, Perhimpunan Indonesia menggunakan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Perhimpunan Indonesia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Perhimpunan Indonesia menggubahkan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi didasarkan pada konsep nusantara. Nama Indonesia sendiri telah mengandung arti nusantara yakni terdiri dari banyak pulau, bahasa, etnis, agama, budaya dan adat istiadat masing-masing daerah. Subardjo sendiri mengatakan bahwa menggunakan kata-kata dan kalimat dalam bahasa Melayu terasa lebih serasi karena berasal dari nenek moyang kita.¹⁵⁴ Berarti bahasa Indonesia memang tepat dipergunakan untuk wilayah Indonesia seperti yang telah diperjuangkan oleh Perhimpunan Indonesia

¹⁵⁴ Ahmad Subardjo, 1978, *op.cit*, hlm. 117.

dalam propagandanya di dalam negeri Belanda, luar negeri, maupun di Indonesia sendiri.

Selain itu, Perhimpunan Indonesia menggunakan lambang merah putih untuk organisasi. Pemakaian merah putih untuk lambang organisasi tersebut disampaikan oleh Subardjo dalam rapat-rapat yang dipimpin oleh Herman Kartowisastro yang disetujui oleh anggota rapat. Di tengah-tengah warna merah putih diberi gambar kepala kerbau. Gambar kepala kerbau berarti lambang kesabaran, ketabahan dan keberanian orang Indonesia.¹⁵⁵ Pikiran untuk menggunakan lambang kepala kerbau diambil dari buku Multatuli yang berjudul "*Max Havelaar*", sebuah sajak prosa yang mengangkat korban-korban ketidakadilan sosial rakyat Indonesia. Pemakaian warna merah putih untuk lambang Perhimpunan Indonesia, ditemukan pula pada lambang organisasi PNI, sehingga pada puncaknya digunakan untuk bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketika dikibarkan pertama kali sewaktu proklamasi kemerdekaan Indonesia.

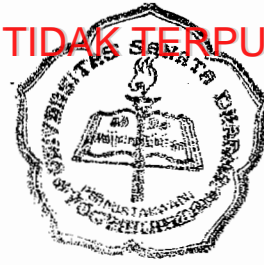
Perhimpunan Indonesia juga telah menggunakan identitas nasional sebagai dasar perjuangannya seperti pemakaian kopiah. Ide awalnya cukup sederhana yakni untuk menghindari pandangan orang Eropa bahwa mahasiswa Indonesia berasal dari China dan Jepang. Melihat kebiasaan orang Eropa memakai topi seperti Koboy Amerika Serikat, maka Perhimpunan Indonesia

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm. 118.

mencari sendiri identitasnya. Maka, para anggota Perhimpunan Indonesia dalam perjalanan maupun propagandanya menggunakan kopiah.

Perhimpunan Indonesia selama masa perjuangannya telah meletakkan dasar cita-cita persatuan seluruh bangsa Indonesia. Cita-cita tersebut kita temukan dalam pemakaian nama Indonesia. Ideologi yang dikemukakan Perhimpunan Indonesia dalam perjuangannya ialah *non-cooperation* dan swadaya. Inilah yang disebarluaskan oleh para alumni Perhimpunan Indonesia yang pulang ke tanah air dengan mempengaruhi ideologi partai-partai yang ada. Realisasi nyata dari ide persatuan dari ideologi dan cita-cita Perhimpunan Indonesia adalah terbentuknya PPPKI yang membawahi *studie clubs*, PNI, Pemuda Indonesia dan *Jong-Jong*. Disinilah pertama-tama persatuan bangsa Indonesia terbentuk, sampai lahirnya Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum ide persatuan muncul pertama kali, Perhimpunan Indonesia telah meletakkan dasar ideologi *non-cooperation* dan percaya pada diri sendiri. *Non cooperation* adalah satu-satunya cara perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. *Non cooperation* sendiri muncul akibat pertentangan kepentingan antara terjajah dengan penjajah. Cara perjuangannya ialah menolak duduk dalam dewan-dewan perwakilan yang didirikan oleh pihak kolonial, baik itu di pusat Propinsi maupun di daerah-daerah Kabupaten. *Non cooperation* bukanlah perjuangan anarki, akan tetapi menolak turut serta dalam parlemen. Menurut Perhimpunan Indonesia, parlemen yang ada bukan untuk kepentingan rakyat.



Parlemen yang diharapkan Perhimpunan Indonesia adalah parlemen yang dipilih oleh dan dari rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat, badan tempat pemerintah bertanggungjawab atas kebijaksanaan tugasnya.

Perjuangan *non cooperation* bagi Muhammad Hatta adalah suatu senjata perjuangan, satu *rationale strijdmethode* (cara perjuangan nasional), didapat dengan logika yang sehat.¹⁵⁶ Sifat *non cooperation* adalah mengkritik dan pendidikan.¹⁵⁷ Maksudnya adalah melakukan kritik terhadap pemerintah dengan demikian secara langsung memberikan pendidikan bagi masyarakat dan akan menumbuhkan kesadaran nasional Indonesia.

Non cooperation akan tercapai jika dilandasi percaya pada diri sendiri. Sedangkan percaya pada diri sendiri adalah percaya pada kemampuan diri sendiri untuk mencapai kemerdekaan, tanpa bantuan orang lain atau bangsa lain. Status bangsa Indonesia dijajah, maka harus mempunyai kepercayaan akan diri sendiri dari kemampuan bangsanya. Kepercayaan pada kemampuan sendiri akan menimbulkan aksi untuk mencapai hasil perjuangan. Oleh karena bangsa Indonesia dijajah begitu lama maka aksi diperlukan baik dengan cara moderat maupun radikal. Muhammad Hatta sendiri mengatakan sebagai berikut: "Rakyat diajar berjuang sendiri untuk memiliki keadilan ekonominya dimana tempat kaum

¹⁵⁶ Deliar Noer, *op.cit*, hlm. 56. Dikutipnya dalam *Non Cooperation Bukan Non Aksi*, 1932, hlm. 164.

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm. 58.

pergerakan harus membantu dan memberi pimpinan. Dengan jalan *fighting spirit* (semangat perjuangan) rakyat kita akan bagaimana”.¹⁵⁸

Menurut Muhammad Hatta lagi, Belanda menjajah Indonesia sangat lama, baik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Sehingga dalam bidang politik diharapkan hendaknya tidak bekerjasama dengan pemerintah. Pemimpin-pemimpin Indonesia diharapkan tidak pula bekerja sebagai pemerintah. Sedang dalam bidang ekonomi, dengan koperasi sebagai kekuatan nyata diharapkan bisa menumbuhkan potensi ekonomi para masyarakat Indonesia. Dan, dalam bidang sosial diharapkan percaya pada diri sendiri yakni dengan menumbuhkan rasa kebersamaan seluruh rakyat Indonesia.

Setelah menjalankan *non cooperation* dan percaya akan diri sendiri, maka persatuan Indonesia pasti akan tercapai. Semangat persatuan muncul sebagai akibat pertentangan antara penjajah dengan terjajah yang menginginkan kekuasaan mutlak di Indonesia. Oleh sebab rongrongan dari gerakan nasional, maka pemerintah Belanda meningkatkan kekuasaannya. Supaya tercapai tujuan persatuan nasional diperlukan suatu aksi massa. Jadi, pembentukan kekuasaan bisa tercapai dengan melakukan propaganda untuk meningkatkan persatuan dan solidaritas, kepercayaan diri dan kesadaran diri.¹⁵⁹ sesuai dengan rumusan Perhimpunan Indonesia tahun 1924, adalah sebagai berikut:

“Hanya dengan Indonesia yang merasa satu, dengan mengesampingkan perbedaan kelompok sesamanya, yang mungkin mematangkan

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm. 48.

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 61.

kekuasaan penjajah. Tujuan bersama pembebasan Indonesia – menuntut munculnya aksi massa nasionalis yang sadar dan bergantung pada kekuatannya sendiri”¹⁶⁰

Perhimpunan Indonesia juga menambahkan: “Berusaha mencapai tujuannya terutama dengan memperkuat ide persatuan Indonesia”.¹⁶¹

Perjuangan Perhimpunan Indonesia di luar negeri dengan melakukan propagan-propaganda hanya untuk tujuan Indonesia merdeka. Sampai di Indonesia pun, Perhimpunan Indonesia terlibat aktif dengan mendirikan panitia persatuan (*Eenheids Comite*) di Bandung pada tanggal 21-22 Agustus 1926, oleh Sunario. Di dalamnya terdiri dari 14 partai besar dan kecil. Peranan alumni Perhimpunan Indonesia juga aktif dalam pembentukan Konsentrasi Nasional Indonesia Muda pada tahun 1927 dan juga sampai dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

B. Hasil yang Telah Diperoleh Perhimpunan Indonesia Selama 5 Tahun (1925-1930)

1. Hubungan Perhimpunan Indonesia dengan Para Pemimpin Dunia

Perhimpunan Indonesia di Nederland pada awalnya merupakan organisasi sosial budaya yang belum bergerak dalam bidang politik. Perubahan Perhimpunan Indonesia baru setelah datangnya para pemimpin *Indische Partji*, kemudian reaksi para anggota yang tidak percaya pada sikap pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku tidak adil dan datangnya para

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 62. Keterangan Asas PI pada tahun 1924.

¹⁶¹ *Idem*.

mahasiswa angkatan baru, yang mendorong semangat baru pula bagi perjuangan Perhimpunan Indonesia.

Setelah Perhimpunan Indonesia berjuang dalam bidang politik, maka arah dan tujuannya adalah untuk Indonesia Merdeka. Langkah tepat untuk mewujudkannya adalah dengan memperkenalkan tentang Indonesia kepada tanah air, di dalam negeri Belanda sendiri, dan juga ke negara-negara Eropa.

Kesempatan propaganda di dalam dan luar negeri Belanda inilah tidak disia-siakan oleh para anggota Perhimpunan Indonesia untuk berjumpa dengan para tokoh dunia. Setiap pertemuan ataupun kongres, baik hanya sebagai tamu undangan dalam seminar dan lain sebagainya, Perhimpunan Indonesia secara langsung berjumpa bahkan berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa dari Asia, Afrika, dan juga para tokoh penting dari pemerintahan Belanda dan juga Eropa. Hubungan tersebut bukan berlangsung begitu saja, akan tetapi berlangsung secara baik dengan semangat dan cita-cita yang hampir sama dari para tokoh yang menginginkan kemerdekaan tanah airnya, karena pada saat itu Asia dan Afrika merupakan bangsa yang dijajah dan belum merdeka.

Pertama-tama para mahasiswa di Nederland tergabung dalam "*Indonesische Verbond Van Studenten*" atau Persekutuan Pelajar dari Indonesia, yang merupakan gabungan dari perkumpulan mahasiswa baik dari Indonesia, China (Chung Hua Hui) dan beberapa perkumpulan mahasiswa

Belanda.¹⁶² Di sana para anggota Perhimpunan Indonesia bertemu dengan mahasiswa Cina seperti Oey Kiauw Pik. Perhimpunan Indonesia juga bertemu dengan tokoh penting dari Asia dan Afrika ketika Arnold Mononutu di Paris untuk mengikuti perkumpulan mahasiswa dari Asia. Di Nederland, Perhimpunan Indonesia bergabung dengan Liga Cabang Belanda dan SDAP.

Kemudian Perhimpunan Indonesia mengirimkan wakilnya ke Kongres Anti Imperialisme, di Brussel tahun 1927. Pada kesempatan ini, Perhimpunan Indonesia berhubungan baik dengan tokoh-tokoh dari Asia dan Afrika seperti Jawaharlal (India), Hafes Ramadan Bey (Mesir), Mazhur Bagal Sakri (Suriah), Hadh Ahmad Mossali (Wakil Muslimin Tunisia, Aljair dan Maroko), Chadli bin Mustafa (Partai Nasrani Tunisia), dan Lomine Senghor (*Negro*). Kesempatan lain Hatta berjumpa lagi dengan Nehru di Gland, Swiss, pada Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kemerdekaan. Interaksi yang terus berlanjut semakin menguatkan hubungan baik sesuai dengan cita-cita untuk kemerdekaan tanah air masing-masing.

Para anggota Perhimpunan Indonesia menjalin hubungan yang sangat baik dengan tokoh-tokoh perkumpulan para mahasiswa tersebut. Tokoh-tokoh inilah yang kelak menjadi haluan dalam melawan kolonialisme di negaranya. Mereka juga menjadi tokoh-tokoh besar yang dikagumi dunia untuk membebaskan penderitaan rakyatnya dari kolonial dengan memperoleh kemerdekaan.

¹⁶² Ahmad Subardjo, 1978, *op.cit*, hlm. 112.

Sampai Indonesia merdeka yang mengakui bahwa Indonesia merdeka, pertama kalinya adalah dari negara Mesir, India dan bangsa-bangsa Arab. Tidak hanya itu, berkat pertemuan para anggota Perhimpunan Indonesia dengan mahasiswa Asia dan Afrika, lahirlah Konferensi Asia-Afrika tahun 1955, di Bandung. Pertemuan Hatta, subardjo, Nazir Pamuntjak dan tokoh Perhimpunan Indonesia lainnya dengan para mahasiswa Asia dan Afrika seperti dari India dan sebagainya, dalam Kongres Anti Imperialisme di Brussel dan Kongres Demokrasi di Bierville, bertemu lagi dengan cita-cita yang sama di Konferensi Asia-Afrika, Bandung.

2. Simpati Dunia Internasional terhadap Indonesia

Melalui perjuangan Perhimpunan Indonesia baik melalui propaganda politik maupun dengan menggunakan media seperti majalah dan artikel-artikel dengan tujuan di beberapa negara Eropa, Asia dan Afrika, sangat mendukung perjuangan Kemerdekaan Indonesia.

Dukungan pertama adalah dilakukan oleh orang Belanda sendiri yang sangat anti penindasan dan mendukung hak asasi manusia dan kebebasan. Dukungan yang paling nyata bagi Perhimpunan Indonesia adalah ketika pembelaan disidang pengadilan Den Haag, Belanda, pada kasus penangkapan Mohammad Hatta, Nazir Pamutjak, Ali Sastro Amidjoyo, dan Ahmad Subardjo, mereka mendapat pembelaan dari Mr. E. J. W. Duijs, dan Mr. T.J. Mobach. Mereka sangat simpati terhadap perjuangan Perhimpunan Indonesia, sebelum akhirnya mereka bebas dari tuduhan pemerintah Belanda bahwa

Perhimpunan Indonesia menggunakan niat jahat yang ingin menggulingkan pemerintah Belanda. Dukungan terhadap perjuangan Perhimpunan Indonesia dari orang-orang Belanda yang bersimpati tidak hanya itu, selain dari SDAP yang diketuai oleh E. J.W.Duijs, juga mereka didukung oleh perkumpulan Kaum Muda Sosialis (A. J. S. = *Assosiatie van Jong Socialisten*) yang ada di bawah SDAP. Para anggota A.J.S, bersimpati dengan mengatakan bahwa: “Jangan kecil hati, kawan-kawan mahasiswa Indonesia, kami ada dibelakang kalian”.¹⁶³

Dukungan diperoleh Perhimpunan Indonesia di negara-negara Eropa yakni melalui propaganda baik lewat rapat, ceramah, seminar, maupun lewat pergaulan lewat studi. Seperti pada Kongres Anti Imperialisme di Brussel, Perhimpunan Indonesia berhasil menggolkan tujuan Indonesia Merdeka. Kemudian Perhimpunan Indonesia juga melalui ketuanya Hatta, diundang oleh Liga Wanita untuk Perdamaian dan Kemerdekaan, di Gland, Swiss.

Hal itu semua bagi Perhimpunan Indonesia merupakan sambutan yang positif dari perjuangan mereka untuk tujuan Indonesia Merdeka. Perjuangan mereka untuk memperkenalkan cita-cita Indonesia merdeka ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Simpati datang justru banyak dari negara-negara yang menjalankan politik Kolonialisme dan Imperialisme.

¹⁶³ Ali Satroamidjyo, *op.cit*, hlm. 57.

3. Pengaruh Perhimpunan Indonesia terhadap Indonesia

Perhimpunan Indonesia sangat mempengaruhi perjuangan kemerdekaan di tanah air. Model perjuangan yang ditawarkan Perhimpunan Indonesia melalui ideologi dan cita-citanya berkembang pesat di Indonesia.

Mempengaruhi tokoh-tokoh pemuda dan pelajar di tanah air. Sesuai dengan program kerja Perhimpunan Indonesia, yakni propaganda Indonesia Merdeka secara intensif dilakukan di Indonesia sendiri. Hal ini sangat mempengaruhi orang-orang dalam gerakan kemerdekaan Indonesia yang telah didirikan oleh para alumni Perhimpunan Indonesia sendiri. Tokoh yang sangat terpengaruh adalah Ir. Sukarno dengan mendirikan PNI yang berlandaskan ideologi Perhimpunan Indonesia.

Cara perjuangannya melalui pergerakan kemerdekaan Indonesia telah menempatkan Perhimpunan Indonesia sebagai inspirator pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sehingga Perhimpunan Indonesia diakui sebagai “*front terdepan*” pergerakan kebangsaan Indonesia oleh PPPI yang diketuai oleh Sukarno.¹⁶⁴

Jadi, sumbangan Perhimpunan Indonesia bagi bangsa Indonesia sangat besar. Perhimpunan Indonesia memberikan kontribusi seperti nama Indonesia, bahasa Indonesia, nasionalisme, identitas nasional, ide-ide persatuan, solidaritas, *non cooperation* dan swadaya. Perhimpunan Indonesia dikatakan

¹⁶⁴ Ahmaddani, G. Martha, dkk. *op.cit*, hlm. 41.

berhasil atau tidak berhasil selama perjuangannya dalam kurun waktu lima tahun (1925-1930), penulis beranggapan bahwa apapun pendapat tersebut, tergantung dari sudut pandang masing-masing.

Penulis mengatakan bahwa Perhimpunan Indonesia berhasil dalam perjuangannya untuk tujuan persatuan dan Indonesia Merdeka. Hal tersebut terbukti dengan pertama-tama Perhimpunan Indonesia bisa menjalin hubungan baik dengan para tokoh-tokoh pemimpin dunia maupun para mahasiswa Asia-Afrika. Yang kemudian menjadi pemimpin kemerdekaan nasional negaranya masing-masing. Kedua, Perhimpunan Indonesia mendapat simpati akan perjuangan mereka dari dalam negeri Belanda sendiri, beberapa negara Eropa, negara-negara Asia Afrika, dan juga masyarakat Indonesia. Dan ketiga, Perhimpunan Indonesia bisa mempengaruhi tokoh-tokoh perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia menaruh besar terhadap perjuangan Perhimpunan Indonesia di Nederland ketika itu. Buktinya ideologi dan cita-cita perjuangan Perhimpunan Indonesia untuk Indonesia merdeka, dianut oleh partai-partai dan organisasi di tanah air. Tidak hanya itu, pengaruh ideologi Perhimpunan Indonesia juga mempengaruhi tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Ir. Sukarno, proklamator bangsa Indonesia.

BAB V
KESIMPULAN

Teori Ernest Renan mengatakan bahwa nasionalisme merupakan paham sekelompok orang yang mempunyai keinginan bersama untuk bersatu dan mempertahankan persatuan tersebut. Menanggapi pendapat Ernest Renan tersebut, Ahmad Subardjo mengatakan bahwa nasionalisme merupakan kemauan untuk hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, meskipun berbeda bahasa, rakyatnya, budaya, agama, dan lain sebagainya.

Bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan bukanlah hal yang gampang. Salah satu syaratnya adalah persatuan seluruh bangsa Indonesia. Untuk menyatakan persatuan dengan kesadaran bersama, bukan pula pekerjaan yang murah, melainkan menempa diri dari tantangan kolonial Belanda. Sebenarnya cikal bakal persatuan tersebut telah tumbuh sejak Indonesia belum ada, yakni dimulai ketika Nusantara menjadi area perdagangan internasional. Disana benih-benih persatuan mulai nampak ketika terjadinya interaksi antara pedagang nusantara maupun ketika mendapat pertentangan dari pedagang asing. Sampai pada masuknya kolonial ke Indonesia, terasa semakin sulit untuk mewujudkan ide-ide persatuan. Apalagi sampai menuntut Indonesia merdeka, masih jauh dari harapan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya hambatan dari politik kolonial sampai pada dalam diri masyarakat Indonesia sendiri. Namun, ketika pendidikan mulai masuk dan semakin banyaknya rakyat Indonesia mengenyam pendidikan Barat, rambu-rambu ke arah persatuan

semakin tumbuh dikalangan intelektual. Semuanya itu merupakan perjalanan panjang sejarah Indonesia yang menuntut hidup setara dengan bangsa lain di dunia.

Tidak terlepas dari permasalahan di atas, sebenarnya yang menyebabkan bangsa Indonesia belum bisa bersatu apalagi merdeka adalah sistem politik kolonial yang diskriminatif, baik dalam politik pemerintahan, pendidikan, ekonomi, sosial, maupun budaya. Permasalahan persatuan untuk kemerdekaan Indonesia semakin mencuat ketika rasa nasionalisme menyebar dikalangan kaum pergerakan dan intelektual Indonesia. Sehingga, kaum pergerakan maupun kaum intelektual muda, seakan-akan berlomba untuk mencari jati diri yang tepat untuk bangsa Indonesia.

Perjuangan untuk kemerdekaan semakin mantap setelah kesalahan kolonial sendiri yakni dengan mendirikan pendidikan rendah, menyekolahkan para pelajar ke luar negeri, sampai akhirnya menentang status *quo* kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia-lah yang telah menjadi *front* terdepan dari ide-ide kemerdekaan Indonesia. Selama lima tahun perjuangan Perhimpunan Indonesia bukanlah perjalanan yang pendek tanpa hasil. Sejak 1923-1928, Perhimpunan Indonesia-lah yang telah memegang peranan penting dalam gerakan kebangsaan Indonesia dan sulit dibayangkan jika melihat jumlah anggotanya hanya dari kalangan pelajar yang masih muda dan terbatas.

Tugas utama dan yang paling berat dari Perhimpunan Indonesia adalah membebaskan masyarakat Indonesia dari belenggu psikologis kolonial. Menurut Perhimpunan Indonesia masyarakat Indonesia telah dibodohi dengan janji-janji, kerjasama dan tawaran sikap penghormatan kepada kolonial. Bisa dibayangkan sikap

elit intelektual yang menentang kolonial, yang selamanya mereka bisa hidup dari bekerja dari kolonial. Membuang rasa rendah diri dan percaya pada kemampuan sendiri inilah yang ditekankan Perhimpunan Indonesia. Oleh sebabnya, Perhimpunan Indonesia menawarkan cara “revolusi” untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka.

Dari uraian penulis di atas, terutama yang terdapat dalam Bab II sampai dengan Bab IV, dapat dikatakan bahwa hipotesis yang diajukan dalam Bab I sub Bab G, dapat dinyatakan benar dan teruji. Adapun hasil kesimpulan dari uraian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kedatangan para pemimpin *Indische Partij*, ketidakpercayaan rakyat Indonesia yang diwakili kaum intelektual terhadap pemerintah dan kedatangan para mahasiswa berikutnya yang membawa kesadaran politik baru untuk melawan pemerintah Hindia Belanda, ternyata membawa perubahan perjuangan *Indische Vereeniging* ke arah politik yang *revolusioner* dan radikal. Atau tepatnya selama kepemimpinan Sutan Casyangan Saripada, *Indische Vereeniging* masih berkuat dalam gerakan sosial budaya, akan tetapi setelah kedatangan Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Hatta, Subardjo, dan tokoh-tokoh lainnya, merubah arah dan tujuan politiknya. Selama tahun-tahun awal, Perhimpunan Indonesia masih bersifat perkumpulan sosial budaya dari para pelajar yang jauh dari tanah air. Perubahan semakin terasa ketika perkumpulan mendapat suntikan ide-ide persatuan dan kemerdekaan dari tokoh *Indische Partij*. Kedatangan para tokoh ini berhasil mengembangkan ideologi sekuler bagi Perhimpunan Indonesia. Memang Perhimpunan Indonesia semula masih bernama

Indische Vereeniging, mengaitkan perjuangan mereka dengan permasalahan yang terjadi di tanah air, baik masalah penjajahan, tidak leluasa dalam *Volksraad* dan juga kemerdekaan yang tidak dipenuhi pemerintah Hindia Belanda. Diketahui bahwa ketiga tokoh tersebut telah memiliki pengaruh di tanah air, baik dalam partai, gerakan kemerdekaan menuntut India lepas dari Hindia Belanda maupun tulisan-tulisan mereka dalam majalah-majalah yang sangat mengkritik dan membahayakan pemerintah jika tetap dibiarkan.

2. Kegiatan politik Perhimpunan Indonesia pertama dilaksanakan di dalam negeri Belanda sendiri, baru setelah itu ke luar negeri atau beberapa negara Eropa dan mendukung gerakan kemerdekaan di Indonesia. Ide-ide *revolusioner* baru terangkat ke permukaan setelah kepemimpinan Herman Kartowisastro tahun 1922-1923. Namun perumusan asas-asas yang lebih jelas mengenai tuntutan Indonesia merdeka adalah pada kepemimpinan Sukiman Wiryosanjoyo. Apalagi setelah kepemimpinan Hatta, kegiatan politik Perhimpunan Indonesia lebih aktif dan berani dalam melaksanakan propaganda tentang masalah Indonesia dan tuntutan Indonesia merdeka di dalam dan Luar negeri Belanda. Menjawab hipotesis dalam skripsi ini, berarti sejak kepemimpinan Sutan Casyangan yakni 1908-1922, penulis menyimpulkan masa pra-kesadaran politik, kemudian periode 1922-1925 merupakan masa kesadaran politik dan tahun 1925-1930 merupakan periode puncak sampai menurunnya aktivitas politik Perhimpunan Indonesia. Artinya, Perhimpunan Indonesia sejak kepemimpinan awal merasa yakin dengan kegiatan politiknya untuk memperkenalkan masalah Indonesia dan tuntutan Indonesia

merdeka, baik di dalam negeri Belanda maupun ke negara-negara Eropa dan mendukung gerakan kemerdekaan di Indonesia. Kalau tidak yakin mana mungkin Perhimpunan Indonesia bisa melaksanakan propaganda politik yang begitu besar untuk sebuah gerakan *revolusioner non* fisik, jika dibandingkan gerakan *revolusioner* fisik sekalipun. Walaupun di Indonesia sendiri gerakan *revolusioner* fisik telah didahului oleh PKI yang berakhir gagal.

Berdasarkan keyakinan akan diterimanya perjuangan politik tersebut, maka Perhimpunan Indonesia melaksanakan berbagai macam propaganda. Pertama mereka ikut berbagai kegiatan politik seperti masuk dalam SDAP, CPN dan lain sebagainya, memperkenalkan Indonesia dikalangan akademisi dan mahasiswa di negeri Belanda yang kebanyakan dari Asia dan Afrika, juga ikut Konferensi Perdamaian untuk Kemerdekaan di Bierville, Perancis dan Kongres Anti Imperialisme di Brussel, Belgia. Keyakinan politik Perhimpunan Indonesia tidak hanya di luar negeri ideologi mereka diterima, akan tetapi lebih sempurna lagi ketika rakyat Indonesia menerima dan mendukung perjuangan dan ideologi tersebut. Oleh sebab itu, Perhimpunan Indonesia tidak hanya mengembangkan ideologinya di luar negeri akan tetapi lebih mempraktekannya di tanah air. Para alumni Perhimpunan Indonesia hampir semuanya terlibat aktif dalam politik ketika telah sampai di tanah air. Bisa dibayangkan berdirinya *Studieclubs*, Pemuda Indonesia, PPPI, PNI, seluruhnya ciptaan Perhimpunan Indonesia, demikian organisasi berikutnya seperti Partindo dan PNI baru. Tiga organisasi yaitu PNI, Partindo dan PNI Baru, hampir semuanya mendominasi gerakan

kebangsaan Indonesia sampai kemerdekaan Indonesia. Dan alumni Perhimpunan Indonesia yang tidak masuk dalam gerakan kebangsaan tersebut masih berkesempatan masuk dalam organisasi lain seperti Budi Utomo, Partai Serikat Islam, dan Kelompok Pelajar Bandung dan Surabaya, yang lebih berhati-hati dan mendukung gerakan dari sosial budaya.

3. Sumbangan Perhimpunan Indonesia yang terbesar adalah mengembangkan ideologi yang sekuler untuk menjadi dasar pergerakan kebangsaan Indonesia setelah tahun 1927-an. Mungkin tidak ada satupun ideologi di dunia ini yang *orisinil*, namun ideologi yang dikemukakan Perhimpunan Indonesia adalah satu-satunya bisa menyatukan unsur-unsur itu ke dalam organisasi yang bersatu. Perhimpunan Indonesia-lah, perkumpulan pertama dari gerakan kebangsaan Indonesia yang menggunakan nama "Indonesia". Walaupun misalnya dianggap tidak menghasilkan sesuatu, namun penulis menyimpulkan bahwa perjuangan Perhimpunan Indonesia sangat besar. Karena Perhimpunan Indonesia telah menjadi peletak dasar ketatanegaraan Indonesia, kemudian usahanya mengembangkan jati diri nasional, bukan bersifat kedaerahan, dan sumbangannya seperti ide *non cooperation*, percaya pada diri sendiri, solidaritas, dan ide persatuan, Perhimpunan Indonesia tetap menjadi arti penting bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Menurut John Ingleson 1993:105, Perhimpunan Indonesia juga berperan membangkitkan perasaan kebangsaan terhadap Indonesia dan menyalurkannya dalam arah yang mempengaruhi jalannya gerakan nasionalis Indonesia selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmaddani, G. Martha, dkk.,

1984; *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, PT.

Karlina Purbasari, Jakarta.

Burger, D.H,

1957; *Sejarah Ekonomi Sosiologi Indonesia*, (Terjemahan), Pradnya

Paranita, Jakarta.

Chafer, Bayd. C,

1955; *Nasionalism Myth And Reality*, A. Harverst Book Harcourt, Brace

And World, l.nc: New York.

Dahm, Bernhard,

1987; *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, (Terjemahan). LP3ES,

Jakarta.

Dhofier, Zamaksyari,

1983; *Jalan Kepengasingan*, DP3ES, Jakarta.

Djoyoadisuryo, Ahmad Subardjo,

1975; *Peranan Ide-ide dalam Gerakan Kemerdekaan Indonesia*, Yayasan

Idayu, Jakarta.

.....,

1978; *Kesadaran Nasional, Otobiografi*, Gunung Agung, Jakarta.

Duijs, Mr. J.E.W, diterjemahkan oleh K.M.L. Tobing,

1985; *Membela Mahasiswa Indonesia di Depan Pengadilan Belanda*,
Gunung Agung, Jakarta.

Friedman, L.L.D.W,

1961: *Politik Dunia*, (Terjemahan), Sumur Bandung, Bandung.

Gottschalk, Louis,

1986: *Mengerti Sejarah* (terjemahan), Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Hatta, Muhammad,

1953: *Kumpulan Karangan I*, Penerbit dan Balai Buku Indonesia, Jakarta,
Amsterdam dan Surabaya.

.....,

1953: *Kumpulan Karangan IV*, Penerbit dan Balai Buku Indonesia, Jakarta,
Amsterdam dan Surabaya.

.....,

1979: *Memoir*, Tinta Mas, Jakarta.

.....,

1976: *Berpartisipasi dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Yayasan
Idayu, Jakarta.

.....,

1960: *Pengantar Kejalan Ilmu Pengetahuan*, PT. Pembangunan, Jakarta.

.....,

1980: *Nama Indonesia (Penemuan Komunis?)*, Yayasan Idayu, Jakarta.

Hardjosoediro, Soejitno,

1979: *Kronologi Pergerakan Kemerdekaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Ihsan, Zainoel A. dan Soeharto, Pitut,

1981: *Aku Pemuda Kemarin di Hari Esok*, Aksara Jayasakti, Jakarta.

.....,

1982: *Belunggu Ganas*, Aksara Jayasakti, Jakarta.

Ingleson, John,

1993: *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

.....,

1983: *Jalan Kepengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta.

Kartini, R.A,

1968: "*Habis Gelap Terbitlah Terang*", Terjemahan Armijin Pane, Balai Pustaka, Jakarta.

Koch, D.M.G. Terjemahan Abdoel Moeis,

1951: *Menuju Kemerdekaan Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia Sampai 1942*, Yayasan Pembangunan, Jakarta.

Koentjaraningrat,

1993: *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kohn, Hans,

1961: *Nasionalisme Myth dan Sejarahnya* (Terjemahan), PT. Pembangunan,
Jakarta.

Kuntowijoyo,

1994: *Metodologi Sejarah*, Tira Wacana, Yogyakarta.

Ledge, D. John,

1985: *Sukarno sebuah Boigrafi Politik* (Terjemahan), Sinar Harapan,
Jakarta.

McTurnam, George Kahini,

1995: *Nasionalisme and Revolution In Indonesia*, Penerjemah; Nin Bakti
Soemanto, UNS Press, Solo.

Moedjanto, G.

2003: *Dari Pembentukan Pax Neerlandica Sampai Negara Kesatuan
Republik Indonesia*, Universitas Sanata Dharma, Yoyakarta.

.....,

1974: *Sejarah Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.

.....,

1998: *Indonesia abad Ke-20: Dari Kebangkitan Nasional Sampai
Linggarjati*, Kanisius, Yogyakarta.

Mononutu, Arnold,

1983: *Arnold Mononutu Ayam Jantan dari Indonesia Timur*, Yayasan Idayu,
Jakarta.

Muljana, Slamet,

1969: *Nasionalisme Sebagai Model Perjuangan, Jilid II*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.

Nalenan, Ruben,

1982: *Iskaq Tjokrohadisurjo Alumni Desa Bersemangat Banteng*, PT. Gunung Agung, Jakarta.

.....

1981: *Arnold Mononutu Potret Seorang Patriot*, Gunung Agung, Jakarta.

Nasution, Adnan Buyung,

1955: *Aspirasi Pemerintah Konstitusional Di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama Grafika, Jakarta.

Noer, Deliar,

1990: *Mohammad Hatta, Biografi Politik*, LP3ES, Jakarta.

Pluvier, JM,

1853: *Iktisar Perkembangan Pergerakan Kebangsaan di Indonesia tahun 1930-1942*.

Pringgodigdo, A.K,

1960: *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka Rakyat, Jakarta.

Renan, Ernest,

1994: *Apakah Bangsa Itu? EQU'est Ce qu'une Nation?*, Alih Bahasa Sunario, Bandung Alumni, Bandung.

Rose, Marvis,

1991: *Indonesia Merdeka. Biografi Politik Muhammad Hatta*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sagimun MD,

1992: *90 Tahun Prof. Mr. Seonario (Manusia Langka Indonesia)*, Rosdajaya Putera, Jakarta.

Sargent, Lyman Tower,

1986: *Ideologi Politik Kontemporer (Terjemahan)*, Bina Aksara, Jakarta.

Sartono Kartodirdjo,

1992: *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sastroamidjoyo, Ali,

1974: *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*, Jakarta, PT. Kinta.

Sastropetro, Santoso R.A,

1992: *Propaganda Salah Satu Komunikasi Masa*, Bandung: Alumni, Bandung.

Simbolon, Praktiri T,

1995: *Buku I Akar-Akar Kebangsaan Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.

Soenario,

1970: *Perhimpunan Indonesia dan Peranannya dalam Perjuangan Kemerdekaan Kita*, Paper Dalam Seminar Sejarah Nasional II Tahun 1970 di Yogyakarta.

Soeroto, Siti Soemandari,

1979: *Kartini Sebuah Biografi*, PT. Gunung Agung, Jakarta.

Sudiro, dkk.

1974: *45 Tahun Sumpah Pemuda*, Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah, Jakarta.

Sudiyo,

1989: *Perhimpunan Indonesia Sampai dengan Lahirnya Sumpah Pemuda*, Bina Aksara, Jakarta.

Suharto,

1995: *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo Sampai Proklamasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Suhartono,

1994: *Sejarah Pergerakan Nasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Tirto Prodjo, Susanto,

1989: *Sejarah Pergerakan Nasional*, Jambatan, Jakarta.

Van der Veur, Paul W (Ed),

1984: *Kenang-kenangan Dokter Soetomo*, Sinar Agape Press, Jakarta.

B. Diktat

Soehardjo, H.S,

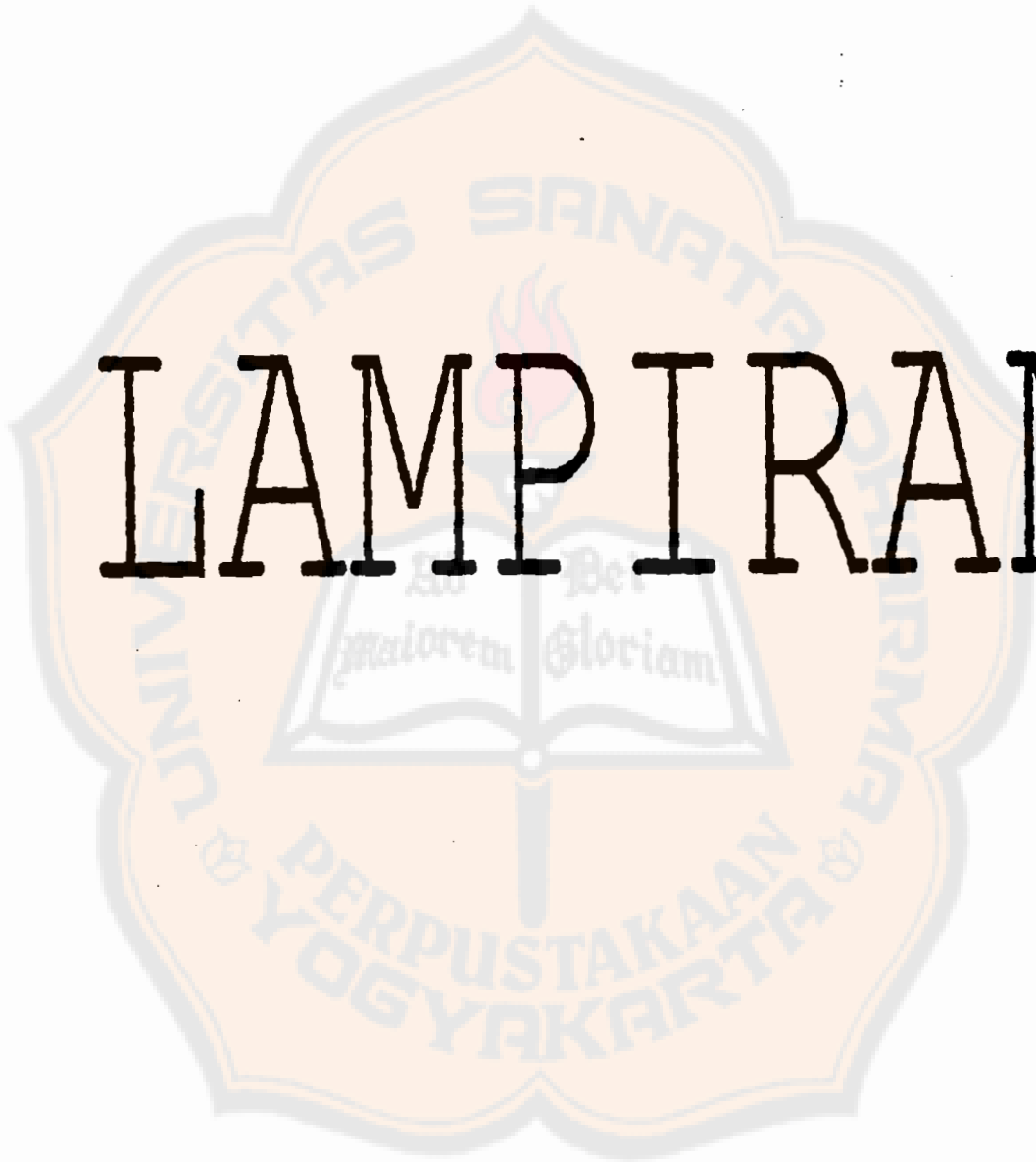
1983: *Reader Sejarah Asia Tenggara I*. Jurusan Sejarah dan Geografi Sosial, IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta.

Wiharyanto, A.K,

2005: *Reader Sejarah Indonesia Madya Abad XVI-XVII*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN



PENJELASAN PENUTUP *

Oleh : Muhammad Hatta

a. Karakter Perhimpunan Indonesia

Perhimpunan Indonesia adalah organisasi yang bertendensi politik. Walaupun tujuannya adalah “menyiapkan kemerdekaan Indonesia”, dan sarana untuk tujuan “memajukan kesatuan berpikir Indonesia” tetapi nyatanya, karena dibentuk di negeri Belanda, kerjanya jadi kurang matang. Tentu saja, secara umum Perhimpunan Indonesia hanya dapat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan teori politik saja.

Tujuan Perhimpunan Indonesia hanya dapat sungguh berarti melalui sebuah partai nasional yang didukung massa Indonesia sendiri. Dari kenyataan ini, sejak tahun lalu, dengan penuh semangat Perhimpunan Indonesia telah berusaha menghidupkan sebuah partai rakyat nasional Indonesia.

Sebagai langkah awal, prinsipnya harus diperkenalkan lebih dahulu lewat propaganda.

b. Prinsip-Prinsip Program

Dasar Perhimpunan Indonesia adalah penjelasan atas prinsipnya yang disusun pada tahun 1925. Programnya berdasarkan prinsip non-kooperasi dan swadaya. Itulah sebabnya Perhimpunan Indonesia berwatak revolusioner.

Cara bertindak ini berakar dari ketidakpuasan terhadap kebijakan politik setelah tahun 1918. Sejak itu, tumbuh ketidakpercayaan kepada kebijakan kolonial yang diambil pemerintah. Sejak dulu Perhimpunan Indonesia beroleh

* Den Haag, 1 Desember 1927, ditulis ketika berada dalam tahanan sambil menunggu pengadilan.

kesan bahwa posisi kebijakan ini terlalu dibawah pengaruh Dewan Pengusaha (Hindia Belanda), yang hanya memperhatikan kepentingan pengusaha Eropa. Kesan ini diperkuat oleh didirikannya Fakultas Indologi di Utrecht oleh para pengusaha yang disetujui oleh pemerintah dan kemudian oleh hasil perdebatan di parlemen pada tahun 1925 tentang masalah Konstitusi Hindia Belanda.

Prinsip non-kooperasi dan swadaya, pendek kata tergantung pada diri sendiri atau autoaktivitas, terdiri atas :

1. Di bidang politik: meningkatkan perasaan kesatuan dan solidaritas serta rasa keadilan politik di kalangan rakyat. Sekarang ini, Perhimpunan Indonesia melihat prinsip-prinsip non-kooperasi sebagai cara terbaik untuk membangkitkan rasa percaya diri dan rasa punya harga diri. Kebangkitan ras dan antitesis kepentingan antara penguasa dan yang dikuasai membuat Perhimpunan Indonesia merasa tak dapat tiada harus secepat mungkin membangkitkan kesiagaan rakyat banyak, sehingga menjadi suatu kekuatan yang terorganisasi dan bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka sendiri.
2. Di bidang ekonomi: sebuah organisasi, dengan kehidupan ekonominya sendiri yang berdasarkan koperasi, oleh Perhimpunan Indonesia dianggap sebagai satup-satunya cara untuk mencegah agar pemilik modal besar jangan memiliki kekuasaan kuat.
3. Di bidang sosial: memperhatikan kepentingan sosial rakyat, seperti pendidikan nasional (oleh dan untuk bangsa Indonesia). Perhimpunan Indonesia menyadari bahwa prinsip-prinsip tersebut akan berhasil

dilaksanakan jika dibawah kepemimpinan yang liberal dan tidak mementingkan diri sendiri, bersedia mengingkari diri sendiri.

Membangun pemimpin semacam itu juga sebagian dari tugasnya.

Ini berdasarkan pendapat, bahwa hanya partai yang terorganisasi berdasarkan prinsip yang dapat menjadi partai massa yang sebenarnya, yang sebagai satu unit merasa cukup untuk menghadapi masalah kekuasaan itu.

c. Masalah Kekerasan

Aksi Perhimpunan Indonesia tidak mengandung unsur kekerasan. Tindakan kekerasan bukan hanya tidak sah, tetapi juga karena merupakan aksi yang menunjukkan kegelisahan yang hanya akan membawa kehancuran. Saya bicara atas dasar ini dalam pidato saya sebagai pengantar pertimbangan atas laporan dari misi ke Bierville (Oktober 1926).

Serangkaian pemberontakan terorganisasi sebagai jalan ke arah kemerdekaan kami anggap berbahaya karena memperpanjang jalan itu sendiri. Karena setiap pemberontakan selalu diikuti oleh tindakan lebih keras dari pemerintah yang memperlemah gerakan kebangsaan.

Karenanya, jalan yang kita ambil haruslah mengorganisasikan berbagai macam kekuatan rakyat ke dalam kesatuan yang besar sekali sehingga pada akhirnya mampu menghadapi masalah kekuasaan.

Perhimpunan Indonesia membiarkan masa depan menentukan apakah perjuangan akhir untuk kemerdekaan Indonesia akan dicapai oleh pertempuran berdarah. Ini relatif bergantung kepada hubungan kekuasaan yang kelak muncul. Sebenarnya, keputusan ini sepenuhnya tergantung pada negeri



Belanda. Kalau Indonesia, dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, telah mencapai tahap kematangan berorganisasi, maka negeri Belanda akan harus bersedia atau dipaksa menyerahkan kemerdekaan.

Beberapa dari kamu berpendapat, bila propaganda untuk kemerdekaan itu telah menyusup jauh lebih dalam ke hati pegawai negeri dan tentara Indonesia, yang menjadi tulang punggung penguasa kolonial, maka penguasa kolonial akan hancur sendiri. Revolusi tanpa kekerasan kemudian akan mengakhiri pemerintah Belanda di Indonesia.

Secara pribadi, saya berharap suatu penyelesaian atas masalah masalah kolonial akan tercapai dengan cara damai. Ini akan menguntungkan bagi hubungan ekonomi kedua negara dan bermanfaat bagi situasi internasional.

Namun, menurut pandangan dominan dari sebagian terbesar bangsa Belanda yang mengendalikan kekuasaan negara itu, bahwa Indonesia harus tetap menjadi wilayah menguntungkan bagi Belanda, saya khawatir, kemerdekaan Indonesia hanya dapat tercapai lewat kekerasan. Dengan sendirinya, luas dan intensitas kekerasan ini tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Ini sepenuhnya tergantung pada hubungan kekuatan saat itu. Yang terjadi mungkin suatu revolusi berdarah, atau bisa juga suatu revolusi tak berdarah.

Saya hanya berharap bahwa generasi mendatang di negeri Belanda akan memahami semangat dari masa ini dan tidak lagi berpandangan egois demi kepentingan perdamaian dunia dan persaudaraan antar bangsa.

d. Hubungan dengan Komunis Indonesia

Kami menganggap komunis Indonesia sebagai kaum nasionalis terselubung yang berjuang dibawah panji-panji komunis dengan tujuan dapat memperoleh dukungan internasional untuk perjuangan mereka. Kerenanya kamu berupaya menggiring aksi mereka ke arah nasional. Dalam pengertian inilah saya menulis kepada Sudjadi pada tanggal 2 Juni 1926.

Kami ingin mencapai tujuan ini melalui propaganda sistematis lewat pembentukan suatu blok nasional, bukan melalui persaingan antagonistik yang akibatnya akan merugikan pemikiran kamu tentang kesatuan Indonesia.

Suatu langkah penting dari Perhimpunan Indonesia dalam memimpin gerakan kebangsaan Indonesia ke arah nasional diungkapkan dalam konvensi dengan Semaun yang ditandatangani pada 5 Desember 1926, ketika saya memanfaatkan situasi hancurnya PKI.

Konsekuensinya adalah dileburnya PKI ke dalam Partai Rakyat Nasional Indonesia yang akan didirikan. Karena itu ketetapan penting dalam konvensi tersebut adalah PKI harus menyerahkan percetakannya kepada Perhimpunan Indonesia sehingga kehilangan senjata propagandanya yang paling ampuh, yaitu pers.

PKI berjuang untuk mencapai sebuah negara Indonesia yang komunis dan berdiri sendiri, yang menurut komunis akan membentuk satu jaringan dalam revolusi dunia.

Dilihat dari pandangan hidup kaum komunis yang tidak mau menerima bantuan, kaum nasionalis Indonesia menganggap suatu negara Indonesia yang komunis akan membuatnya sekali lagi kehilangan kemerdekaannya. Karena dilihat dari situasi geografis-ekonomisnya, Indonesia terletak dipersimpangan internasional, maka para penguasa impereal Barat pernah akan toleran kepada suatu komunis Indonesia.

e. Propaganda Luar Negeri

Perhimpunan Indonesia mengerahkan propagandanya diluar negeri untuk menghadapi propaganda Dewan Pengusaha, yaitu anggapan mereka tentang Indonesia sebagai suatu tanah yang subur untuk penanaman modal Barat dan mengukur kesejahteraan rakyat Indonesia dengan kemakmuran golongan pengusaha Eropa. Propaganda Perhimpunan Indonesia menunjukkan kemelatan yang sangat dan proletarisasi rakyat banyak Indonesia dibawah kekuasaan Belanda, dan sekaligus mengubah opini publik Barat terhadap gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk tujuan ini, Perhimpunan Indonesia mengirim wakil-wakilnya ke Kongres Internasional di Bierville dan Brussels.

f. Pembentukan suatu Negara dalam Negara

Tentang hal ini saya pertama-tama menaruh harapan akan dukungan kepada pikiran autoaktivitas yang merupakan perlengkapan bagi politik non kooperasi, sehingga politik ini tidak akan mengalami kegagalan.

Setiap tahun harus diselenggarakan kongres nasioanl, sama dengan di India jajahan Inggris, sebagai persiapan dan latihan untuk membentuk parlemen

nasional yang murni dan kuat. Semua partai Indonesia harus berpartisipasi dalam hal ini dan semua masalah bertalian dengan kesejahteraan rakyat dan politik nasional harus dapat perhatian.

Konsekuensi dari sistem ini adalah didirikannya gedung pengadilan nasional, seperti yang didirikan di Irlandia untuk menyelesaikan konflik antar orang Indonesia sendiri sejauh bukan perkara pidana. Ini juga salah satu cara yang memungkinkan perasaan nasionalis dapat dikembangkan secepat mungkin.

Yang kedua, "pembentukan negara di dalam negara" dapat dimengerti dalam kaitannya dengan status dominion, yang bagi nasionalis Indonesia hanya dapat diterima sebagai bentuk pemerintahan sementara sebelum Indonesia sepenuhnya merdeka. Karena begitu status dominion tercapai, maka terbukalah jalan bagi Indonesia untuk mencapai kemerdekaan absolut.

Saya juga berpendapat bahwa kedudukan politik ini hanya dapat dicapai dengan suatu penyelesaian masalah kekuasaan oleh gerakan nasionalis yang terorganisasi dengan baik.

Oleh karena itu, yang harus dituntut adalah: kesatuan, solidaritas dan organisasi yang kuat. Realisasi dari ini adalah tugas selanjutnya dari Partai Rakyat Nasional Indonesia.

TABRANI

Perhimpoean Indonesia^{*)} 1908-1928

DEN HAAG, DECEMBER 1928

MALAM – PERINGATAN

Hampir 22 December 1928 ! Anggauta Perhimpoean Indonesia sedang asjik mengatoer lustrum jang akan datang. Tidakkah perhimpoean itoe pada 22 December 1928 tjoekeop beroesia doea poeloeh tahoen ?

Soerat-oendangan disiarkan! Orang lantass mengetahoei, bagaimanakah tjaranja hari-peringatan itoe akan diadakan. Sederhana, akan tetapi dengan oepatjara, Eenvoudig, doch plechtig.

Tanggal 22 December 1928! Poekoel 7 malam. Salah satoe zaal dari hotel-restaurant „De twee steden” di Den Haag, moelai berisi anggauta Perhimpoean Indonesia dan lain lain orang jang dapat oendangan. Djoemahnja makin lama, makin bertambah.

Hampir poekoel 8. Kita melihat kian-kemari. Medja-bestir didoedoeki oleh tt. Moh. Hatta, sebagai voorzitter, Abdoel Manaf, Abdoel Madjid, Nazir Pamoentjak dan Abdoel-lah Soekoer. Dibelakang atasnja berkibar bendera nasional kita – merah-poetih – dengan pakai kepala kerbau jang bengis ditengah-tengah. Disampingnja tampak bakoel boenga-boenga jang berisi kembang berwarna merah-poetih. Medja pers penoeh. Segala pers Belanda jang agak besar hadir. Dari perhimpoean Tiong Hoa : Chun Hoa Hui, banjak jang datang. Leden Perhimpoean Indonesia hampir semoeanja – ketjoeali jang sakit dan jang berada diloear negeri-present.

Poekoel 8, paloe-voorzitter terdengar. Toean Moh. Hatta berdiri, mengoetjapkan selamat-datang-terima-kasih dan berpidato tentang : Perhimpoean Indonesia, dari Studentenorganisasi mendjadi badan-politik.

*) S.K. Persatoean Indonesia, 15 Febnuari 1928.

lakoekan practische politik. Reaksi sekarang tidak hanya bekerdja dibelakang kelir, akan tetapi bekerdja djoega dengan terang-terangan, biarpoen ia masih tetap memakai topeng. Pada tanggal 10 Juni 1927 orang mengadakan penggeledahan di rumah beberapa studenten kita, sedang pada tanggal 23 September 1927 empat orang dari studenten kita ditangkap dan disimpan dalam roemah boei-tahanan di Den Haag enam boelan lamanya. Kepoatoesannja orang telah ketahoci. Kemenangan ada pada kita! Conclusie kita — kata t. Moh. Hatta — lain tidak, bahwa kita memberi terima kasih banjak-banjak kepada silat-siloet reaksi tadi, jang soedahi dan soedi mengoeatkan aksi kita diseloeroeh tanah air kita dan diloearnja. Dengan penggeledahan dan tangkapan tadi orang memperkoekoelikan aksi kita, sampai perhimpoeenan kita kesohor kemana-mana, dan dapat memboeka mata dan koeping sebagian banjak dari bangsa kita, jang sampai waktoe itoe masih ragoe-ragoe terhadap kepada organisasi kita. Dari studenten organisasi Perhimpoeenan Indonesia mendjadi satoe badan-politik, jang besar pengaroelnja. Oleh karena itoe — achirnja pidato t. Hatta — kita berseroe dengan sepenoeh-penoeh hati: tetaplah setia kepada perhimpoeenanmoe dengan azas-azasnja, biarpoen rintangan jang dihadapkan kepadamoe djaoeh dari ringan. Kekoeatan jang dapat menangkis reaksi itoe hanjalalah kemaoean hatimoe dan tjita-tjita moe ja'ni Indonesia Merdeka.

Pidato t. Hatta ini diterima dengan tepoek tangan jang rioeh oleh jang hadir. Se-soedahja pauze, dalam mana orang disoegoei minoeman dan makanan.

SOERAT-SOERAT DAN TELEGRAM.

Sehabisnja pauze t. Abdoel Maaaf dipersilahkan membatjakan soerat-soerat dan telegram-telegram, jang diterima oleh Perhimpoeenan Indonesia berhoeboeng dengan malam-peringatan ini. Jang hadir tertjengang dan bergirang hati, bahwa P.I. ini inempoenjai perhoeboengan jang sebegitoe loeas. Kita ambil jang perloe dan teroetama sadja, karena djika kita seboet semoeanja, nanti mengambil kebanyakan tempat.

Soerat-soerat diterima dari Perhimpoeenan revolutionair Tiong Hoa di Berlin; Liga di Chemnitz (Djerman); Liga sectie Inggeris: War Resisters International; National Minority Movement; Internationale des Travailleurs de l'enseignement di Paris; seorang dari student kita jang beladjar di Cairo jang berada di Londen, dll.

Telegram-telegram diterima dari : Liga saniteronja, jang inempoenjai hoofdkwartier di Berlin; Liga sectie Holland, Internationale Roode Hulp; Hindustan Association of Central Europa di Berlin; Worker' Welfare League of India; familie Ong Hok Lan di Amsterdam; familie Dr. Latip di Zwitserland; t. Vleming (socialist); dll.

Isi dan maksoed telegram-telegram dan soerat-soerat itoe batinnja sama semoea. Si-pengirim mengharap moedah-moedahan maksoed jang dikedjar oleh Perhimpoeenan Indonesia itoe ditjapinja.

POLITIE DALEM VERGADERING *)
TIDAK BOLEH
DIOETJAPKEN PERKATA'AN „MERDEKA“,

Pemoeda - pemoeda Indonesia boleh bangga kaloe ingetkan kombali ia-poenja congress jang begitoe berhasil bagoes. Malem Minggoe kemaren doeloe gedong K.J.B. djadi begitoe penoeh orang, depan pintoe-pintoe berdjedjal orang, begitoe poen tjendela-tjendela semoea bezet. Seperti paginja di Oost Java, bioscope, djoega jang tida bisa kebagian tempat soeda berdiri di medja-medja sampe bebrapa djam zonder merasakan djemoe, sedang pada kemaren malem di Indonesisch Clubgebouw sampe banjak pemoeda-pemoeda ambil tempat diatas lemari dan poeloen-poeloen soepaja bisa dengerken pidato dan kaloe bisa liat moekanja saban-saban spreker.

Toean Soegondo, student dari Rechtschool pantes dipoedji dalem ia poenja tjara memimpin congress. Ia selaloe bisa pegang orde, kendati soera vergadering kadangkadangk mendjadi rioeh, kalaoe politie tjampoer tangan dalem itu congress.

Ia poenja tjara bitjara tadjem matjem toean Soekarno, sabar mengingetkan kita pada tjara tocan Semoem dan djinaka zonder disengadja lingga dapet penoeh perhatian poeblik betoel-betoel.

Tida boleh diloeapen lagi ia poenja ketjakepan goenaken saban kesempatan boezet ketok pakoe di kepalanja. En toch sebagi anak-anak ia tida meninggalkan tjara anak-anak, *naiviteit*, jang memaksa publiket ketawa sembari dapetken peladjaran dan nasehat dari itoe anak-anak !

Ampir sadja congres malem pertama mendjadi katjau dan kaloe tida sampe kedjadian seperti vergadering P.N.I. di Semarang tempo hari, itoe ada lantaran ketjakepannja toean Soegondo jang kita dengan ini sekali lagi soeka sampekan poedjian.

Ini incident kita ingin bitjaraken lebi djaoe.

Sebagaimana orang taoe, rahajat di sini djoega dikasi hak boeat bersarikat dan bekoempoeel jang ditetapken dalem artikel 165 I.S.R. alinea satoe. Tapi itoe pengas dengan tangan kiri djoega ditempel dengan tangan kanan (Sebagi salah-satoe spreker kemaren sore katakaen tentang itoe idzinan arak-rakan Pandoe), sebab dalem alinea kedoea sadja dikatakaen „Dilakoekennja itoe hak ada diatoer dengan ordonnantie menginget keselamatan oemoem.....“

Dalem salah-satoe itoe ordonnantie ada dilarang anak-anak oemoer koerang delapaz belas taon toeroet tjampoer dalem persariketan atawa vergadering politiek. Dan congress jang baroe laloe itoe diadaken oleh pemoeda-pemoeda, dus tida boleh bitjaraken tentang politiek !

Soesahnja dalem ini fatsal jalah tida gampang orang bisa mewatesin sampe di mana pemitjara'an mengandoeng politiek dan sampe mana jang boekan mengandoeng itoe.

*) S.K. Keng Po, 17 Kao Gwee 2479, 29 Oktober 1927.

Dalam segala pergerakan nasional kaoem pemoedalah, jang senantiasa tampak dan terdapat dibarisan pertama. Dan antara pemoeda-pemoeda tadi kaoem studentenlah jang mengambil bagian terbesar sekali. Dari itoe memang seharoesnja, bahwa pemoeda-pemoeda kita, jang beladjar disekolah tinggi ditanah dingin; dimana hak-hak ra'jat oleh pemerintah negeri diakoei, tidak berpoetoes-poetoesan mentjari daja-oepaja, agar mereka itoe dapat mempersembahkan kepandaian dan kekoetannya kepada pergerakan kita nasional menodjoe kemerdekaan. Sifat dan langkah Perhimpoean Indonesia pada masa belakang ini boekanlah bikinan dari kita manoesia, akan tetapi memang kehendak zaman. Azas, jang dipakainja, djalan jang ditempoehnja, semoanja hasilnja kedjadian-kedjadian jang menggenggam bangsa dan tanah air kita dalam doenia keboedakan. Hikajat Perhimpoean Indonesia itoelah boekti-boektinja.

Moela-moela seboeah organisasi, Indische Vereeniging namanja, jang-teroetama bermaksoed memberi kesempatan kepada lidnja boeat adjar-kenal, agar dengan tjara begitoe orang dinegeri mantja tidak mempoenjai perasaan berasing. Dari 1908 sampai 1913 Indische Vereeniging tadi tetap seboeah gezelligheidsvereniging jaitoe perhimpoean penghiboer hati.

Kedatangan tt. Tjipto Mangoenkoesoemo, Soeardi Soerjaningrat dan Douwes Dekker kemari, sebagai korban dari koloniale politik, berpengaruh besar kepada pemoeda-pemoeda kita disini, teroeta: a t. Soeardi. Madjallah, Hindia Poetera namanja, diterbitkan dan pada 1917 didirikan Indonesische Verbond van Studeerenden. Toedjoean organisasi itoe antara lain-lain jani: mentjari daja oepaja, agar antara kaoem Blanda, Tiong Hoa dan kita timboel persatoean dalam arti bekerdja bersama-sama oentoeq keperluan Indonesia. Madjallah Hindia Poetera diambil over olehnja.

Kemaoean ada, kesempatan ada; jang tidak ada jaitoe praktijnja dari tjita-tjita tadi. Perselisihan pertoeoet-toeroet moentjoel pada: lustrum dari Indologen Vereeniging 1917, dalam mana seorang tjalon-ambtenar B.B. bikin propaganda tentang sepak terdjang Vereenigde Oost-Indische Compagnie kongres jang pertama, jang kedoea dan jang ketiga di Wageningen, Den Haag dan Deventer. Dalam kesemoeanja teranglah, bahwa persaudaraan antarabangsa Blanda dan kita tidak bisa, dan djika dibisa-bisikan hanja dikertas belaka dan dengan meroegikan pergerakan kita menodjoe kemerdekaan.

Orang bertanja, apakah sebabnja, kita tidak dengan sigera mengasingkan diri dari mereka?

Pada waktoe itoe sebagian banjak dari kita masih mempoenjai kepertjajaan kepada kedjoedjoean koloniale politik negeri Belanda. Tidakkah bekas G.G. van Limburg Stirum memboeka Volksraad pada tahoen 1918 dengan mengemoekakan beberapa perdjandjian-perdjandjian jang menjenangkan hati kita? Soeara G.G. inilah jang menidoerkan kita pada masa itoe.

Tetapi meskipun soedah begitoe, arah-nasional mengalir ketempat jang memang pada tempatnja. Pada tahoen 1919 *Indische Vereeniging* itoe dirobah mendjadi *Indone-*

sische Vereeniging boekan madjallah *Hindia Poetera* tadi diganti dengan *Indonesia Merdeka*. Tjita tjita non kooperasi moela masoek dan setelah ia masoek, melekatlah ia dengan sekoet-koetnja, pada tahoen 1923 kaoem nonkooperatorlah jang terkoesa: oleh karena itoe Indonesische Vereeniging keloear dari Indonesisch Verbond dan diberinja nama Perhimpoean Indonesia. *Nomen omen est*, kata pepatah Latin. Nama itoe mengandoeng alamat.

Alamat apa jang dibawanja oleh perobahan nama itoe? Tanda, bahwa pemoeda-pemoeda kita jang berkoempoel dalam Perhimpoean Indonesia itoe, sadar. Sadar sebagai *spes patriae*, pengharapan tanah air. Nama Perhimpoean Indonesia boekan salinan dari Indonesische Vereeniging, akan tetapi satoe nama, jang memang tjotjok dengan maksoed dan toedjoean perhimpoean itoe. Maksoed jang boelat jaitoe mengejar kemerdekaan bangsa dan tanah air kita dengan memakai azas non-kooperasi dan bekerdja atas kekoetatan sendiri. Indonesia Merdeka itoelah madjallah dan toedjoean Perhimpoean Indonesia.

Politiek-assosiasi ditinggalkan, angan-angan non-kooperasi dikerdjakan, timboellah reaksi sehebat-hebatnja terhadap kepada Perhimpoean Indonesia.

Berhoeboeng dengan boekoe-peringatannja pada tahoen 1924, dalam mana orang dapat membatja sifat dan langkah Perhimpoean Indonesia, bergonggonglah pers sana. Andjing bergonggong, toannja terperandjat dari tidoer dan merasa berkewadajiban menoeoeti kemaoean andjing tadi. Ma'loem menoeoet biasa, orang jang terperandjat dari tidoer itoe djaoeh dari sadar, djadi dia itoe tidak dapat bekerdja dengan otak jang tenang dan sehat. Segala pekerdjaannja dan segala ichtiarnja semata-mata bersifat "hantam kromo".

Perhimpoean Indonesia tidak memperdoelikan gonggongan dan asoetan tadi. Ia malah memperkoetkan aksinja. Binepoen dinegeri Belanda, walaupoen diloearnja, ia dengan teroes-terang membocat propaganda dengan memakai leuze: Indonesia lepas dari Nederland.

Aksi dikoeatkan, reaksi mengeloearkan giginja, tapi masi was-was boeat menentang Perhimpoean Indonesia dengan terang-terangan. Djadi ia terpaksa bekerdja dibelakang kelir. Reaksi dibelakang kelir ini dikepulai oleh seorang jang katanja dimaksoedkan sebagai "bapa" dari pemoeda-pemoeda kita ditanah dingin, akan tetapi jang sebetoenja tidak lain ketjoeali spion dan perkakas reaksi. Bagaimanakah djahatnja hati sibapa, djika dia itoe bersifat spion terhadap kepada sianak?

Pada boelan Februari 1927 telah didirikan di Brussel Liga tegen Imperialisme, tegen Koloniale Onderdrukking en voor Nationale Onafhankelijkheid. Maksoed Liga ini jaitoe mempersatoean segala kekoetatan oentoeq meroeboehkan dan menghantjoerkan kekoesaan Imperialisme, jang mendatangkan dan menetapkan doenia-keboedakan terhadap kepada sebagian banjak dari manoesia, teroetama dibenoea Asia.

Nederland ada satoe Imperium, keradjaan jang mempoenjai tanah djadjahan. Perhimpoean Indonesia mendjadi lid dari Liga tadi. Kedjadiannja? Perkelahian hebat antara Perhimpoean Indonesia dengan pemerintahan Belanda, jang berdarah dan bersifat imperialistisch itoe. Dengan masoeknja dalam Liga tadi, Perhimpoean Indonesia me-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI POETOESAN

Kerapatan pemoeda-pemoeda Indonesia j. diadakan oleh perkoempoelan-perkoempoelan pemoeda Indonesia j. berdasarkan kebangsaan dengan namanja: Jong Java, Jong Soematra (Pem. Soematera), Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Islamieten Bond, Jong Batakbond, Jong Selebes, Pemoeda Kaoem Betawi dan Perhimpoean peladjar-peladjar Indonesia :

Memboeka rapat pada tg. 27 dan 28 Oct. th 1928, dinegeri Djakarta; -

Sesoedahnja mendengar pedato-pedato dan pemitjaraan j. diadakan dalam kerapatan tadi;

Sesoedahnja menimbang segala isi-isi pedato-pedato dan pemitjaraan ini;

Kerapatan laloe mengambil poetoesan.

PERTAMA

Kami poetera dan poeteri Indonesia me-
ngakoe bertoempah-darah j.satoe, tanah
Indonesia.

KEDOEA

Kami poetera dan poeteri Indonesia me-
ngakoe berbangsa j.satoe, bangsa Indo-
nesia.

KETIGA

Kami poetera dan poeteri Indonesia men-
djoendjoeng bahasa persatoean, bahasa
Indonesia.

Setelah mendengar poetoesan ini, kerapatan mengeloearkan kejakinan azas ini wadajib dipakai oleh segala perkoempoelan-perkoempoelan kebangsaan Indonesia;

Mengeloearkan kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan dasar persatoeanja.

Kemaean

Sedjarah

Bahasa

Hoekoem-'adat

Pendidikan dan kepandaian.

Dan mengeloearkan pengharapan, soepaja poetoesan ini diedarkan dalam segala soerat kabar dan dibatjakan dimoeka rapat perkoempoelan-perkoempoelan kita.

PEMBELAAN EMPAT ANGGOTA PERHIMPUNAN INDONESIA

DI PENGADILAN DEN HAAG

1. Muhammad Hatta

Tuan-tuan dan majelis hakim yang terhormat,

Saya sudah mempersiapkan suatu pembelaan panjang lebar yang pembacaannya akan meminta waktu selama 3½ jam. Tetapi saya tidak akan menyita lagi waktu tuan-tuan untuk mendengarkannya. Oleh sebab itu saya menyerahkan naskah pembelaan saya untuk diteliti dan dipertimbangkan.

Saya sepenuhnya menyetujui dan mendukung semua yang telah dikemukakan para penasehat hukum saya, Mr. Mobach dan Mr. Duijs. Mereka telah menguraikannya secara baik dan tepat sekali. Hanya satu hal yang masih ingin saya kemukakan dalam kesempatan ini, yaitu tentang sikap Perhimpunan Indonesia terhadap “kekerasan”. Kalau tuan-tuan meneliti anggaran dan peraturan rumah tangga perkumpulan itu, tuan-tuan tidak akan menemukan unsur apapun yang berbau kekerasan didalamnya. Mereka tidak pernah merencanakan atau menghendaki adanya tindakan kekerasan dan tidak ada macam tindakan kekerasan yang mereka setuju dan dukung. Yang benar adalah mereka berbicara tentang kekerasan.

Analisa tentang hubungan kolonial telah memberi kesimpulan kepada Perhimpunan Indonesia, bahwa seluruh keadaan dikuasai oleh dua elemen yang satu sama lain bertolak belakang, yaitu: pemerintah Belanda yang ingin mempertahankan kekuasaannya di Indonesia dengan segala cara dan upaya yang dimiliki dan bangsa Indonesia yang menghendaki kemerdekaan yang penuh.

Keadaan itu telah memaksa mereka meyakini, bahwa kemerdekaan hanya dapat diperoleh bangsa Indonesia melalui kekerasan.

Sebenarnya hal itu bukanlah suatu penemuan yang mengejutkan. Para missionaris dengan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat di negeri ini sudah lama tiba pada kesimpulan itu. Hal itu sudah jelas dalam kutipan-kutipan yang telah diuraikan Mr. Duijs dalam pidato pembelaannya. Rupanya sudah merupakan suatu ketentuan sejarah, bahwa kelahiran suatu bangsa harus selalu disertai darah dan tangis.

Dalam *Indonesia Merdeka* tahun 1924, halaman 1, ditulis demikian:

“Cepat atau lambat setiap bangsa yang ditindas pasti memperoleh kemerdekaannya kembali; itulah hukum sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Hanya soal proses dan cara bagaimana mereka memperoleh kembali kemerdekaan itu yang tergantung pada mereka yang pada saat itu memegang kekuasaan. Malah merekalah sebenarnya menjadi faktor yang menentukan, apakah perjuangan kemerdekaan itu harus berlangsung dengan tangis dan darah atau dilaksanakan secara tertib dalam keadaan damai”

Negeri Belanda sepenuhnya berkuasa untuk menentukan dengan cara bagaimana Indonesia akan memperoleh kemerdekaannya: dengan cara kekerasan atau dengan jalan damai. Tetapi melihat bagian terbesar bangsa Belanda, yang jelas nampak pada sikap anggota-anggota Dewan Perwakilan pada tahun 1925, ketika undang-undang tentang Tata Negara Hindia Belanda dibicarakan, saya takut, bahwa kekuasaan yang pertamalah yang akan terjadi.

Bahwa pemerintah kolonial akan berakhir, untuk saya sudah merupakan suatu hal yang pasti. Hal itu hanya soal waktu saja, dan sama sekali bukan soal ya atau tidak. Kiranya baik, kalau bangsa Belanda dapat menyadari, bahwa kekuasaan mereka tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya.

Satu hal lagi, tuan ketua dan majelis hakim yang terhormat, saya ingin kemukakan disini, yaitu tentang penahanan sementara yang ditimpal atas diri kami. Kami berdiri disini bukan sebagai penjahat, kami adalah orang-orang jujur yang secara jujur membela kepentingan kami. Oleh sebab itu kiranya tuan-tuan dapat menerima yang saya kemukakan ini.

Waktu tahanan sementara atas diri kami, setiap kali diperpanjang selalu didasari pada alasan: "takut melarikan diri". Kami melarikan diri, tuan ketua dan majelis hakim yang terhormat? Kami bukan pengecut dan tidak pernah terlintas dalam benak kami untuk melarikan diri. Kami berjuang untuk suatu tujuan yang luhur dan melarikan diri akan merusak seluruh perjuangan kami. Mungkin keyakinan kami bukan keyakinan tuan-tuan, tetapi satu hal yang sama-sama kita miliki, karena kita bukan orang-orang jahat, yaitu, saling menghormati keyakinan masing-masing.

Perasaan hormat seperti itu akan memberikan kepastian pada tuan-tuan, bahwa dalam perkara yang kami hadapi, usaha melarikan diri adalah suatu perbuatan yang paling buruk.

Tetapi janganlah saya terus berbicara abstrak. Izinkanlah saya mengemukakan hal-hal yang nyata menyakinkan tuan-tuan ketua dan majelis hakim, bahwa motif "takut melarikan diri" sama sekali tidak berdasar.

Jikalau saya pernah berpikir untuk melarikan diri, bahwa persoalan kami akan disidangkan, yang menurut perkiraan saya akan dilakukan pada bulan September tahun lalu saya perpendek masa libur saya dan segera datang ke negeri Belanda. Pada waktu itu ketiga kawan saya ini juga berada di luar negeri. Maka, sama halnya, jikalau mereka ingin melarikan diri, mereka akan tetap tinggal disana.

Tidak tuan ketua yang terhormat, sifat ksatria yang kami miliki mematangkan kami melakukan tindakan pengecut. Dan sifat keksatriaian kami inilah yang dihadaahi 5,5 bulan dibelakang trali besi dasar yang jelas.

Alasan “takut melarikan diri” jelas tidak dapat dipertahankan lebih lama. Sebab itu saya sangat mengharapkan, sementara menunggu putusan tuan-tuan terhormat, memerintahkan penahanan sementara atas diri kami segera diakhiri. Saya percaya, bahwa dalam hal ini pun tuan akan menegakkan keadilan.

Jikalau sekarang saya tiba pada akhir kata-kata tambahan pada pembelaan saya, saya ingin menggunakan kedudukan saya sebagai tertuduh untuk mengajukan protes terhadap ketidak-adilan yang masih selalu harus dialami bangsa saya. Kepada tuan-tuan, penegak hukum dan keadilan, saya mengajukan permohonan, supaya tuan-tuan dapat memberikan sanksi-sanksi untuk kami pemuda-pemuda Indonesia yang tidak berdaya menghadapi kekuasaan pemerintah Belanda. Selama bertahun-tahun kami menderita dan hidup tanpa kepastian, karena selalu dikejar-kejar dan dimata-matai. Kami benar-benar mengira, bahwa negeri Grotius yang sangat menjunjung tinggi hak-hak manusia, kami dapat menikmati perlakuan yang sama dengan orang lain. Tetapi tidak!

Karena orang-orang tidak menemukan alasan untuk menghukum kami, maka mereka menggunakan alasan imoril untuk menjebloskan kami dalam tahanan.

Orang tua kami di Indonesia, yang berkerja di pemerintahan atau instansi lainnya, mendapat ancaman dipecat dari jabatan atau dengan berbagai macam perlakuan yang tidak diinginkan siapapun, jikalau mereka terus mengirim uang kepada anak-anak mereka yang belajar di Eropa.

Cara itu merupakan senjata bermata dua. Pada satu pihak, anak-anak mereka diserahkan pada kekerasan ekonomi di negeri asing serta segala penderitaan yang menjadi akibatnya, dan pada pihak lain, pertentangan ditumbuhkan di antara ayah dan anak, antara generasi tua dan muda.

Sebenarnya, tanpa cara-cara itu sudah terdapat kesenjangan antara orang tua dan orang muda; ayah dan anak sudah hidup dalam dua dunia yang berbeda.

Generasi tua merasa akhirnya sudah semakin dekat, ingin memelihara apa yang telah dimiliki. Belanda dengan generasi muda, yang sedang menghadapi terbitnya sinar matahari pagi hari baru, jiwanya masih bergelora dipenuhi cita-cita dan harapan pada masa depannya. Keyakinan mereka, bahwa hari itu pasti akan lebih cerah demikian kuatnya, menyebabkan dada mereka seolah-oleh meledak; cinta-kasihnya terlalu kuat, sehingga orang-orang muda itu bertekad, sekalipun dengan rasa berat, menggunakan tangannya mematahkan cengkaman dengan berdarah demi keselamatan bangsa dan negerinya.

Namun tuan ketua dan hakim yang terhormat, fakta tersebut tidak membenarkan cara-cara yang dilakukan pemerintah. Menjebloskan orang-orang

Indonesia tertentu, yang belajar di negeri ini dalam kesengsaraan, merupakan hukuman yang tidak adil, tidak adil dan sangat biadab.

Kepada tuan-tuan hakim yang terhormat, yang melambangkan keadilan dan kebenaran, saya bertanya dalam segala kepercayaan, apakah cara tersebut secara tidak langsung, tidak membatasi gerakan mereka di negeri ini?

Apakah kejadian-kejadian seperti itu menambah kebencian dalam hati orang-orang yang setiap saat dapat saja diganggu, sekalipun dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum? Apakah kami salah, kalau kami ingin ingin membebaskan diri dari pahit getirnya kedudukan sebagai bangsa jajahan?

Lebih dari jelas orang-orang menyatakan pada kami, bahwa hak-hak kami, berdasarkan undang-undang negeri kami, sebagai anak-anak bangsa jajahan, tidak ada.

Tetapi orang-orang Perhimpunan Indonesia mampu menderita, sama seperti pemuda-pemuda bangsa jajahan lain.

Masa muda mereka memang tidak begitu cerah seperti masa muda anak-anak bangsa merdeka. Dalam masa mudanya mereka sudah harus menderita dan berkorban. Tetapi semua pengalaman itu telah membajakan semangat dan watak mereka untuk berjuang mencapai cita-cita yang memanggil mereka. Panggilan yang didengar dengan telinga hatinya telah membangkitkan semangatnya untuk berjuang bersama bangsanya.

Kami percaya pada hari kemudian bangsa kami dan kami juga percaya pada kekuatan-kekuatan jiwanya. Kami tahu, bahwa kekuasaan di Indonesia

secara perlahan tetapi pasti akan bergerak kepihak kami. *Indonesia Merdeka* menulis :

“Orang berkata, bahwa bangsa Indonesia yang besar pada masa silam, tidak lagi mampu berbuat sesuatu yang besar untuk hari kemudian, bahwa secara pasti dia terus menurun dan tidak akan mampu memperbaiki keadaan lagi.

Kita tidak dapat menghakimi bangsa kita. Sejarah yang akan menentukannya. Dan dengan bangsa itulah kita akan dihukum atau dibebaskan, oleh sebab dengan bangsa itulah kita mendapat penghargaan atau penghinaan.

Hidup pemuda Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup bangsanya yang menderita dan berharap. Itulah nalurnya yang memanggil-manggil, dialah jiwanya yang bernyala-nyala mendobrak pintu hari depannya. Rona kemerah-merahan hari depan itu telah nampak pada hari ini. Kita menyambutnya sebagai permulaan hari baru.

Anak-anak Indonesia turut mengemudikannya ke arah yang dikehendaki. Mereka mempunyai kewajiban untuk mempercepat datangnya hari baru itu. Mereka harus mengajarkan kembali hidup yang berbahagia kepada bangsanya; dia tidak boleh dibiarkan hanya merasakan pahitnya saja; bangsa Indonesia harus merasa dirinya bebas di bawah langitnya yang biru; dan merasa dirinya tuan dan penguasa dalam negeri yang diberikan Tuhan padanya”

Tuan-tuan hakim yang terhormat. Jikalau saya sekarang menyatakan siap menanti keputusan tuan-tuan, kata-kata Rene de Clerg yang telah menjadikan “Indonesia Muda” sebagai latar belakang ucapannya, terletak pada bibir saya:

“Hanya satu tanah air yang dapat menjadi tanah airku,

Dia tumbuh sesuai upaya dan upaya itulah dayaku”

2. R.M. Abdul Majid Joyoadiningrat

Tuan-tuan hakim dan anggota majelis yang terhormat. Kemarin, setelah mendengarkan tuduhan tuan penuntut umum yang sangat memburukkan cita-cita kami yang demikian mulia dan agung, saya hampir tidak dapat menahan gejolak hati untuk memohon waktu pada tuan-tuan hakim yang terhormat untuk mengajukan bantahan terhadap tuduhan itu.

Namun setelah mendengarkan pidato pembelaan tuan-tuan pembela kami yang demikian sempurna melukiskan adanya suatu pengertian yang mendasar, yang secara tuntas telah membantah segala tuduhan terhadap cita-cita kami yang luhur itu, timbullah keyakinan dalam hati saya, bahwa tidak semua orang di negeri ini menentang gerakan dan tujuan nasionalis kami. Itulah sebabnya, tuan-tuan hakim, ketua dan anggota majelis, saya hanya memohon beberapa saat guna mengutarakan beberapa patah kata sebagai tambahan.

Setelah sidang kemarin, didalam kesunyian sel penjara, saya merenungkan dan membanding-bandingkan dua pendapat yang bertolak belakang, yang dimiliki tuan penuntut umum dengan tuan-tuan pembela kami. Maka sekarang terpaksa saya mengakui, bahwa diantara bangsa Belanda masih terdapat pemuka-pemuka yang memberi penilaian yang berbeda terhadap gerakan dan tujuan perjuangan bangsa kami dengan penilaian tuan penuntut yang terhormat.

Sekarang barulah saya benar-benar yakin, bahwa tuan-tuan pembela tidak berdiri sendiri dalam pandangan dan penilaian mereka terhadap perjuangan kami. Masih terdapat beribu-ribu orang dikalangan masyarakat ini yang, sekalipun tidak

selalu sependapat tentang cara dan penafsiran kami, pada pokoknya sependapat dengan tujuan yang kami junjung.

Dan saya percaya dan yakin, tuan-tuan ketua dan anggota majelis hakim yang terhormat, bahwa tuan-tuan sendiri pun tergolong dalam bagian masyarakat yang saya sebut, yang walaupun tidak selalu menyetujui rencana dan usaha yang kami lakukan, pada dasarnya, berbeda dengan tuan penuntut umum, dapat menghargai cita-cita dan tujuan gerakan kami itu.

Oleh sebab itu saya percaya dan yakin, bahwa, sekalipun tuan-tuan hakim ketua dan anggota majelis mempunyai pendapat yang berbeda tentang cara-cara perjuangan untuk kemerdekaan bangsa kami, tuan-tuan pasti menghargai tujuan kami dan tidak akan memperlakukan kami sebagai penjahat-penjahat dalam arti umum, seperti yang dilakukan tuan penuntut umum.

Selain pernyataan percaya dan yakin itu tidak ada lagi yang perlu saya tambahkan pada kata-kata yang telah diutarakan tuan-tuan pembela dan saudara sesama terdakwa Mohammad Hatta.

3. Ali Sastroamidjoyo

Tuan-tuan hakim, ketua dan anggota majelis.

Selama saya bermaksud untuk turut mengemukakan bantahan terhadap tuduhan tuan penuntut umum yang terhormat. Tetapi setelah mendengar penjelasan serta uraian tuan pembela yang kami hormati, tuan Duijs, maka saya menganggap apa yang saya ingin utarakan tidak perlu bagi saya kemukakan dalam sidang ini.

Namun demikian, saya masih ingin memohon tuan-tuan hakim yang terhormat sudi mempelajari naskah pembelaan yang saya serahkan dengan harapan dapat membantu tuan-tuan dalam mempertimbangkan keputusan terhadap tuduhan dan tuntutan yang dilakukan tuan penuntut umum.

Disini saya ingin mengutarakan ucapan terimakasih yang sangat dalam terhadap tuan-tuan pembela kami. Tidak boleh tidak, saya harus menyampaikan rasa terimakasih kepada Tuan Mobach atas pembelaannya, terlebih lagi kepada Tuan Duijs atas gambaran yang secara sempurna menyatakan kebenaran tentang keadaan bangsa dan negeri kami dan karena sikapnya yang benar-benar menunjukkan pengertian dan dukungan atas tujuan dan cara-cara perjuangan kami. Dia telah mengungkapkan fakta-fakta dalam pidatonya yang terasa sangat menyegarkan hati dan jiwa kami. Dia telah mengungkapkan segala perasaan yang selama ini harus kami pendam. Kata-katanya telah menghidupkan harapan baru dalam hati kami, harapan untuk bangsa kami dan untuk hari kemudian yang lebih cerah. Pidato Tuan Duijs itu telah memungkinkan saya menyadari, bahwa pasti masih dapat orang-orang lain di negeri ini yang dapat memahami dan mengukur tinggi-rendahnya cita-cita kami seperti dia.

4. Nazir Sutan Pamuncak

Tuan-tuan hakim, ketua dan anggota majelis yang terhormat.

Setelah mendengarkan pidato tuan-tuan pembela kami, yang demikian tuntas dan jelas, masih ingin saya menggunakan kesempatan yang secara royal tuan-tuan berikan.

Namun sebelumnya, izinkanlah saya menembahkan rasa terimakasih saya pada ucapan-ucapan yang sudah disampaikan saudara-saudara terdakwa terdahulu, kepada tuan-tuan pembela atas segala usaha yang mereka telah dan akan lakukan dalam perkara ini.

Tentang isi surat tuduhan tuan penuntut umum yang terhormat, saya hanya ingin meminta perhatian tuan-tuan hakim yang terhormat pada dua hal yang tersebut dalamnya, yang sama sekali telah memberi gambaran yang sangat bertentangan dengan keadaan serta kejadian yang sebenarnya.

Yang saya maksudkan adalah, hubungan kami dengan organisasi-organisasi yang terdapat di luar negeri, khususnya keikutsertaan kami dalam kongres demokrasi pasifik di Bierville pada bulan Agustus 1926 dan malam kesenian Timur di Paris, juga pada tahun 1926.

Tuan penuntut umum telah menggambarkan hubungan luar negeri kami tersebut, seolah-olah mempunyai kaitan dengan kerusuhan dan kekerasan yang terjadi di negeri kami. Bahwa hubungan itu sama sekali tidak mempunyai dasar kebenaran dan dengan sendirinya dibantah oleh dasar dan tujuan kongres Bierville yang pasifis. (Tidak perlu merasa heran, kalau tuan penuntut umum sengaja lupa menyebutkan, bahwa kongres tersebut adalah kongres pasifis, karena dalam

kutipan-kutipan yang telah diutarakan dalam surat tuduhannya kemarin dapat ditemukan bukti-bukti yang jelas, bahwa kealpaan-kealpaan seperti itu bukanlah suatu perbuatan yang asing baginya).

Untuk jelasnya, saya dapat menerangkan, bahwa kongres tersebut diadakan dalam sebuah istana dan berada di bawah perlindungan orang pasifis yang sangat terkenal di Eropa, Marc Sangnier. Dia bukan seorang sosialis dan sama sekali dia tidak dapat disebut sebagai pendukung sistem tentara merah Rusia.

Tentang malam kesenian di Paris. tuan-tuan hakim tentu sependapat dengan saya, bahwa malam itu tidak disebut sebagai malam propaganda kekerasan, jikalau tuan-tuan tahu, bahwa pada malam yang diadakan khusus untuk menyajikan kesenian-kesenian Timur, turut juga hadir-tidak lain dari-tuan duta besar kerajaan Belanda di Perancis, Tuan Dr. Loudon.

Yang mulia Tuan Loudon telah menyatakan pujian dan penghargaan terhadap para penyelenggara malam itu serta rasa bangganya terhadap penyajian kesenian Indonesia yang kami adakan. Secara khusus dia mengucapkan terimakasih disertai pengharapan, supaya pada musim gugur tahun 1926 itu juga, kami bersedia datang kembali untuk menyelenggarakan malam musik dan tari Indonesia di Paris. Hanya akibat kesibukan yang sangat berlebihan dan mengada-ada dari pihak penasihat Departemen Daerah Jajahan mengenai masalah para mahasiswa Indonesia saja, undangan itu tidak dapat kami penuhi.

Tidak mustahil, bahwa cara-cara pemikiran Tuan Westenenk tersebut sejalan dan seirama dengan cara-cara pemikiran tuan penuntut umum yang terhormat.

SILABUS

Mata Pelajaran : Sejarah

Satuan Pendidikan/Kelas : Sekolah Menengah Atas (SMA)/ 2

Standar Kompetensi : Kemampuan memahami perjalanan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan Pendudukan Jepang.

KOMPETENSI DASAR	Kemampuan menganalisis hubungan antara berkembangnya paham-paham baru dan transformasi sosial dengan kesadaran dan pergerakan kebangsaan serta munculnya keragaman ideologi di Indonesia.
HASIL BELAJAR	Agar siswa mampu memahami dan mendeskripsikan tentang pergerakan kebangsaan Indonesia khususnya sejarah Perhimpunan Indonesia.
INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa dapat mendiskripsikan mengenai latar belakang perjuangan politik Perhimpunan Indonesia dari organisasi sosial biasa berubah menjadi organisasi politik yang radikal. <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Siswa dapat menjelaskan peranan <i>Indische Vereeniging</i> bagi Perhimpunan Indonesia. 1.2. Siswa dapat menjelaskan mengenai Janji November atau November Beloften. 1.3. Siswa dapat menjelaskan peranan para mahasiswa baru bagi reorganisasi Perhimpunan Indonesia. 2. Siswa dapat mendiskripsikan mengenai kegiatan politik

	<p>Perhimpunan Indonesia.</p> <p>2.1. Siswa dapat menjelaskan kegiatan politik Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda dan negara-negara Eropa.</p> <p>2.1.1. Kegiatan politik di negeri Belanda.</p> <p>2.1.2. Kegiatan politik di negara-negara Eropa</p> <p>2.2. Siswa dapat menjelaskan kegiatan politik Perhimpunan Indonesia di Indonesia.</p> <p>2.2.1. Hubungan Perhimpunan Indonesia dengan Tanah Air.</p> <p>2.2.2. Kegiatan politik Perhimpunan Indonesia di Indonesia.</p> <p>3. Siswa dapat mendiskripsikan mengenai sumbangan Perhimpunan Indonesia bagi bangsa Indonesia.</p> <p>3.1. Siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan kontribusi Perhimpunan Indonesia bagi bangsa Indonesia.</p> <p>3.2. Siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan hasil yang telah diperoleh Perhimpunan Indonesia.</p>
<p>KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR</p>	<p>1. PENDAHULUAN</p> <p>1.1. Apersepsi : Guru memberikan pertanyaan pembuka mengenai materi ini, dll.</p> <p>1.2. Tujuan Pembelajaran : Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.</p> <p>2. KEGIATAN INTI</p>

	<p>2.1. Orientasi</p> <p>2.1.1. Siswa membaca buku teks ataupun handouts yang telah disediakan kemudian guru menjelaskan mengenai materi tersebut.</p> <p>2.2. Latihan</p> <p>2.2.1. Siswa berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya antar kelompok di dalam kelas mengenai soal-soal yang diberikan oleh guru.</p> <p>2.2.2. Siswa membahas soal-soal yang telah diberikan oleh guru.</p> <p>2.3. Umpan Balik</p> <p>2.3.1. Wakil kelompok diskusi mengemukakan hasil diskusinya dan menjawab pertanyaan dari teman-temannya.</p> <p>2.3.2. Guru menegaskan kembali hasil diskusi yang telah disampaikan dan yang telah dibahas siswa.</p> <p>3. PENUTUP</p> <p>3.1. Guru merangkum materi yang telah disampaikan.</p> <p>3.2. Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) mengenai tokoh-tokoh orang yang berperan dalam Perhimpunan Indonesia.</p>
MATERI POKOK	Sejarah Perhimpunan Indonesia tahun 1925-1918
MEDIA DAN	1. Media

<p>SUMBER</p>	<p>1.1. Transparansi mengenai ringkasan materi dan penjelasan materi.</p> <p>1.2. Kertas materi dan handouts</p> <p>1.3. Papan tulis, peta Indonsia dan peta sejarah Indonesia.</p> <p>1.4. Foto-foto dan kliping mengenai Perhimpunan Indonesia.</p> <p>2. Sumber</p> <p>Buku pelajaran SMA baik karangan Depdikbud maupun Swasta.</p>
<p>PENILAIAN DAN EVALUASI</p>	<p>1. Penilaian proses dan penilaian hasil untuk mengetahui penguasaan materi siswa.</p> <p>2. Tugas berupa peranan tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia.</p> <p>3. Portofolio yakni ressume mengenai sejarah Perhimpunan Indonesia.</p> <p>BENTUK PENILAIAN DAN EVALUASI</p> <p>1. Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses -Hasil belajar - Portofolio -Tugas - Penilaian <p>2. Evaluasi</p>



Yogyakarta, 22 Mei 2006

Guru Mata Pelajaran

Redemptus Mailau